

LAPORAN *SURVEILLANCE*  
PERBANKAN INDONESIA

**LSPI**

TW II 2024

---

LAPORAN *SURVEILLANCE*  
PERBANKAN INDONESIA

TW II 2024

Halaman ini sengaja dikosongkan

# Kata Pengantar

## Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan - Otoritas Jasa Keuangan



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia Triwulan II-2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas jerih payahnya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Kami berharap agar pembaca dan pengguna laporan ini dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari data dan informasi maupun analisis/ulasan yang disajikan.

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia Triwulan II-2024 ini memuat *overview* dan analisis kondisi perekonomian global maupun domestik, serta kaitannya terhadap perkembangan kinerja, penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, dan profil risiko yang dihadapi perbankan. Selain itu, dalam laporan ini tercakup juga kebijakan perbankan yang diterbitkan oleh OJK pada periode laporan, perkembangan kelembagaan perbankan, serta koordinasi antar lembaga terkait perbankan. Pada laporan ini juga disajikan pembahasan khusus dengan topik "Interkoneksi Kebijakan Moneter The Fed dengan Stabilitas Makroekonomi dan Kondisi Perbankan Indonesia".

Secara umum, pada periode laporan, kondisi perekonomian global relatif stagnan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, serta pertumbuhan ekonomi negara-negara yang masih terdivergensi. Ekonomi AS, Eropa, dan UK tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun ekonomi Tiongkok justru cenderung belum cukup kuat seiring lemahnya permintaan domestik dan berlanjutnya tekanan sektor properti. Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih cukup tinggi, antara lain dipengaruhi oleh laju penurunan inflasi yang masih berada di atas target, mendorong The Fed mempertahankan suku bunga *Fed Funds Rate* (FFR) tinggi dalam jangka waktu lama (*high for longer*) hingga Juni 2024 dan baru melakukan pemangkasan FFR pada FOMC September 2024. Selain itu, perlu diperhatikan juga faktor risiko seperti perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah dan Ukraina, disrupsi jalur perdagangan di Laut Merah, dan faktor perubahan iklim yang berpotensi memicu peningkatan harga komoditas dan inflasi ke depan. Kekhawatiran juga menyelimuti pasar seiring meningkatnya ketidakpastian kondisi politik AS menjelang pemilu presiden AS yang akan diselenggarakan pada November 2024. Di tengah perkembangan global tersebut, pada triwulan II-2024 ekonomi domestik tetap terjaga meskipun sedikit melandai, antara lain ditopang oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi meskipun pertumbuhan konsumsi, investasi, dan pengeluaran Pemerintah melambat dibandingkan triwulan II-2023.

Ekonomi domestik yang tetap kuat juga tercermin pada indikator perbankan di triwulan II-2024 sebagaimana terlihat pada pertumbuhan kredit (bank umum) yang masih cukup baik yaitu sebesar 12,36% (yoy), meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya (7,76%, yoy). Pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dari segmen korporasi yang baik sejalan dengan penjualan yang baik dan kemampuan bayar yang kuat. Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh yaitu sebesar 8,45% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya (5,79%, yoy) sehingga menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan. Hal ini tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 112,33% dan 25,37%, jauh di atas *threshold* masing-masing 50% dan 10%. Tingkat permodalan juga cukup solid dengan CAR sebesar 26,09% meskipun menurun dari tahun sebelumnya didorong oleh pertumbuhan ATMR yang tumbuh 9,91% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan kredit, dan melampaui pertumbuhan modal. Risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio NPL *gross* yang meningkat menjadi sebesar 2,26% dan NPL *net* sedikit meningkat menjadi 0,78%. Sejalan dengan kinerja bank umum, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik kendati pertumbuhan kredit/pembiayaan serta DPK relatif melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga masih cukup solid dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 31,75% dan 23,09%.

Ke depan, tetap perlu diperhatikan risiko perbankan utamanya risiko pasar dan risiko likuiditas di tengah masih tingginya ketidakpastian global seperti risiko ketidakpastian suku bunga, perkembangan ekonomi Tiongkok, serta kenaikan tensi geopolitik yang dapat berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi domestik. Adapun terkait kredit yang direstrukturisasi juga mengalami penurunan dengan jumlah yang relatif kecil yang berubah menjadi NPL. Hal ini sejalan dengan OJK yang senantiasa menghimbau perbankan untuk memperhatikan kualitas pelaksanaan restrukturisasi sekaligus terus mengkaji prospek pemulihan debitur. Namun demikian, bank diminta untuk tetap melakukan pengawasan dan *monitoring* yang ketat untuk mencegah timbulnya pemburukan kredit di masa depan. Selain itu, perbankan juga didorong untuk meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan menjaga *coverage* CKPN secara memadai. Dalam rangka mengukur ketahanan bank, OJK meminta agar bank secara rutin melakukan *stress test* dan asesmen terhadap kekuatan permodalannya untuk mengukur kemampuannya dalam menyerap potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.

OJK senantiasa berupaya memperkuat mitigasi risiko secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan diiringi dengan penguatan regulasi. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan ketentuan perbankan berupa satu POJK terkait dengan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Sementara itu, OJK juga terus aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

OJK terus mencermati perkembangan volatilitas ekonomi global dan dampaknya kepada ekonomi domestik serta perbankan Indonesia. Hal tersebut dilakukan seiring dengan pengawasan perbankan secara individual yang intensif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan Indonesia pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, OJK juga meminta bank-bank agar terus memperhatikan aspek kehati-hatian (*prudential banking*), profesionalisme, inovatif, dan selalu menjaga integritas untuk bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi dan sehat.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua niat baik yang kita upayakan bersama, termasuk melalui penyampaian laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Oktober 2024



**Dian Ediana Rae**  
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

# Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Box	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Ringkasan Eksekutif	ix
Infografis	xi

## Daftar Box

Boks 1. Interkoneksi Kebijakan Moneter The Fed dengan Stabilitas Makroekonomi dan Kondisi Perbankan Indonesia	11
---	----

## Bab 1

### Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

1. Perekonomian Global 3
2. Perekonomian Domestik 6

## Bab 2

### Kinerja Industri Perbankan Nasional

1. Kinerja Bank Umum 27
2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) 33
3. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) 34

## Bab 3

### Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

- A. Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS) 41
  1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi 41
  2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial) 44
  3. Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM 47
- B. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS 49
  1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi 49
  2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial) 50

---

## Bab 4

### Profil Risiko Perbankan

- |                      |    |
|----------------------|----|
| 1. Risiko Kredit     | 53 |
| 2. Risiko Pasar      | 60 |
| 3. Risiko Likuiditas | 63 |
| 4. Risiko Hukum      | 65 |

## Bab 5

### Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

- |                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. Pengaturan Perbankan  | 69 |
| 2. Kelembagaan Perbankan | 69 |

## Bab 6

### Koordinasi Antar Lembaga terkait Perbankan

- |  |    |
|--|----|
| 1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan | 77 |
| 2. Koordinasi Bilateral  | 79 |
| 3. Partisipasi OJK dalam Fora Internasional                          | 80 |

### Lampiran

- |  |    |
|--|----|
| I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko | 87 |
| II. <i>Glossary</i>  | 89 |

# Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum Bank Umum	27
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum	28
Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan	28
Tabel 4 DPK Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank	30
Tabel 5 Penyebaran DPK Bank Umum berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar	30
Tabel 6 Komponen ATMR Bank Umum	32
Tabel 7 Rasio Keuangan Bank Umum	32
Tabel 8 Rasio Permodalan dan Rentabilitas Bank Umum	32
Tabel 9 Perkembangan Kinerja BPR dan BPRS	33
Tabel 10 Indikator Umum BPR	34
Tabel 11 Indikator Umum BPRS	36
Tabel 12 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi	43
Tabel 13 Porsi Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi (Spasial)	47
Tabel 14 Kredit/Pembiayaan UMKM berdasarkan Kelompok Bank	48
Tabel 15 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	49
Tabel 16 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)	50
Tabel 17 Perkembangan Kualitas Kredit	54
Tabel 18 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	55
Tabel 19 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan	55
Tabel 20 Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank	55
Tabel 21 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Juni 2024	60
Tabel 22 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori	63
Tabel 23 Perkembangan LCR Perbankan	64
Tabel 24 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan	65
Tabel 25 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	65
Tabel 26 Jaringan Kantor BUK	70
Tabel 27 Jaringan Kantor BPR	71
Tabel 28 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah	73
Tabel 29 Jaringan Kantor BPRS	74

# Daftar Grafik

Grafik 1 Inflasi Konsumen	3
Grafik 2 Suku Bunga Acuan	4
Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara	5
Grafik 4 PMI Manufaktur Beberapa Negara	5
Grafik 5 Perkembangan Harga Komoditas	6
Grafik 6 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran	7
Grafik 7 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor	9
Grafik 8 Neraca Perdagangan Indonesia	9
Grafik 9 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha	9
Grafik 10 Perkembangan Aset Bank Umum	28
Grafik 11 Tren Pertumbuhan DPK per Komponen	29
Grafik 12 Pergerakan DPK berdasarkan Valuta	29
Grafik 13 Kredit per Valuta	30
Grafik 14 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	31
Grafik 15 Perkembangan Aset BPR	34
Grafik 16 Perkembangan DPK BPR	34
Grafik 17 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan	35
Grafik 18 Tren Aset BPRS	30
Grafik 19 Tren Pertumbuhan DPK BPRS	36
Grafik 20 Tren ROA dan BOPO BPRS	37
Grafik 21 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi	44
Grafik 22 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi (Spasial)	46
Grafik 23 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM	48
Grafik 24 Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	53
Grafik 25 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit	53
Grafik 26 Pertumbuhan CKPN	54
Grafik 27 Tren Kredit Restrukturisasi	54
Grafik 28 Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi	57
Grafik 29 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi	58
Grafik 30 Tren Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)	60
Grafik 31 Dolar Index dan VIX Index	61
Grafik 32 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar	61
Grafik 33 <i>Spread Yield</i> UST dan SBN	62
Grafik 34 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia	62
Grafik 35 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan	62
Grafik 36 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (FVTPL dan FVTOCI) berdasarkan Tenor	62
Grafik 37 Perkembangan Parameter IRRBB	63
Grafik 38 LDR berdasarkan Valuta	64
Grafik 39 AL/NCD dan AL/DPK	64
Grafik 40 Perkembangan LCR dan NSFR	64
Grafik 41 Perkembangan Suku Bunga PUAB	65
Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BUK	71
Grafik 43 Penyebaran Jaringan Kantor BPR	71
Grafik 44 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	72
Grafik 45 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	72
Grafik 46 Penyebaran Jaringan Kantor BUS	73
Grafik 47 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS	74

# Ringkasan Eksekutif

Secara umum, pada triwulan II-2024, kondisi ekonomi global relatif stagnan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, serta pertumbuhan ekonomi negara-negara yang masih terdivergensi. Ekonomi AS, Eropa dan UK tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun ekonomi Tiongkok justru cenderung masih belum cukup kuat seiring lemahnya permintaan domestik dan berlanjutnya tekanan sektor properti. Sejalan dengan kondisi di beberapa negara yang masih cukup resilien, IMF dalam World Economic Outlook (WEO) Oktober 2024 memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tumbuh sebesar 3,2% (yoy), tidak berubah dari proyeksi sebelumnya pada Juli 2024 atau sedikit turun dari pertumbuhan pada 2023 sebesar 3,3% (yoy). Sedangkan, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 2025 turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,3% (yoy) menjadi 3,2% (yoy). Ketidakpastian pasar keuangan global pada awal tahun 2024 masih cukup tinggi, antara lain dipengaruhi oleh laju penurunan inflasi global yang masih tertahan khususnya inflasi di negara maju seperti AS yang masih berada di atas targetnya. Hal tersebut mendorong The Fed mempertahankan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) tinggi dalam jangka waktu lama (*high for longer*) hingga Juni 2024 dan baru melakukan pemangkasan FFR pada FOMC September 2024 sebesar 50bps menjadi 4,75%-5,00%. Selain itu, perlu diperhatikan juga faktor risiko seperti perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah dan Ukraina, disrupsi jalur perdagangan di Laut Merah, dan faktor perubahan iklim yang berpotensi memicu peningkatan harga komoditas dan inflasi ke depan. Kekhawatiran juga menyelimuti pasar seiring meningkatnya ketidakpastian kondisi politik AS menjelang pemilu presiden AS yang akan diselenggarakan pada November 2024. Di tengah perkembangan global tersebut, pada triwulan II-2024 ekonomi domestik tetap resilien dan mampu tumbuh sebesar 5,05% (yoy), kendati sedikit melandai dari 5,11% (yoy) pada triwulan I-2024. Pertumbuhan ekonomi domestik yang sedikit melandai namun tetap terjaga antara lain ditopang oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi meskipun pertumbuhan konsumsi, investasi, dan pengeluaran Pemerintah melambat dibandingkan triwulan-II tahun sebelumnya.

Ekonomi domestik yang tetap resilien juga terekam pada indikator perbankan di triwulan II-2024 sebagaimana terlihat pada pertumbuhan kredit (bank umum) yang masih cukup baik yaitu sebesar 12,36% (yoy) meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya (7,76%, yoy). Pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dari segmen korporasi yang baik sejalan dengan penjualan yang baik dan kemampuan bayar yang kuat. Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh yaitu sebesar 8,45% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya (5,79%, yoy) sehingga menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan. Hal ini tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 112,33% dan 25,37%, jauh di atas *threshold* masing-masing 50% dan 10%. Tingkat permodalan juga cukup solid dengan CAR sebesar 26,09% meskipun menurun dari tahun sebelumnya didorong oleh pertumbuhan ATMR yang tumbuh 9,91% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan kredit, dan melampaui pertumbuhan modal. Risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio NPL *gross* yang menurun menjadi sebesar 2,26% dan NPL *net* cukup stabil menjadi 0,78%. Sejalan dengan kinerja bank umum, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik kendati pertumbuhan kredit/pembiayaan serta DPK relatif melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga masih cukup solid dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 31,75% dan 23,09%.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko secara berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi. Dalam penguatan regulasi, pada periode laporan, OJK menerbitkan ketentuan perbankan berupa satu POJK terkait dengan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Halaman ini sengaja dikosongkan

# INFOGRAFIS

## Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

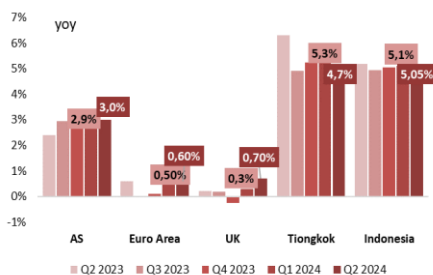
### Triwulan II 2024

#### Ekonomi Global

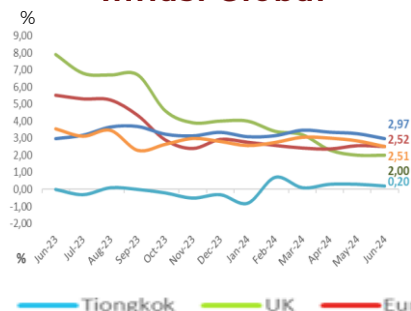


- Kondisi ekonomi global relatif stagnan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, serta pertumbuhan ekonomi negara-negara yang masih terdivergensi. Perekonomian AS, UK, dan Eropa tumbuh meningkat, sementara Tiongkok mengalami perlambatan seiring dengan lemahnya permintaan domestik dan berlanjutnya tekanan sektor properti. IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2024 memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tumbuh sebesar 3,2% (yoy).
- Ketidakpastian pasar keuangan global juga masih tinggi antara lain dipengaruhi oleh laju penurunan inflasi global yang masih tertahan khususnya inflasi di negara maju seperti AS yang masih berada di atas targetnya. Sebagai informasi, pada FOMC September 2024, The Fed akhirnya memutuskan memangkas suku bunga acuan sebesar 50bps menjadi 4,75%-5,00%.
- Faktor risiko lainnya yang perlu diperhatikan antara lain perkembangan konflik geopolitik di Timur tengah dan Ukraina, disrupsi jalur perdagangan di Laut Merah, faktor perubahan iklim yang berpotensi memicu peningkatan harga komoditas dan inflasi ke depan, serta kondisi politik AS menjelang pemilu presiden AS November 2024.

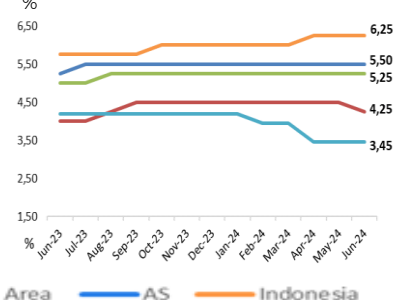
#### Pertumbuhan Ekonomi



#### Inflasi Global



#### Suku Bunga Global

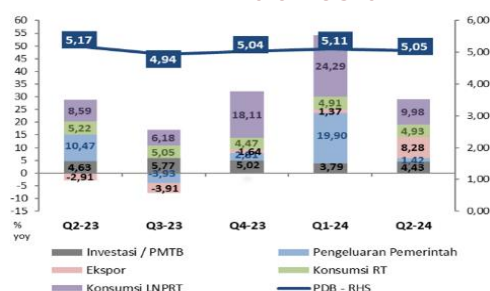


#### Ekonomi Domestik

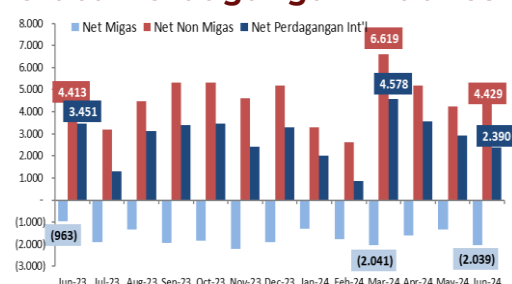
- Ekonomi Indonesia tetap resilien dan mampu tumbuh sebesar 5,05% (yoy) pada triwulan II-2024, meskipun melambat dari 5,17% (yoy) pada triwulan II-2023 dan 5,11% (yoy) pada triwulan I-2024. Terjaganya pertumbuhan ekonomi domestik ditopang oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi meskipun pertumbuhan konsumsi, investasi, dan pengeluaran Pemerintah melambat.
- Berdasarkan lapangan usaha, melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2024 dipicu oleh perlambatan pada sektor transportasi dan pergudangan, pertambangan, dan industri pengolahan. Kendati demikian, beberapa sektor tetap mampu tumbuh positif di antaranya jasa keuangan, *real estate*, dan pertanian.



#### PDB Indonesia



#### Neraca Perdagangan Indonesia



# INFOGRAFIS

## Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

Triwulan II 2024

### KINERJA



Bank Umum



Bank Umum Konvensional



Bank Umum Syariah



**Aset**

7,21% (yoy)

**9,01% (yoy)**

**Rp12.048 T**



**DPK**

5,79% (yoy)

**8,45% (yoy)**

**Rp8.722 T**



**Kredit**

7,76% (yoy)

**12,36% (yoy)**

**Rp7.478 T**



**CAR**

27,16%

**26,09%**

**26,09%**



**ROA**

2,73%

**2,66%**

TW II-23

TW II-24

6,72% (yoy)

**8,85% (yoy)**

**Rp11.441 T**

5,51% (yoy)

**8,24% (yoy)**

**Rp8.247 T**

7,08% (yoy)

**12,29% (yoy)**

**Rp7.089 T**

27,24%

**26,13%**

**26,13%**

2,76%

**2,69%**

17,88% (yoy)

**12,16% (yoy)**

**Rp607 T**

10,92% (yoy)

**12,36% (yoy)**

**Rp475 T**

21,87% (yoy)

**13,55% (yoy)**

**Rp390 T**

25,35%

**25,29%**

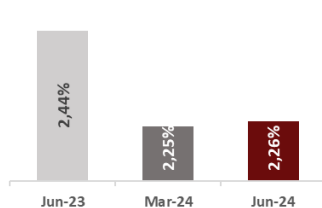
**25,29%**

2,08%

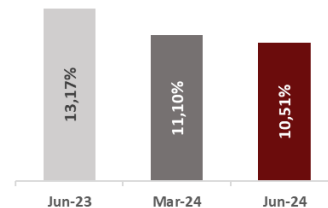
**2,06%**

### Risiko Kredit

#### NPL Gross

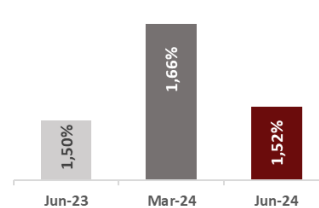


#### LaR



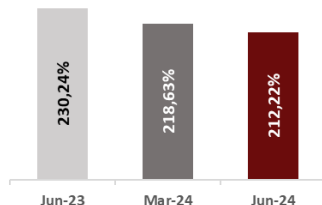
### Risiko Pasar

#### PDN

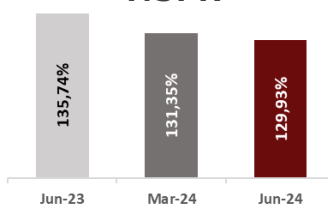


### Risiko Likuiditas

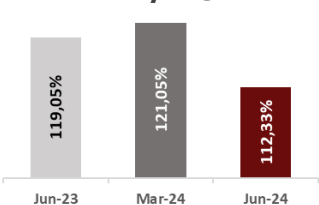
#### LCR



#### NSFR



#### AL/NCD










**PROFIL  
RISIKO  
BANK  
UMUM**

# INFOGRAFIS

## Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

Triwulan II 2024

KINERJA						
	Aset	DPK	Kredit	CAR	ROA	
 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	7,89% (yoy)	8,30% (yoy)	9,97% (yoy)	31,76%	1,54%	TW II-23
	<b>5,73% (yoy)</b> <b>Rp196 T</b>	<b>6,68% (yoy)</b> <b>Rp139 T</b>	<b>6,52% (yoy)</b> <b>Rp145 T</b>	<b>31,75%</b>	<b>1,09%</b>	<b>TW II-24</b>
 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)	17,71% (yoy)	16,48% (yoy)	21,73% (yoy)	23,86%	2,10%	
	<b>10,38% (yoy)</b> <b>Rp23 T</b>	<b>10,14% (yoy)</b> <b>Rp15 T</b>	<b>12,75% (yoy)</b> <b>Rp18 T</b>	<b>23,09%</b>	<b>1,54%</b>	

## KETENTUAN PERBANKAN PADA TRIWULAN II 2024

KETENTUAN	PERIHAL	TANGGAL PENETAPAN	OBJEK PENGATURAN
POJK Nomor 7 Tahun 2024	tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	30 April 2024	BPR dan BPRS

Halaman ini sengaja dikosongkan

# 1 Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

Halaman ini sengaja dikosongkan

# 1 Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

**Pada triwulan II-2024, kondisi ekonomi global relatif stagnan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi domestik sedikit melandai namun tetap terjaga antara lain ditopang oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan triwulan-II tahun sebelumnya.**

## 1. Perekonomian Global

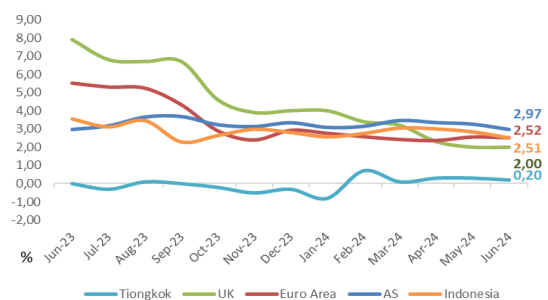
Pada triwulan II-2024, kondisi perekonomian global relatif stagnan dan penuh ketidakpastian. Kondisi ekonomi global masih dibayangi oleh tensi geopolitik yang terus meningkat utamanya konflik di Timur Tengah dan konflik Rusia-Ukraina. Selain itu, ketidakpastian pasar keuangan global juga masih tinggi antara lain dipengaruhi oleh laju penurunan inflasi global yang masih tertahan khususnya inflasi di negara maju seperti AS yang masih berada di atas targetnya. Hal tersebut mendorong The Fed masih mempertahankan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) tinggi dalam jangka waktu lama (*high for longer*) hingga Juni 2024, namun pada periode laporan ECB memangkas suku bunga acuannya sehingga memicu optimisme pasar terhadap pemangkasan FFR pada tahun 2024. Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global yang terjadi, kekhawatiran juga menyelimuti pasar seiring meningkatnya ketidakpastian kondisi politik AS menjelang pemilu presiden AS yang akan diselenggarakan pada November 2024.

Pada Juni 2024, The Fed mempertahankan FFR pada 5,25%-5,50% untuk pertemuan ketujuh berturut-turut pada pertemuan

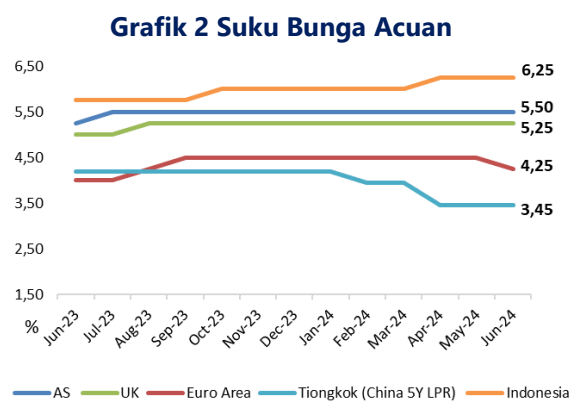
FOMC Juni 2024 atau sejalan dengan perkiraan pasar. The Fed dalam *The Federal Open Market Committee* (FOMC) Juni 2024, tidak melakukan revisi terhadap proyeksi Pertumbuhan ekonomi AS sebelumnya pada Maret yaitu untuk tahun 2024 sebesar 2,1%, pada tahun 2025 dan 2026 masing-masing sebesar 2%.

Sebagai informasi, pada FOMC September 2024, The Fed memutuskan memangkas suku bunga acuan sebesar 50bps menjadi 4,75%-5,00% atau merupakan penurunan suku bunga pertama sejak Maret 2020. The Fed memperkirakan total pemangkasan suku bunga 100 bps pada akhir tahun 2024, yang berarti bahwa terdapat dua pemotongan 25 bps lagi pada tahun ini. Untuk tahun 2025, diharapkan pemotongan tambahan 1%, diikuti oleh pemotongan terakhir 50bps pada tahun 2026.

**Grafik 1 Inflasi Konsumen**



Sumber: Reuters



Sumber: Reuters

Sejalan dengan The Fed, BoE juga memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada 5,25%. Adapun beberapa pengambil kebijakan mencatat bahwa keputusan untuk tidak melakukan pemotongan adalah keputusan yang "sangat seimbang". Indikator ekonomi Inggris terkini menunjukkan inflasi telah kembali ke target 2%, didorong oleh moderatnya ekspektasi inflasi dan penurunan harga energi dari tahun sebelumnya. Adapun sektor jasa menjadi sektor yang mendorong tingginya inflasi di UK.

Demikian halnya dengan PBoC yang juga mempertahankan suku bunga acuan 1 Y MLF pada 2,50%, kemudian mempertahankan LPR 1Y pada 3,45% dan 5Y pada 3,95%. Gubernur PBoC, Pan Gongsheng mengatakan pada sebuah forum di Shanghai bahwa Tiongkok akan secara fleksibel menggunakan berbagai alat kebijakan, termasuk suku bunga dan RRR, dan bahwa Beijing akan mencegah yuan melampaui batas.

Berbeda halnya dengan European Central Bank (ECB) yang memutuskan memangkas suku bunga acuan (*main refinancing operation*) sebesar 25bps menjadi 4,25%

dari sebelumnya 4,5%, *Deposit Facility Rate* menjadi 3,75% dari 4,00%, *Marginal Lending Rate* menjadi 4,5% dari 4,75%. ECB meyakini bahwa inflasi sudah berada di jalur yang tepat untuk kembali menuju target 2%, meskipun akan mengalami beberapa hambatan.

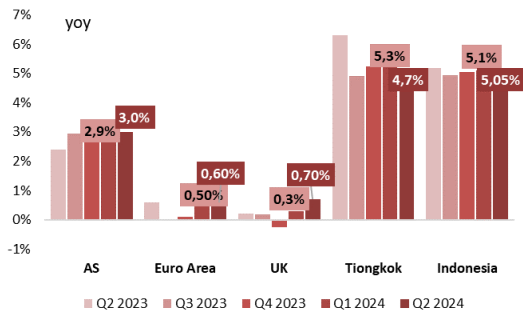
Seiring kondisi di beberapa negara yang masih cukup resilien, utamanya di AS dan negara *emerging markets*, IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2024 memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tumbuh sebesar 3,2% (yoy), tidak berubah dari proyeksi sebelumnya pada Juli 2024 atau sedikit turun dari pertumbuhan pada 2023 sebesar 3,3% (yoy). Sedangkan untuk perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 2025 turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,3% (yoy) menjadi 3,2% (yoy). Selain itu, inflasi global juga diperkirakan melandai dari tahun 2023 sebesar 6,7% menjadi 5,8% pada 2024 dan 4,3% pada 2025.

Pada triwulan laporan, pertumbuhan ekonomi negara-negara masih terdivergensi. Pada triwulan II-2024, pertumbuhan ekonomi AS tetap baik didorong permintaan domestik, namun ekonomi Tiongkok justru cenderung masih belum cukup kuat seiring lemahnya permintaan domestik dan berlanjutnya tekanan sektor properti.

Ekonomi AS tumbuh 3,0% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya 2,9% (yoy). Adapun secara triwulanan juga tumbuh 3,0% (qtq) naik dari 1,6% (qtq) pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, PMI Manufaktur AS justru menurun dari bulan sebelumnya dan berada pada level kontraksi yaitu sebesar 48,5 sebagai akibat

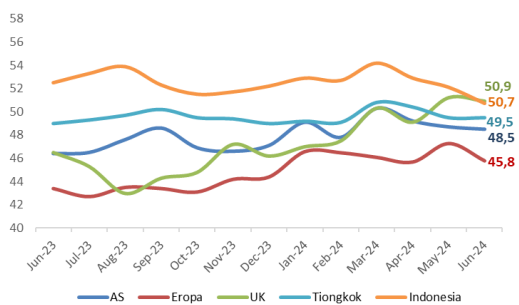
dari permintaan yang kembali melemah dan output menurun. Angka PMI tersebut menunjukkan aktivitas manufaktur yang menurun selama tiga bulan berturut-turut dan terendah sejak Februari 2024.

**Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara**



Sumber: *Trading Economics* dan *Reuters*

**Grafik 4 PMI Manufaktur Beberapa Negara**



Sumber: *Reuters*

Ekonomi Tiongkok justru menunjukkan pelemahan yaitu tumbuh 4,7% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,3% (yoy) atau di bawah perkiraan pasar sebesar 5,1% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Tiongkok tersebut menunjukkan pertumbuhan terlemah sejak triwulan I-2023 di tengah penurunan properti yang terus-menerus, permintaan domestik yang lemah, mata uang yuan yang jatuh dan ketegangan perdagangan dengan Barat. Pada periode laporan, penjualan ritel juga menunjukkan pelemahan sejalan dengan keyakinan konsumen yang masih pesimis dan permintaan yang lemah. Perlu

diperhatikan tantangan seperti turunnya investasi pada sektor properti, risiko hutang, dan lemahnya konsumsi, terlebih dengan isu *ageing population*, yang dapat menghambat pertumbuhan Tiongkok ke depan.

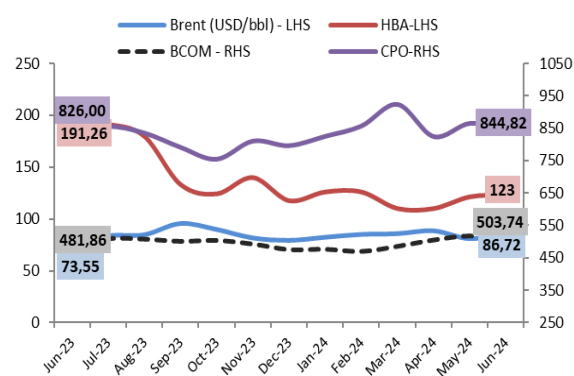
Sejalan dengan AS, ekonomi Eropa yang merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia, juga menunjukkan peningkatan, yaitu pada triwulan II-2024 tumbuh 0,6% (yoy) naik dari 0,5% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama PDB dan mencakup 54% dari total penggunaannya, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto (21%) dan pengeluaran pemerintah (20%). Ekspor barang dan jasa mencakup 47% dari PDB sementara impor mencakup 43%, yang menambahkan 4% dari total PDB. Peningkatan PDB Eropa pada periode laporan, didorong oleh belanja pemerintah yang mencatat peningkatan terbesar (2,1%) sementara konsumsi rumah tangga naik 0,5% serta ekspor yang naik 1,7%. Tingkat inflasi di Eropa terus melanjutkan perlambatan namun belum di bawah target ECB sebesar 2%. Perlambatan harga utamanya didorong oleh harga energi serta makanan, alkohol, dan tembakau, meskipun masih terdapat tantangan akan kenaikan harga energi sebagai akibat dari konflik geopolitik yang belum berakhir. Selain itu, tekanan dari biaya transportasi perdagangan (*shipping cost*) karena adanya disrupsi di Laut Merah dapat menjadi potensi meningkatnya tekanan inflasi di Eropa. Adapun kinerja manufaktur Eropa belum sepenuhnya pulih sebagaimana ditunjukkan oleh PMI manufaktur Eropa yang masih pada level kontraksi.

Lebih lanjut, ekonomi UK juga mengalami peningkatan pada triwulan II-2024 yaitu sebesar 0,7% (yoy), meningkat dari 0,3% (yoy) pada triwulan sebelumnya atau menjadi tingkat pertumbuhan tertinggi sejak triwulan III-2022. Peningkatan didorong oleh naiknya sektor jasa. Adapun dari sisi pengeluaran, komponen impor mengalami *rebound* dari triwulan sebelumnya.

Harga komoditas global pada triwulan II-2024 relatif fluktuatif karena tidak hanya dipengaruhi permintaan dan penawaran, melainkan juga faktor geopolitik dan perubahan iklim. Keterbatasan pasokan komoditas tidak terlepas dari ketidakstabilan politik di negara penghasil minyak serta pembatasan suplai oleh negara produsen di tengah peningkatan permintaan global. Hal tersebut juga turut menjadi faktor masih tingginya harga komoditas global sehingga tingkat inflasi global juga tinggi. Pergerakan harga komoditas global pada pertengahan tahun 2024 menunjukkan peningkatan sebagaimana ditunjukkan oleh indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) pada Juni 2024 tercatat sebesar 503,74 naik dari 481,86 pada Juni 2023. Peningkatan tecermin pada naiknya harga Minyak Brent dan *Crude Palm Oil* (CPO) pada triwulan II-2024. Sedangkan harga batubara menurun dari periode yang sama pada tahun sebelumnya namun meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan harga tersebut umumnya dipengaruhi oleh masih tingginya tensi geopolitik di Timur Tengah sehingga menimbulkan kekhawatiran akan penurunan pasokan utamanya minyak. Adapun peningkatan harga CPO

dipengaruhi oleh peningkatan harga minyak mentah dunia dan minyak kedelai. Selain itu, peningkatan terjadi karena permintaan yang naik terutama dari India dan Tiongkok namun tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Pada komoditas batubara, peningkatan harga dipicu oleh peningkatan permintaan India seiring rencana untuk menambah lebih banyak kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara untuk mengatasi lonjakan permintaan listrik.

**Grafik 5 Perkembangan Harga Komoditas**



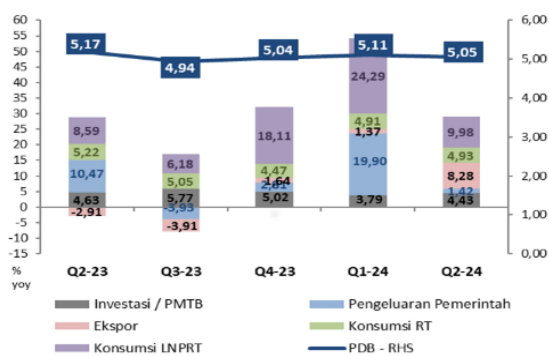
Sumber: Reuters

## 2. Perekonomian Domestik

Dari sisi domestik, fundamental ekonomi Indonesia tetap resilien dan mampu tumbuh sebesar 5,05% (yoy) pada triwulan II-2024, meskipun melambat dari 5,17% (yoy) pada triwulan II-2023 dan 5,11% (yoy) pada triwulan I-2024. Pertumbuhan ekonomi domestik yang sedikit melandai namun tetap terjaga antara lain ditopang oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi meskipun pertumbuhan konsumsi, investasi, dan pengeluaran Pemerintah melambat dibandingkan triwulan-II tahun sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana tecermin pada data PDB menurut penggunaan yang menunjukkan bahwa

komponen ekspor barang dan jasa tumbuh 8,28% (yoy) lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar -2,91% (yoy). Sejalan dengan itu, kontribusi utama ekspor barang dan jasa terhadap PDB triwulan II-2024 tercatat 22,77% (yoy) meningkat dari 22,09% (yoy) pada triwulan yang sama tahun lalu.

**Grafik 6 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran**



Sumber: BPS

Pada triwulan II-2024, pengeluaran konsumsi tumbuh 5,05% (yoy) melambat dibandingkan triwulan I-2024 dan triwulan II-2023 yang masing-masing tercatat sebesar 5,33% (yoy) dan 5,30% (yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan porsi terbesar (52,98%) yang tumbuh melambat sebesar 4,93% (yoy) dibandingkan triwulan II-2023 sebesar 5,22% (yoy). Adapun pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencatatkan penurunan terbesar utamanya pada: pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya; kesehatan dan pendidikan; serta transportasi dan komunikasi. Di sisi lain, pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) dengan porsi 1,31% tumbuh 9,98% (yoy) lebih tinggi dari 8,59% (yoy) pada

triwulan II-2023. Secara umum, pertumbuhan konsumsi domestik yang melambat ditengarai merupakan implikasi dari berakhirnya efek stimulus dari periode Pemilihan Umum (Pemilu) dan Ramadhan serta diikuti oleh kondisi pasar tenaga kerja yang belum pulih sepenuhnya. Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) per Juni 2024, tercatat sebesar 123,3 atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 127,1. Pelemahan IKK dipengaruhi oleh menurunnya keyakinan konsumen terhadap kondisi saat ini dan ekspektasi konsumen dalam enam bulan ke depan yaitu dari 116,8 dan 137,5 pada triwulan II-2023 menjadi 112,9 dan 133,8 pada triwulan II-2024.

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 4,43% (yoy) pada triwulan II-2024 melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,63% (yoy). Pertumbuhan investasi yang melambat dipengaruhi oleh investasi non bangunan seperti kendaraan, mesin dan perlengkapan, serta sumber daya hayati atau *Cultivated Biological Resources* (CBR). Sementara itu, pertumbuhan investasi bangunan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2023 yaitu menjadi 5,31% (yoy) dari 3,32% (yoy). Hal ini sejalan dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur Pemerintah di berbagai wilayah, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

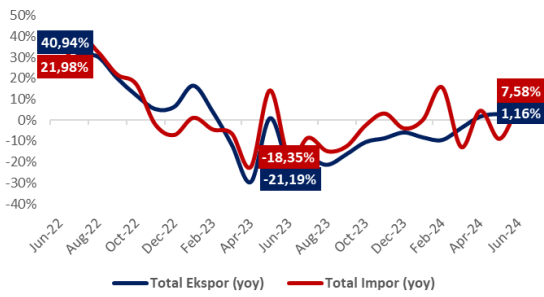
Pengeluaran pemerintah mencatatkan perlambatan pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 1,42% (yoy) dari triwulan II-2023 maupun triwulan I-2024 masing-masing sebesar 10,47% (yoy) dan 19,90% (yoy). Hal

tersebut ditengarai sejalan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai triwulan II-2024 yang mengalami defisit Rp77,3 triliun atau setara dengan 0,34% terhadap Produk Domestik Bruto.

Di sisi lain, kontribusi perdagangan internasional melalui ekspor terhadap PDB pada triwulan II-2024 yang meningkat dibandingkan tahun lalu diperkirakan terjadi karena permintaan global yang relatif masih kuat terhadap komoditas andalan Indonesia. Hal tersebut tecermin pada nilai ekspor pada Juni 2024 yang tumbuh positif sebesar 1,16% (yoy) dari yang sebelumnya terkontraksi -21,19% (yoy) pada Juni 2023. Perkembangan nilai ekspor tersebut dipengaruhi oleh transaksi nonmigas yang tumbuh 1,38% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya -21,34% (yoy). Peningkatan nilai ekspor nonmigas utamanya didorong oleh komoditas produk manufaktur lainnya (porsi: 19,09%), nikel (porsi: 3,30%), dan peralatan listrik (porsi: 3,48%) yang masing-masing tumbuh 3,24% (yoy), 56,93% (yoy), dan 7,31% (yoy). Sementara itu, transaksi migas masih terkontraksi -2,26% (yoy) meskipun sudah membaik dari triwulan II-2023 sebesar -18,82% (yoy). Penurunan nilai ekspor migas utamanya dipengaruhi oleh komoditas hasil minyak (porsi: 0,80%) yang terkontraksi semakin dalam hingga -60,53% (yoy) dari -4,16% (yoy) pada Juni 2023. Sebaliknya, komoditas minyak mentah (porsi: 1,06%) dan gas alam (porsi: 4,05%) yang masing-masing tumbuh positif sebesar 21,58% (yoy) dan 28,90% (yoy) dari Juni 2023 yang terkontraksi -31,46% (yoy) dan -22,37% (yoy).

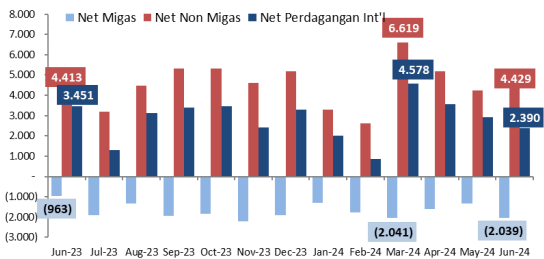
Sejalan dengan perkembangan tersebut, kinerja impor tumbuh sebesar 8,57% (yoy) pada triwulan II-2024 dari yang sebelumnya terkontraksi pada -3,23% (yoy). Hal tersebut tecermin pada nilai impor pada Juni 2024 yang tumbuh 7,58% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu sebesar -18,35% (yoy). Perkembangan nilai impor tersebut didorong oleh transaksi migas dan nonmigas yang masing-masing tumbuh 47,17% (yoy) dan 1,69% (yoy) dari Juni 2023 sebesar -39,50% (yoy) dan -13,86% (yoy). Peningkatan nilai impor migas didorong oleh komoditas minyak mentah (porsi: 6,10%) dan hasil minyak (porsi: 11,62%) yang masing-masing tumbuh sebesar 67,48% (yoy) dan 38,35% (yoy) dari -33,35% (yoy) dan -41,97% (yoy). Sementara itu, peningkatan nilai impor nonmigas antara lain didorong oleh beberapa komoditas antara lain: produk manufaktur lainnya (porsi: 18,98%); peralatan listrik (porsi: 5,67%); serta damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku (porsi: 3,53%). Pada Juni 2024, komoditas produk manufaktur lainnya tumbuh 2,13% (yoy) dari -22,44% (yoy). Demikian halnya dengan komoditas peralatan listrik serta damar buatan dan bahan baku yang masing-masing tumbuh sebesar 6,03% (yoy) dan 10,10% (yoy) dari yang sebelumnya terkontraksi -20,97% (yoy) dan -27,71% (yoy). Meskipun demikian, neraca perdagangan masih melanjutkan surplus selama 50 bulan berturut-turut yakni sebesar USD2,39 miliar pada Juni 2024 atau secara kumulatif mencapai USD16,32 miliar pada periode Januari s.d. Juni 2024.

**Grafik 7 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor**



Sumber: BPS

**Grafik 8 Neraca Perdagangan Indonesia**

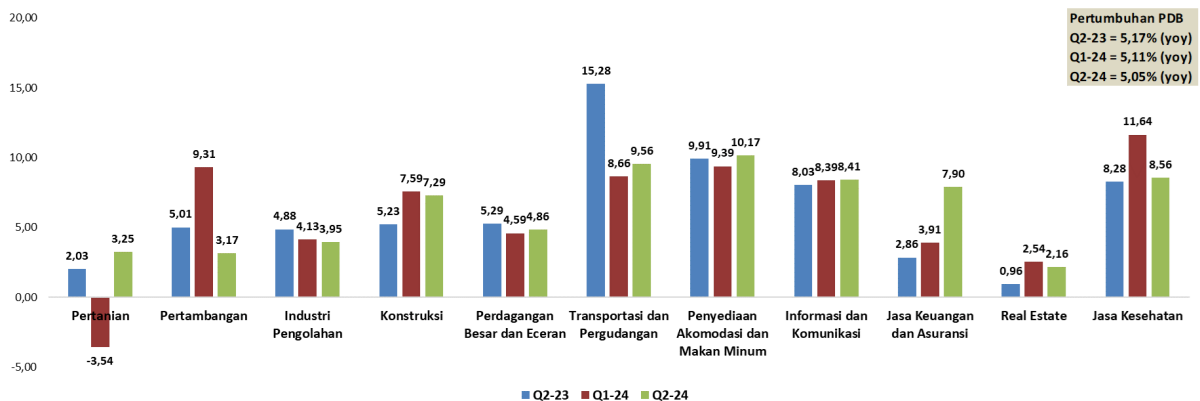


Sumber: BPS

Dilihat berdasarkan lapangan usaha, penyumbang terbesar dari melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2024 adalah sektor transportasi dan pergudangan (porsi: 4,70%) dari

15,28% (yoy) menjadi 9,56% (yoy). Kemudian diikuti oleh sektor pertambangan (porsi: 7,09%) dan industri pengolahan (porsi: 19,82%) yang masing-masing tumbuh melambat dari 5,01% (yoy) dan 4,88% (yoy) menjadi 3,17% dan 3,95% (yoy). Selain itu, sektor perdagangan besar juga terpantau tumbuh melambat dari 5,29% (yoy) menjadi 4,86% (yoy). Meskipun demikian, terdapat beberapa sektor yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2023, antara lain: jasa keuangan dan asuransi (porsi: 4,09%); konstruksi (porsi: 9,34%); pertanian (porsi: 12,50%); dan *real estate* (porsi: 2,70%). Sektor jasa keuangan dan asuransi serta konstruksi masing-masing tumbuh dari 2,86% (yoy) dan 5,23% (yoy) menjadi 7,90% (yoy) dan 7,29% (yoy). Seiring dengan hal tersebut, sektor pertanian dan *real estate* masing-masing tumbuh dari 2,03% (yoy) dan 0,96% (yoy) menjadi 3,25% (yoy) dan 2,16% (yoy).

**Grafik 9 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha**



Sumber: BPS

Halaman ini sengaja dikosongkan

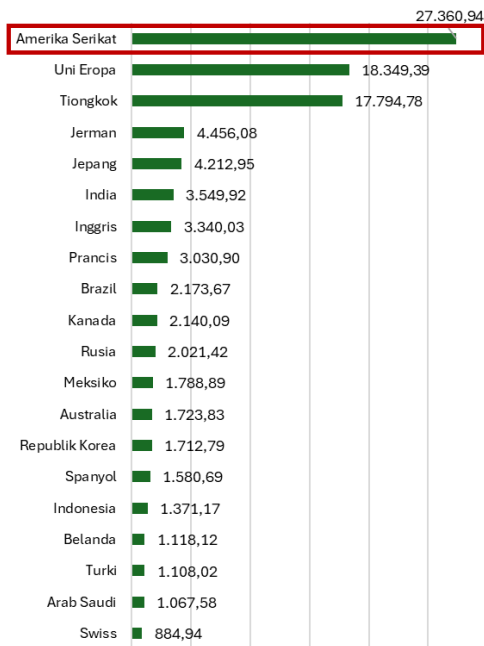
# Boks 1.

## Interkoneksi Kebijakan Moneter The Fed dengan Stabilitas Makroekonomi dan Kondisi Perbankan Indonesia

Amerika Serikat adalah primadona di panggung ekonomi dunia serta memiliki pengaruh dominan dalam perdagangan internasional dan sistem keuangan global....

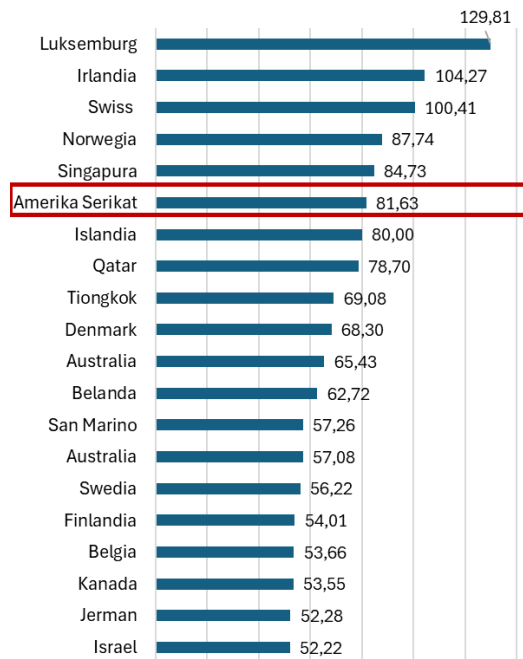
Amerika Serikat merupakan salah satu negara maju yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, terdepan dalam hal inovasi dan teknologi, serta menganut sistem ekonomi kapitalis yang dinamis. Keterlibatan Amerika Serikat dalam berbagai organisasi internasional dan kerjasama global semakin memperkuat posisinya dalam tatanan ekonomi maupun politik dunia. Dari aspek ekonomi, dominasi Amerika Serikat di panggung global dapat dilihat antara lain dari kemampuannya dalam menghasilkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi, menyediakan pasar domestik yang potensial dan menjadi magnet bagi bisnis dari seluruh dunia, serta menarik minat investor untuk berinvestasi di pasar saham maupun surat berharga.

**Grafik 1 – 20 Negara dengan Ekonomi Terbesar Global Tahun 2023 (Nominal PDB, USD miliar)**



Sumber: World Bank, diolah

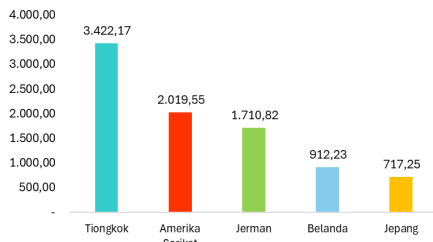
**Grafik 2 – Negara dengan PDB Per Kapita Terbesar di Dunia Tahun 2023 (ribu USD)**



Sumber: Statista, diolah

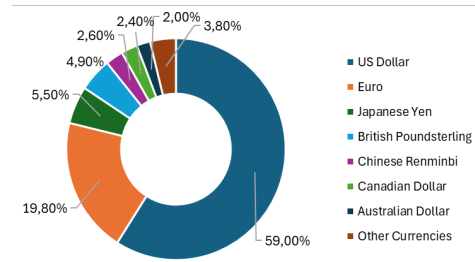
Selama beberapa dekade, Amerika Serikat menempati urutan pertama dari 20 negara dengan ekonomi terbesar global berdasarkan capaian nominal PDB pada tahun 2023 (Grafik 1). Dilihat dari PDB perkapita, Amerika Serikat menempati urutan ke-5 dari 20 negara dengan PDB perkapita terbesar di dunia (Grafik 2). Hal tersebut salah satunya dikarenakan Dollar Amerika Serikat (USD) merupakan mata uang yang paling banyak digunakan dalam transaksi internasional sehingga berpengaruh besar terhadap ekonomi global dan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam pasar perdagangan internasional (Grafik 3). Status USD sebagai mata uang cadangan utama (Grafik 4) yang paling banyak dipegang oleh Bank Sentral di dunia juga membuat daya tarik aset berdenominasi mata uang tersebut menjadi pilihan utama investor.

**Grafik 3 – Negara Eksportir Terbesar di Dunia Tahun 2023 (USD Miliar)**



Sumber: International Monetary Fund (IMF)

**Grafik 4 – Mata Uang Cadangan Utama Dunia Tahun 2023**



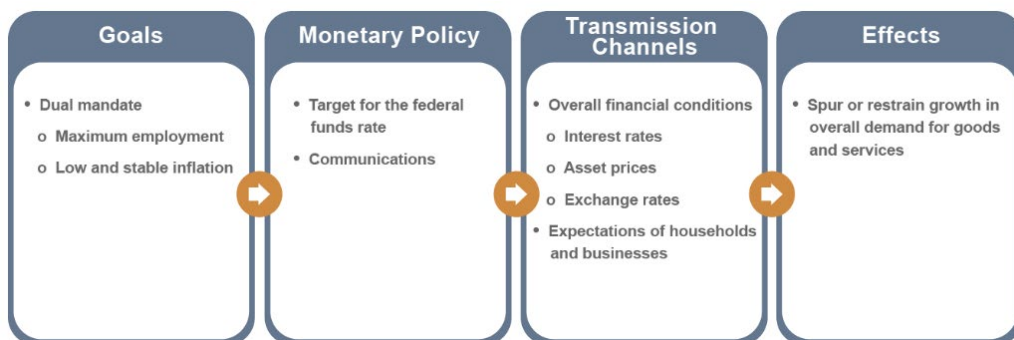
Sumber: Council on Foreign Relation (CFR)

**The Fed ibarat konduktor orkestra ekonomi Amerika Serikat dengan berbagai instrumen kebijakan moneternya....**

Kekuatan negeri Paman Sam sebagai pusat perekonomian dunia didukung oleh peranan Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Federal Reserve atau lebih dikenal dengan sebutan The Fed. The Fed selaku Otoritas kebijakan moneter di Amerika Serikat memiliki andil besar dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan baik di dalam negeri maupun internasional. The Fed memiliki tiga instrumen utama dalam mengelola jumlah uang beredar dan memengaruhi aktivitas ekonomi, antara lain Giro Wajib Minimum (GWM), penetapan suku bunga, dan operasi pasar terbuka. Ketiga instrumen ini saling terkait dan sering digunakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kebijakan moneter.

Implementasi kebijakan moneter berupa penyesuaian suku bunga jangka pendek seringkali menjadi pilihan The Fed dan juga bank-bank sentral di seluruh dunia sebagai respons terhadap kondisi ekonomi terkini. Penyesuaian suku bunga dimaksud bertujuan untuk memperlambat atau memacu aktivitas ekonomi serta mengendalikan laju inflasi. Di Amerika Serikat, penetapan suku bunga The Fed atau yang biasa dikenal dengan Fed Fund Rate (FFR) dibuat pada rapat-rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang diadakan delapan kali setahun. Proses FOMC dalam memutuskan penyesuaian FFR dirangkum dalam Gambar 1. Keputusan FOMC dalam penyesuaian FFR merupakan proses yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, terkait kondisi ekonomi baik di Amerika Serikat maupun global.

**Gambar 1 – Transmisi Kebijakan Moneter The Fed**



Sumber: Federal Reserve

<sup>1</sup> The Fed adalah gabungan dari Bank Sentral di negara bagian Amerika Serikat yang terdiri dari tiga entitas utama yaitu gabungan dari 12 Bank Sentral regional bernama Federal Reserve Banks, Dewan Gubernur, dan Federal Open Meeting Committee (FOMC).

### **Bank Sentral di berbagai negara senantiasa mencermati arah pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan tingkat pengangguran dalam menggunakan instrumen kebijakan suku bunga....**

Secara umum, keputusan Bank Sentral suatu negara dalam menentukan suku bunga acuan dapat dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran di negara tersebut. Pada kondisi ceteris paribus, hubungan antara ketiga faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Pertumbuhan ekonomi**

##### **a. Tinggi**

Pertumbuhan ekonomi secara pesat akan mendorong kenaikan permintaan barang dan jasa yang selanjutnya dapat meningkatkan laju inflasi. Bank sentral umumnya akan menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan laju inflasi yang terlalu tinggi. Kenaikan suku bunga acuan akan meningkatkan biaya pinjaman sehingga mengurangi permintaan masyarakat terhadap kredit.

##### **b. Rendah/resesi**

Bank sentral cenderung akan menurunkan suku bunga acuan apabila pertumbuhan ekonomi melambat atau bahkan terjadi resesi. Penurunan suku bunga acuan ini bertujuan agar biaya pinjaman menjadi lebih murah, sehingga masyarakat terdorong untuk meningkatkan konsumsi dan investasi yang pada gilirannya akan menstimulus pertumbuhan ekonomi.

#### **2. Inflasi**

##### **a. Tinggi**

Laju inflasi yang terlampaui tinggi melebihi kisaran target dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Bank Sentral umumnya akan merespon hal tersebut dengan menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan laju inflasi. Kenaikan suku bunga akan mengurangi daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan inflasi.

##### **b. Rendah/deflasi**

Bank Sentral cenderung akan menurunkan suku bunga acuan apabila tingkat inflasi terlalu rendah bahkan terjadi deflasi. Penurunan suku bunga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih banyak berbelanja dan berinvestasi, sehingga dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong inflasi.

#### **3. Tingkat Pengangguran**

##### **a. Tinggi**

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi sedang melemah dan dikhawatirkan akan meningkatkan risiko deflasi (penurunan harga secara umum). Dalam kondisi ini, Bank Sentral cenderung akan menurunkan suku bunga acuan untuk menstimulus peningkatan aktivitas ekonomi.

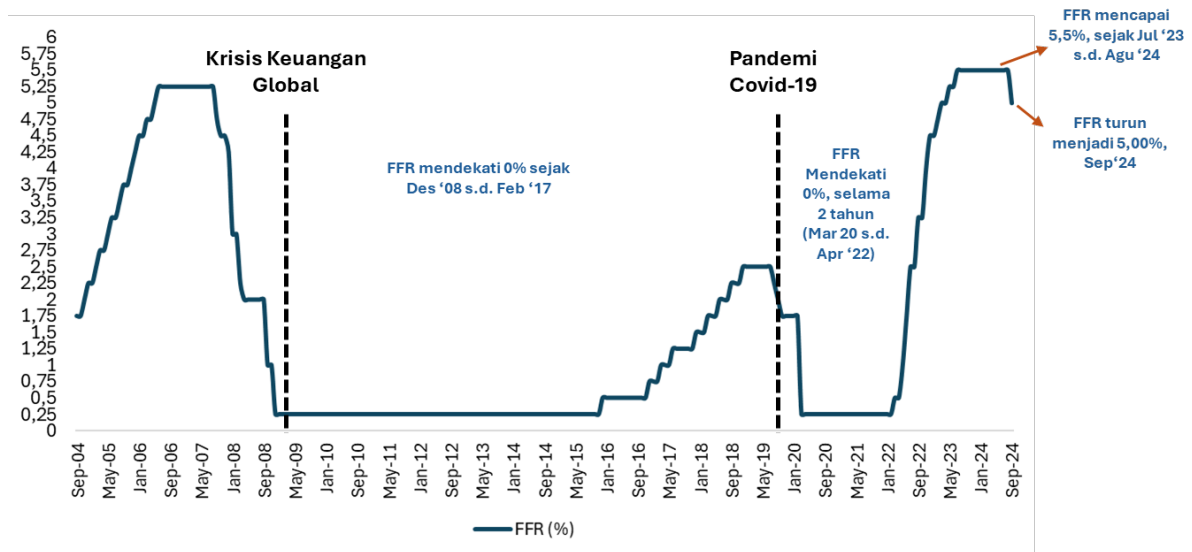
##### **b. Rendah**

Tingkat pengangguran yang rendah dapat mengindikasikan bahwa ekonomi sedang tumbuh kuat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dapat memicu "overheating" di mana permintaan melebihi kapasitas produksi sehingga mendorong terjadinya lonjakan inflasi. Untuk mengantisipasi hal itu, Bank Sentral cenderung akan menaikkan suku bunga.

### **Krisis Keuangan Global dan Pandemi Covid-19 mendorong The Fed ambil langkah berani dalam mengatur suku bunga untuk mengendalikan gejala ekonomi yang terjadi....**

Seiring perkembangan ekonomi global dan Amerika Serikat yang cukup dinamis, FFR telah mengalami fluktuasi yang relatif signifikan dengan perubahan suku bunga bervariasi dari waktu ke waktu. Data historis menunjukkan bahwa selama dua dekade terakhir telah terjadi perubahan FFR yang cukup drastis sebagai upaya untuk mengendalikan gejala ekonomi yang terjadi (Grafik 5 dan Grafik 6). Pada September 2004, FFR tercatat sebesar 1,75% kemudian naik secara bertahap hingga 5,25% sampai dengan Agustus 2007. FFR sebesar 5,25% berlaku selama lebih dari setahun sampai The Fed menurunkan suku bunga sebesar 50bps yaitu menjadi 4,75% pada September 2007. Penurunan suku bunga tersebut terus berlanjut secara gradual sampai dengan 0,25% pada Desember 2008.

Grafik 5 – Perkembangan FFR selama Dua Dekade Terakhir



Sumber: Reuters, diolah

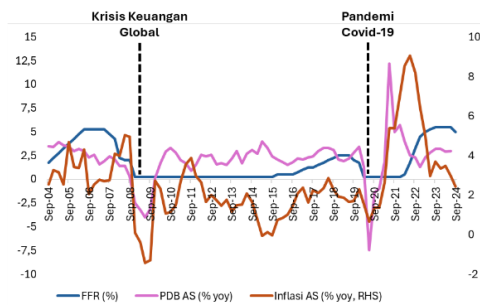
The Fed persisten mempertahankan FFR pada kisaran 0,25%-0,75% sejak Desember 2008 sampai dengan Februari 2017 sebagai respon terhadap Krisis Keuangan Global dan perkembangan ekonomi global setelahnya. Pelonggaran kebijakan moneter dengan mempertahankan FFR pada level yang sangat rendah selama hampir satu dekade tersebut merupakan yang pertama kalinya terjadi dalam sejarah The Fed. Kebijakan ini bertujuan untuk memitigasi terjadinya deflasi yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi bahkan menyebabkan resesi. Pada Maret 2017, FFR kembali meningkat menjadi sebesar 1,00% dan kenaikan tersebut terus berlanjut hingga mencapai 2,50% pada Juli 2019. Setelah itu, FFR kembali turun secara bertahap hingga mencapai 0,25% pada Maret 2020.

Pandemi Covid-19 yang nyaris melumpuhkan perekonomian global kembali mengulang sejarah penurunan FFR ke level terendahnya di kisaran 0,25%-0,50%. Namun demikian, pemberlakuan FFR di level tersebut hanya berlangsung pada Maret 2020 sampai dengan April 2022, tidak berkepanjangan seperti saat terjadinya penyesuaian suku bunga selama periode Krisis Keuangan Global hingga beberapa tahun setelahnya (Desember 2008 sampai dengan Februari 2017). Kebijakan ini diambil untuk mencegah terjadinya kontraksi ekonomi yang lebih dalam sekaligus membantu Amerika Serikat beserta negara lainnya keluar dari jurang resesi. Perbaikan ekonomi global yang berlangsung sejak awal tahun 2021 pasca kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 mendorong PDB Amerika Serikat tumbuh mencapai 12,2% (yoy) pada triwulan II-2021 yang diikuti oleh kenaikan laju inflasi di atas kisaran target.

### The Fed mengubah arah kebijakan moneter untuk menjaga keseimbangan ekonomi setelah pandemi Covid-19....

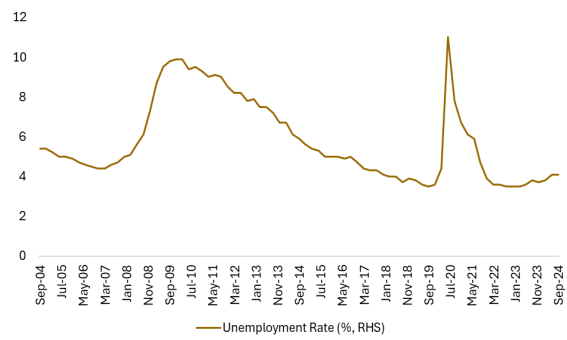
Lonjakan inflasi global disertai perlambatan ekonomi yang terus berlanjut kemudian mendorong The Fed untuk mengambil langkah pengetatan kebijakan moneter secara agresif. Sejak Maret 2023, The Fed meningkatkan FFR secara perlahan dari 5,00% sampai dengan 5,5% pada Agustus 2024 (*higher for longer*). Kenaikan FFR tersebut efektif mendorong laju inflasi Amerika Serikat semakin melandai hingga mendekati target 2% selama tiga bulan berturut-turut (Juni 2,97% yoy, Juli 2,89% yoy, dan Agustus 2,53% yoy). Tidak hanya itu, laju inflasi Amerika Serikat yang terkendali juga diiringi dengan pertumbuhan PDB AS yang terjaga positif sampai dengan triwulan II-2024 sebesar 3,00% atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 2,8% (yoy).

**Grafik 6 – FFR, Laju Inflasi (% yoy), dan Pertumbuhan PDB Amerika Serikat (% yoy)**



Sumber: Reuters, diolah

**Grafik 7 – Tingkat Pengangguran di Amerika Serikat (% yoy)**



Sumber: Reuters, diolah

Perkembangan positif tersebut disambut baik oleh The Fed dengan melakukan pemangkasan FFR sebesar 50bps dan melampaui ekspektasi pasar yang hanya 25bps yaitu dari 5,50% menjadi 5,00% pada tanggal 19 September 2024. Faktor lain yang mendasari The Fed untuk melakukan pemangkasan FFR adalah untuk mengendalikan *unemployment rate* yang bahkan sempat menyentuh 4,1% pada Juli 2024 atau mencetak rekor tertinggi sejak Desember 2021 (Grafik 7). Pemangkasan FFR oleh The Fed diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pasar tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran berkurang dan kesempatan kerja bagi masyarakat bertambah.

**FFR menjadi kompas kebijakan moneter global hadapi badai ekonomi yang dapat memberikan efek domino secara luas....**

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh The Fed dapat memberikan efek domino yang memengaruhi banyak aspek ekonomi tidak hanya bagi Amerika Serikat tetapi juga meluas ke lingkup global. Keputusan The Fed seringkali menjadi acuan bagi Bank Sentral negara lain karena arah kebijakannya dapat memengaruhi permintaan global terhadap barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang menjadi lokomotif bagi perekonomian global. Selain itu, pasar keuangan Amerika Serikat termasuk yang terbesar dan paling likuid di dunia, sehingga perubahan FFR dapat memicu aliran modal masuk/keluar secara besar-besaran dari/ke negara-negara lain. Adanya perubahan FFR secara lebih lanjut juga berpotensi memengaruhi harga aset keuangan yang berdenominasi USD dan memicu volatilitas di pasar keuangan global.

Pasaribu dan Mindosa (2021)<sup>2</sup> menyebutkan bahwa salah satu efek kebijakan moneter The Fed terhadap perbankan Indonesia terlihat jelas pada pertumbuhan kredit perbankan yang tinggi antara tahun 2010 hingga 2013, mencapai pertumbuhan rata-rata 23%. Pertumbuhan kredit yang tinggi di tahun tersebut utamanya didorong oleh *quantitative easing* yang dilakukan oleh The Fed, salah satunya melalui penurunan FFR menjadi hanya sebesar 0,25%. Kemudian, pertumbuhan kredit tersebut menurun signifikan pada 2014-2018 menjadi rata-rata 10%. Alasan utama dari penurunan tersebut adalah keputusan The Fed untuk mulai mengubah kebijakan moneter dari *easing* menjadi *tightening*, mengingat kondisi ekonomi US yang mulai pulih. Hal tersebut menyebabkan gejolak di pasar keuangan dunia terutama *emerging market* (EM), yang dikenal dengan *taper tantrum*.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa setiap penyesuaian kebijakan moneter, termasuk pemangkasan FFR, tidak selalu menghasilkan efek langsung yang mengubah arah perkembangan ekonomi secara linier sesuai target output yang diharapkan. Ada banyak faktor kompleks dan dinamis, seperti: kondisi global, sentimen pasar, respon konsumen dan bisnis yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu, ada juga faktor *lag* waktu antara implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi yang mungkin tidak terlihat segera. Struktur ekonomi suatu negara juga berperan penting dalam efektivitas

<sup>2</sup> The Bank Specific Determinants of Loan Growth And Stability: Evidence From Indonesia

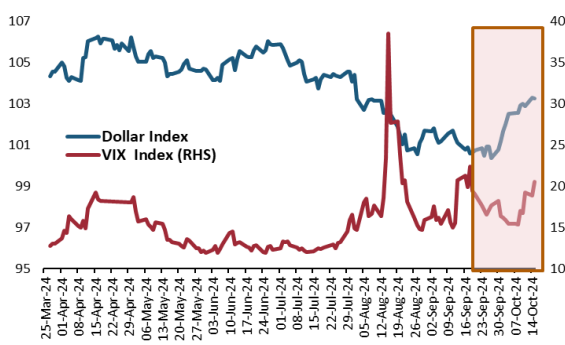
kebijakan. Negara dengan struktur ekonomi yang lebih terbuka terhadap perdagangan internasional akan lebih terpengaruh oleh perubahan kondisi ekonomi global.

**Pemangkasan FFR beri sinyal positif bagi pasar keuangan global, namun lonjakan VIX mengindikasikan bahwa investor masih khawatir akan potensi risiko pasar....**

Efek pemangkasan FFR sejak pertengahan September 2024 cukup terasa pada perkembangan pasar keuangan global dalam beberapa hari terakhir. Volatilitas pasar keuangan (VIX Index) terlihat meningkat selama periode pengamatan (mtd: 20 September s.d. 14 Oktober 2024). Kenaikan VIX ini menunjukkan kewaspadaan investor masih cukup tinggi karena meningkatnya konflik Timur Tengah dan pasar menantikan keputusan pemangkasan FFR selanjutnya. Seiring dengan perkembangan tersebut, Dollar Index juga meningkat pada periode pengamatan yang sama (Grafik 8). Hal ini dapat dipahami bahwa dalam situasi yang penuh ketidakpastian, investor akan mencari aset yang lebih aman (*safe haven assets*). Mata uang USD sebagai mata uang cadangan utama dunia seringkali menjadi pilihan utama investor.

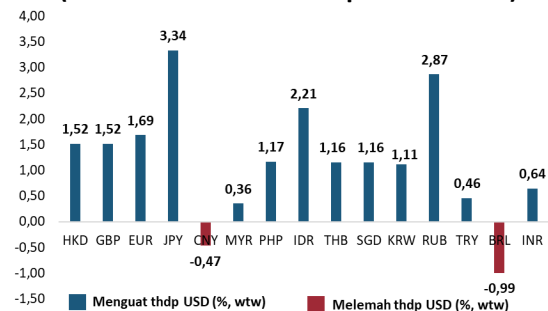
Di sisi lain, pemangkasan FFR telah mendorong penguatan nilai tukar global (Grafik 9) dalam 1 (satu) minggu pertama (20 September s.d. 4 Oktober 2024) setelah keputusan The Fed memangkaskan FFR diumumkan. Pada beberapa mata uang negara yang diamati, hanya mata uang Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) dan Real Brasil (BRL) yang terdepresiasi atas mata uang USD secara *week to week* (wtw). Namun demikian, nilai tukar CNY dan BRL tersebut terapresiasi atas mata uang USD secara *month to date* (mtd) masing-masing sebesar 0,99% (mtd) dan 2,65% (mtd) untuk periode 30 September vs 14 Oktober 2024. Sementara itu, mata uang Dolar Hongkong (HKD) yang semula terapresiasi atas USD sebesar 1,52% (wtw) menjadi terdepresiasi atas USD sebesar -0,22% (mtd).

**Grafik 8 - Dollar dan VIX Index**



Sumber: Reuters, diolah

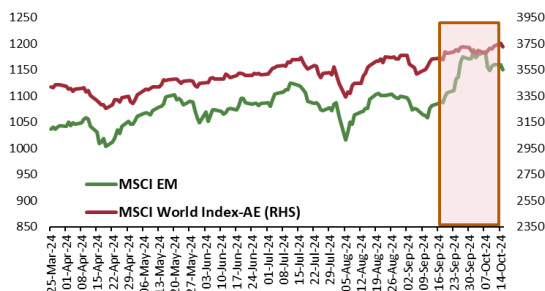
**Grafik 9 - Nilai Tukar Global (4 Oktober 2024 vs 20 September 2024)**



Sumber: Reuters, diolah

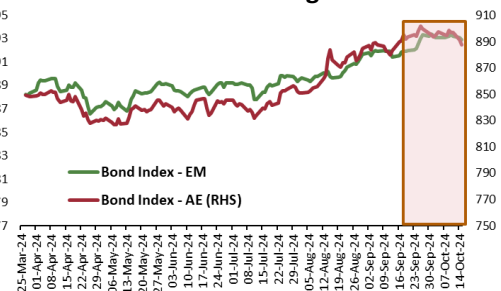
Pasar saham global menerima sentimen positif dari pemangkasan FFR terlihat dari indeks saham pada negara maju/*Advanced Economy* (AE) maupun negara berkembang (EM) yang cenderung meningkat (Grafik 10). Pasar obligasi global juga menunjukkan perkembangan serupa ditandai dengan indeks obligasi pada AE dan EM yang berada dalam kecenderungan tren meningkat (Grafik 11). Perkembangan positif tersebut mengindikasikan bahwa pemangkasan FFR kali ini dapat memberikan sinyal positif bagi pasar keuangan global secara umum dalam jangka pendek. Adapun VIX yang meningkat di tengah pemangkasan FFR merupakan suatu efek yang mungkin relatif sulit untuk dihindari mengingat tingginya kompleksitas pasar keuangan global saat ini.

**Grafik 10 - Indeks Saham Global**



Sumber: Reuters, diolah

**Grafik 11 - Indeks Obligasi Global**

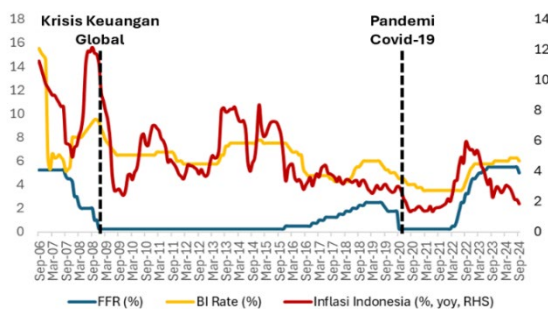


Sumber: Reuters, diolah

**Bank Indonesia beriringan dengan The Fed melakukan penyesuaian kebijakan moneter searah perkembangan ekonomi global....**

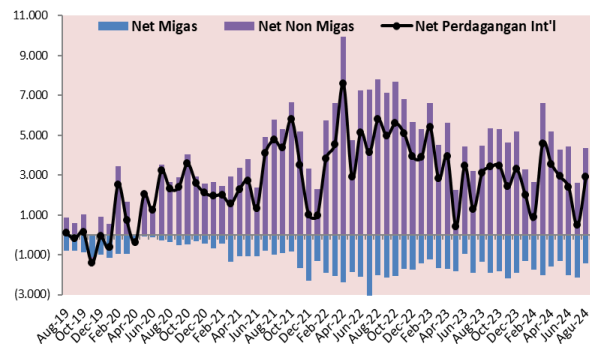
Arah pergerakan FFR acap kali menjadi acuan bagi banyak negara di dunia, termasuk salah satunya Indonesia dalam menetapkan kebijakan moneter. Data historis menunjukkan bahwa arah pergerakan suku bunga BI Rate dan The Fed memiliki kemiripan pola terutama pada saat Krisis Keuangan Global dan Pandemi Covid-19 (Grafik 12). Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga BI Rate sebagaimana yang dilakukan oleh The Fed. Pola yang sama terlihat ketika Bank Indonesia beberapa kali melakukan penyesuaian atas suku bunga BI Rate ke arah yang lebih tinggi secara bertahap seiring laju inflasi yang terus mulai melambung tinggi bahkan melampaui kisaran target inflasi tahunan  $2,5\% \pm 1\%$ .

**Grafik 12 – FFR, BI Rate, dan Laju Inflasi Indonesia**



Sumber: Reuters, BI, BPS, diolah

**Grafik 13 – Neraca Perdagangan Indonesia**



Sumber: BPS, diolah

Kenaikan BI Rate secara bertahap mulai terjadi sejak pertengahan 2022 sebagai respon atas laju inflasi tahunan yang meningkat cukup tajam bahkan melebihi kisaran target inflasi selama tiga bulan berturut-turut. Pada saat itu, tingkat inflasi tahunan di bulan Juni 2022, Juli 2022, dan Agustus 2022 masing-masing tercatat sebesar 4,37%, 4,93%, dan 4,53%. Bank Indonesia mulai melakukan penyesuaian BI Rate dari 3,5% pada bulan Juni dan Juli 2022 menjadi 3,75% (naik 25 bps) pada Agustus 2024. Pada bulan berikutnya, BI Rate kembali dinaikkan menjadi 4,25% (naik 50 bps dari 3,75%). Peningkatan BI Rate tersebut berlangsung kurang lebih selama 2 tahun hingga mencapai 6,25% pada Agustus 2024. Sebagai informasi, Bank Indonesia telah memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 17-18 September 2024 seiring laju inflasi tahunan yang terkendali di kisaran target.

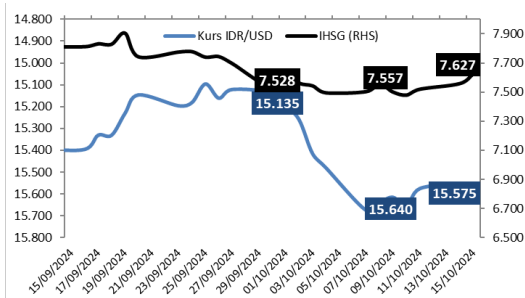
Di sisi lain, perubahan FFR yang diikuti oleh BI Rate tidak serta merta menyurutkan kinerja ekspor dan impor Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan posisi neraca perdagangan Indonesia yang mencatatkan surplus (Grafik 13) selama empat tahun berturut-turut bahkan sejak awal Pandemi Covid-19 (Mei 2020). Meskipun Pandemi Covid-19 membawa banyak tantangan bagi semua negara di dunia, tetapi kondisi ini menjadi *“blessing in disguise”* untuk Indonesia. Hal ini dikarenakan harga komoditas ekspor utama Indonesia meningkat di tengah krisis energi yang melanda banyak negara terutama Eropa. Kelangkaan pasokan energi tersebut mendorong permintaan untuk komoditas energi seperti batubara dan gas menjadi lebih tinggi yang kemudian berkontribusi pada peningkatan volume ekspor dan mendorong terjadinya surplus neraca perdagangan.

**Sepekan setelah pemangkasan FFR, Rupiah terus melemah dan dorong investor asing beralih ke aset yang lebih aman yaitu SBN sehingga aliran modal asing keluar dari pasar saham....**

Efek dari pemangkasan FFR pada 19 September 2024 memberikan sentimen yang cukup beragam bagi pasar keuangan domestik. Dalam kaitan tersebut, nilai tukar IDR/USD cenderung melemah setelah pemangkasan FFR sejalan dengan penguatan Dollar Index (Grafik 14). Sejalan dengan VIX yang meningkat di tengah pemangkasan FFR, nilai tukar IDR/USD kembali melemah dari Rp15.135/USD per 20 September 2024 menjadi Rp15.640 pada

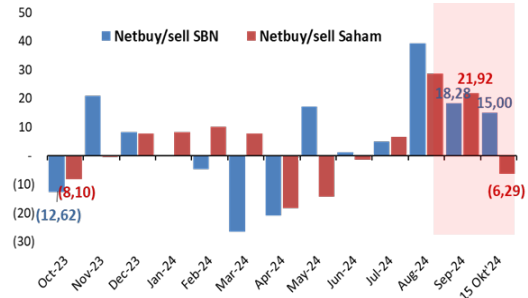
8 Oktober 2024 dan menjadi 15.757/USD per 15 Oktober 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemangkasan FFR hanya memberikan efek sesaat terhadap penguatan nilai tukar global termasuk pada mata uang Rupiah selama satu minggu pertama pasca diumumkannya pemangkasan FFR. Kondisi demikian ditengarai merupakan dampak dari pernyataan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat yang tidak memberikan sinyal kuat untuk pemangkasan lebih besar, sehingga pasar beradaptasi dengan ekspektasi yang lebih moderat. Akibatnya, permintaan investor terhadap aset berdenominasi USD meningkat karena dianggap lebih aman sehingga menyebabkan nilai mata uang Rupiah melemah.

**Grafik 14 – Nilai Tukar IDR/USD dan IHSG**



Sumber: Reuters, BI, BPS, diolah

**Grafik 15 – Net buy/Net Sell di Pasar SBN dan Saham**



Sumber: Reuters, DJPPR, IDX, IBPA

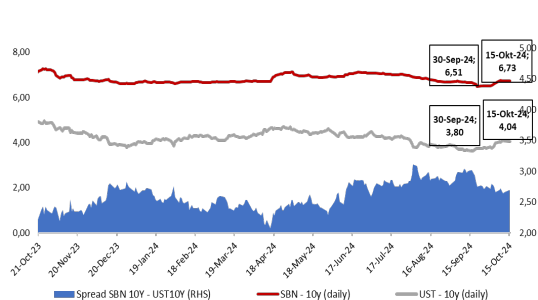
Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bereaksi positif sesaat setelah pemangkasan FFR dan menguat (wtw: 15 Oktober 2024 vs 8 Oktober 2024 dan mtd: 15 Oktober 2024 vs 30 September 2024). Ironisnya, pada saat yang bersamaan terjadi arus modal keluar asing (*capital outflow*) pada pasar saham yang mencatatkan net sell sebesar Rp6,29 triliun per 15 Oktober 2024. Sebaliknya, pasar Surat Berharga Negara (SBN) justru menarik modal masuk asing (*capital inflow*) dan mencatatkan *net buy* sebesar Rp15,00 triliun (Grafik 15). Depresiasi IDR/USD kemungkinan membuat investor asing khawatir akan mengalami kerugian akibat fluktuasi nilai tukar, sehingga lebih tertarik pada instrumen investasi dengan volatilitas rendah dan memberikan imbal hasil lebih stabil seperti obligasi pemerintah, emas, deposito dsb.

**Penyempitan *spread yield* dukung aliran modal asing masuk ke pasar SBN namun kenaikan CDS dan NDF tunjukkan risiko tersembunyi....**

*Spread yield US Treasury Bond* (UST) dan SBN terlihat semakin menyempit sebesar 2,69% per 15 Oktober 2024 dibandingkan 2,72% pada 8 Oktober 2024 dan 2,71% pada 30 September 2024 (Grafik 16). Penyempitan *spread yield* UST dan SBN memberikan sinyal positif terkait *sovereign risk* Indonesia yang menurun sehingga menumbuhkan kepercayaan investor, meningkatkan *capital inflow* ke pasar obligasi Indonesia dan diharapkan dapat memperkuat nilai tukar IDR/USD. Sejalan dengan hal tersebut, porsi kepemilikan SBN oleh asing di Indonesia relatif meningkat yaitu sebesar 15,06% pada 15 Oktober 2024 dari 14,70% pada 30 September 2024 (Grafik 17). Hal ini didorong oleh kenaikan nominal kepemilikan SBN non residen (Grafik 18) sebesar Rp15,00 triliun (dari Rp870,58 triliun pada 30 Sep’24 menjadi Rp885,59 triliun pada 15 Okt’24).

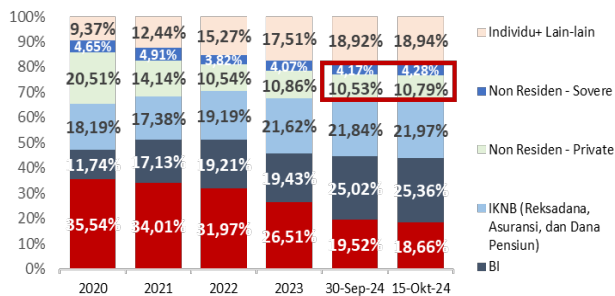
Kendati demikian, perkembangan Credit Default Swap (CDS) dan Non-Deliverable Forward (NDF) yang meningkat secara mtd namun melandai secara wtw tetap perlu diwaspadai sebagai sinyal negatif yang perlu diperhatikan (Grafik 19). Kenaikan CDS menunjukkan bahwa investor semakin khawatir terhadap risiko default atau gagal bayar. Sementara itu, kenaikan NDF menunjukkan ekspektasi bahwa nilai tukar IDR/USD akan melemah. Tren kenaikan CDS dan NDF yang berlanjut dalam jangka menengah harus disikapi secara hati-hati karena dapat mengakibatkan penarikan dana oleh investor asing sebagai upaya menghindari potensi kerugian. Penarikan dana dalam jumlah besar bisa memperburuk tekanan pada nilai tukar IDR/USD dan menyebabkan inflasi karena barang-barang impor menjadi lebih mahal serta berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.

**Grafik 16 – Spread Yield UST dan SBN Tenor 10y (%)**



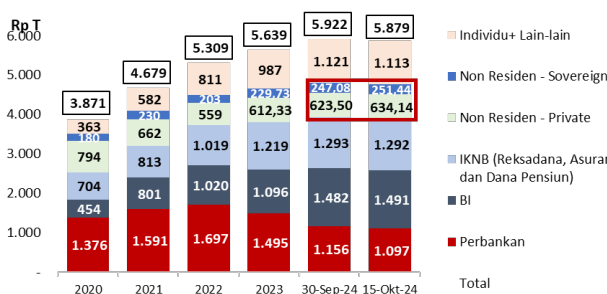
Sumber: Reuters, DJPPR, IBPA diolah

**Grafik 17 – Porsi Kepemilikan SBN**



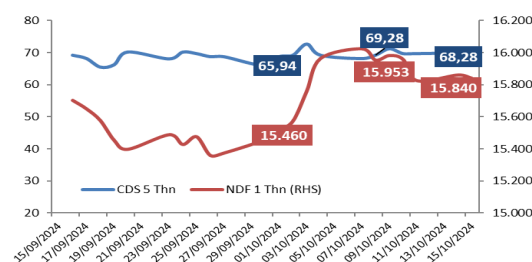
Sumber: DJPPR, diolah

**Grafik 18 – Nominal Kepemilikan SBN**



Sumber: DJPPR, diolah

**Grafik 19 – Ekspektasi Risiko dalam Jangka Pendek dan Panjang**



Sumber: Reuters, CEIC, diolah

**Penyempitan *spread yield* dukung aliran modal asing masuk ke pasar SBN namun kenaikan CDS dan NDF tunjukkan risiko tersembunyi....**

Kinerja sektor perbankan nasional secara umum berdasarkan data September 2024 masih terjaga baik (Tabel 1) ditopang oleh pertumbuhan kredit dan DPK yang cukup tinggi yakni masing-masing sebesar 10,85% (yoy) dan 7,04% (yoy). Kombinasi antara pertumbuhan kredit dan DPK yang cukup tinggi menunjukkan bahwa perbankan berhasil menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik seiring kondisi ekonomi domestik yang relatif stabil dan optimisme masyarakat terhadap prospek perekonomian ke depan. Ketersediaan likuiditas perbankan juga cukup memadai dengan Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 112,66% dan 25,40% per September 2024 meskipun dalam tren menurun dari September tahun lalu sebesar 115,37% dan 25,83%, sejalan dengan kebutuhan bank untuk penyaluran kredit. Namun demikian, kondisi permodalan perbankan masih relatif kuat untuk menghadapi risiko sebagaimana tecermin pada rasio CAR sebesar 26,85%.

**Tabel 1 – Perkembangan Indikator Kinerja Sektor Perbankan Nasional**

Kinerja Perbankan		Sep-23	Des-23	Agu-24	Sep-24 <sup>*)</sup>
Fungsi Intermediasi	Kredit (yoy, %)	8,96	10,38	11,4	10,85
	DPK (yoy, %)	6,44	3,73	7,01	7,04
	LDR (%)	83,92	83,83	86,8	86,91
Risiko Likuiditas	AL/DPK (%)	25,83	28,73	25,37	25,4
	AL/NCD (%)	115,37	127,07	112,92	112,66
Risiko Pasar	PDN (%)	1,76	1,44	1,29	1,56
Risiko Kredit	NPL Gross (%)	2,43	2,19	2,26	2,21
	LaR (%)	12,07	10,94	10,17	10,11
Profitabilitas dan Permodalan	ROA (%)	2,73	2,74	2,69	2,73
	NIM (%)	4,85	4,81	4,6	4,6
	BOPO (%)	76,34	78,92	78,75	78,71
	CAR (%)	27,33	27,65	26,69	26,85

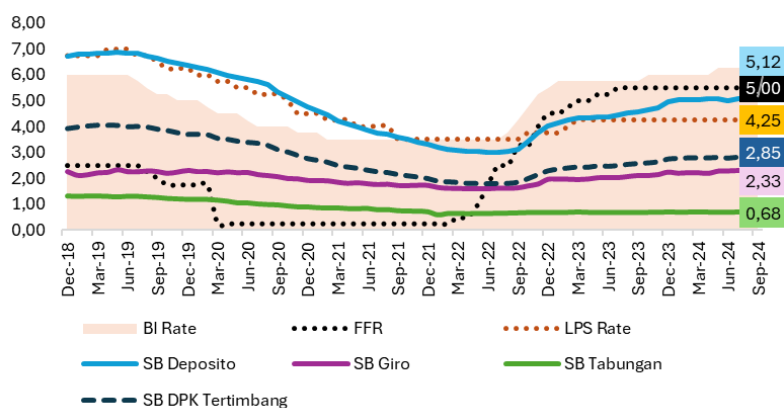
Sumber: LBUT, diolah

\*) sesuai rilis data Siaran Pers OJK 1 November 2024

Kinerja perbankan sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi. Ketika ekonomi sedang tumbuh, permintaan kredit akan meningkat, dan sebaliknya ketika ekonomi melambat, permintaan kredit akan menurun. Perkembangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian juga dapat memengaruhi kinerja perbankan di Indonesia. Ketidakpastian dari faktor-faktor eksternal, seperti konflik geopolitik atau krisis ekonomi di negara utama dunia, dapat menyebabkan volatilitas pasar keuangan, memengaruhi nilai tukar, dan menurunkan permintaan kredit yang secara berkelanjutan bisa memicu serangkaian tantangan yang kompleks bagi perbankan.

Perubahan suku bunga DPK dapat memengaruhi tingkat pengembalian investasi sekaligus keputusan masyarakat untuk menyimpan dananya. Secara umum, rerata suku bunga DPK tertimbang berada dalam tren meningkat sejak tahun lalu sejalan dengan kecenderungan kenaikan BI Rate selama setahun terakhir (meskipun sudah turun 25 bps menjadi 6,00% pada September 2024). Adapun berdasarkan data historis, perubahan rerata tertimbang suku bunga Dana Pihak Ketiga (SB Rerata Tertimbang DPK) perbankan memiliki hubungan erat dengan perubahan FFR yang diikuti oleh BI Rate, dengan suku bunga deposito cenderung lebih sensitif terhadap pergerakan BI Rate dibandingkan suku bunga tabungan dan giro. Pada Grafik 20 terlihat bahwa perkembangan FFR, BI, Rate, dan SB Rerata Tertimbang DPK cenderung bergerak searah baik sebelum, selama, dan setelah periode Pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini. Dalam kondisi persaingan yang ketat, perbankan akan berusaha menarik dana nasabah sebanyak-banyaknya dengan menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif. Ketika FFR dan BI Rate meningkat, perbankan akan menyesuaikan suku bunga DPK untuk mempertahankan likuiditas dan ketersediaan dana. Hal ini bisa menyebabkan suku bunga DPK meningkat yang diharapkan dapat menarik lebih banyak dana dari nasabah. Sebaliknya, jika BI Rate diturunkan, perbankan umumnya akan menurunkan suku bunga DPK seiring dengan penurunan biaya dana dari bank sentral. Hal ini juga akan memicu peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

**Grafik 20 – Transmisi Perubahan FFR dan BI Rate terhadap Suku Bunga DPK Rerata Tertimbang Perbankan**

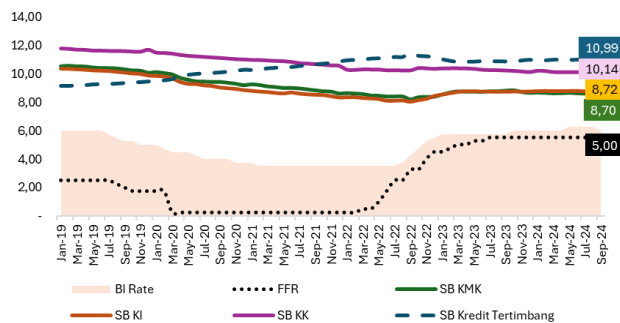


Sumber: The Fed, Bank Indonesia, LPS, LBUT OJK, diolah

Di sisi lain, perubahan FFR yang diikuti oleh BI Rate yang berdampak pada suku bunga DPK tidak serta merta selalu diikuti oleh perubahan suku bunga pinjaman/kredit. Pola ini terlihat utamanya saat periode Pandemi Covid-19 sampai akhir tahun 2022 di mana rerata suku bunga tertimbang kredit cenderung meningkat secara gradual. Namun demikian, seiring pemulihan ekonomi domestik yang terus berlanjut, perkembangan rerata tertimbang suku bunga kredit mulai bergerak searah dengan FFR dan BI Rate. Dalam kaitan tersebut, ketika BI Rate naik maka bank cenderung akan meningkatkan suku bunga kreditnya. Hal ini membuat pinjaman menjadi lebih mahal sehingga dapat mengurangi permintaan masyarakat terhadap kredit. Sebaliknya, jika suku bunga kredit turun, maka pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mendorong masyarakat untuk mengambil kredit. Dengan suku bunga kredit yang lebih rendah, individu maupun perusahaan cenderung akan lebih aktif berinvestasi dan berbelanja sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

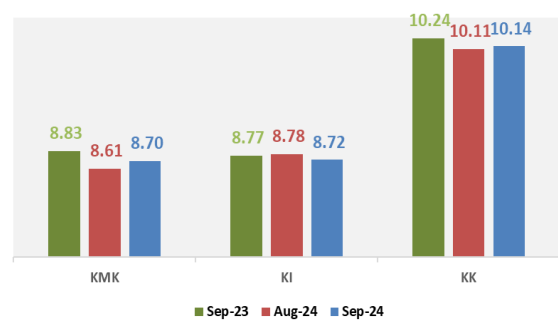
Kenaikan rerata tertimbang suku bunga kredit secara gradual dan hati-hati dapat dipahami sebagai salah satu manifestasi dari penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank untuk mengantisipasi potensi meningkatnya risiko kredit di tengah ketidakpastian ekonomi yang tinggi. Sebagai informasi, pergerakan rerata suku bunga kredit untuk semua jenis penggunaan (Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumsi) cenderung turun secara tahunan (yoy) meskipun terdapat peningkatan BI Rate selama setahun terakhir (Grafik 22). Hal tersebut disebabkan karena bank lebih memilih untuk menjaga kualitas kredit dibandingkan memperoleh margin suku bunga yang lebih tinggi.

**Grafik 21 – Transmisi Perubahan FFR dan BI Rate terhadap Suku Bunga Kredit Rerata Tertimbang Perbankan**



Sumber: LBUT, diolah

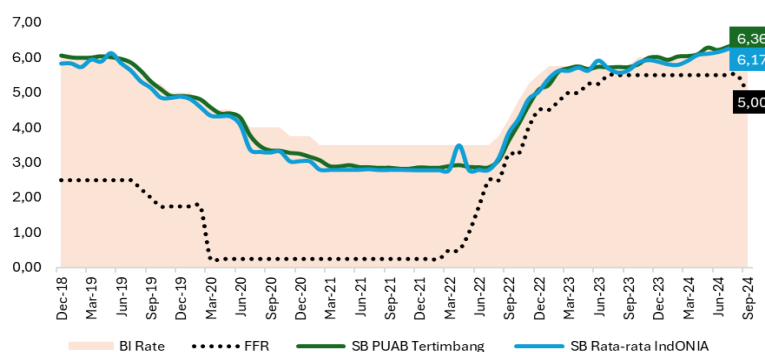
**Grafik 22 – Perkembangan Suku Bunga Kredit Rerata Tertimbang Perbankan menurut Jenis Penggunaan**



Sumber: LBUT, diolah

Dinamika perubahan FFR dan BI Rate tidak hanya berdampak pada suku bunga DPK dan kredit tetapi juga terhadap Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Kenaikan atau penurunan BI Rate secara umum dapat memicu penyesuaian suku bunga yang ditawarkan oleh bank dalam transaksi PUAB overnight. Hal ini dikarenakan BI Rate berfungsi sebagai acuan bagi bank dalam menentukan biaya dana. Di samping itu, perubahan BI Rate juga dapat memengaruhi likuiditas pasar. Ketika BI Rate naik, maka Bank akan cenderung lebih hati-hati dalam meminjamkan dana. Oleh karena itu, biaya pinjaman antar Bank juga akan meningkat dan suku bunga dalam transaksi PUAB cenderung mengikuti. Sebaliknya, ketika BI Rate turun, Bank kemungkinan akan menurunkan suku bunga PUAB untuk menarik lebih banyak likuiditas dan menjaga daya saing.

**Grafik 23 – Transmisi Perubahan FFR dan BI Rate terhadap Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Rerata Tertimbang dan Suku Bunga Pasar Uang (IndONIA<sup>3</sup>)**



Sumber: The Fed, Bank Indonesia, LBUT, diolah

<sup>3</sup> IndONIA merupakan suku bunga transaksi yang terbentuk dari transaksi pasar. Penetapan IndONIA dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang berdasarkan nilai nominal transaksi (*volume weighted average*) atas seluruh data transaksi PUAB *overnight* yang dilakukan pada hari transaksi.

Data historis menunjukkan adanya keselarasan antara BI Rate, rata-rata tertimbang suku bunga PUAB dan suku bunga rerata tertimbang IndONIA sampai dengan saat ini (Grafik 23). Keselarasan antara pergerakan FFR, BI Rate, suku bunga DPK, suku bunga Kredit, dan suku bunga PUAB serta suku bunga IndONIA mengindikasikan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter berjalan dengan cukup lancar di Indonesia. Dalam hal ini, perbankan cukup responsif terhadap perubahan kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral dengan melakukan penyesuaian suku bunga yang ditawarkan sesuai dengan perubahan BI Rate.

**Penyempitan *spread yield* dukung aliran modal asing masuk ke pasar SBN namun kenaikan CDS dan NDF tunjukkan risiko tersembunyi....**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak jangka pendek dari pemangkasan suku bunga The Fed tidak memberikan sentimen negatif yang cukup signifikan terhadap perekonomian global maupun domestik dan sektor perbankan nasional. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa arah pergerakan kebijakan moneter The Fed merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia dan industri perbankan secara kompleks dalam jangka menengah-panjang. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara lebih mendalam potensi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) yang mungkin timbul sebagai respons terhadap perubahan ini, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi strategi yang tepat dalam menghadapi dinamika yang ada. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan pemangku kepentingan dapat mengambil langkah-langkah proaktif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan manfaat serta meminimalkan risiko.

**Gambar 2 – Analisis SWOT**

<p style="text-align: center;"><b>STRENGTHS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fundamental makro ekonomi Indonesia cukup resiliensi menghadapi berbagai tantangan global selama ini didukung kebijakan Pemerintah yang responsif dan akomodatif.</li> <li>• Fleksibilitas kebijakan moneter cukup efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.</li> <li>• Pasar modal Indonesia memiliki daya tarik yang kuat bagi investor asing.</li> <li>• Rasio Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto masih dalam batas aman.</li> <li>• Cadangan devisa nasional tinggi dan cukup memadai untuk meredam gejolak eksternal termasuk perubahan suku bunga global.</li> <li>• Sektor perbankan Indonesia memiliki ketahanan permodalan yang cukup tinggi, likuiditas yang memadai, dan teregulasi dengan baik.</li> <li>• Indonesia salah satu negara penghasil sekaligus eksportir utama beberapa komoditas global seperti: CPO, batu bara, karet, coklat, dsb.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>WEAKNESS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas penyesuaian kebijakan moneter tidak selalu menghasilkan efek langsung karena ada <i>lag</i> waktu dari pengimplementasiannya.</li> <li>• Pasar keuangan domestik masih relatif dangkal dibandingkan negara <i>peers</i> dan hanya didominasi oleh sektor perbankan.</li> <li>• Sebagian besar ULN Indonesia masih didominasi valas. Hal ini bisa membuat Indonesia rentan terhadap risiko <i>refinancing</i>, terutama jika terjadi kenaikan suku bunga global.</li> <li>• Komoditas utama ekspor Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global.</li> <li>• Konsentrasi ekspor ke beberapa negara tujuan utama membuat Indonesia rentan terhadap perubahan kebijakan di negara tersebut.</li> <li>• Obligasi korporasi lebih didominasi produk bertenor pendek dan cenderung lebih <i>volatile</i> terhadap perubahan kebijakan moneter.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>OPPORTUNITIES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan moneter yang akomodatif mendorong kenaikan likuiditas di pasar keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan,</li> <li>• Pemangkasan suku bunga The Fed menarik minat investor asing mencari instrumen investasi dengan <i>return</i> lebih tinggi di negara berkembang.</li> <li>• Aliran modal masuk asing ke Indonesia berpotensi meningkatkan peluang Rupiah atas mata uang lainnya sehingga membantu mengurangi beban pembiayaan ULN berdenominasi valas.</li> <li>• Penguatan Rupiah dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Harga komoditas utama ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global.</li> <li>• Penurunan suku bunga acuan membuat biaya pinjaman lebih rendah sehingga permintaan kredit cenderung meningkat dan menjadi stimulus bagi perekonomian.</li> <li>• Pelonggaran kebijakan moneter umumnya diiringi dengan kenaikan indeks pasar saham yang dapat meningkatkan keuntungan investor.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>THREATS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan suku bunga dapat memicu volatilitas di pasar keuangan yang menyebabkan aliran modal asing keluar dan pelemahan Rupiah terhadap mata uang lainnya dan menekan cadangan devisa.</li> <li>• Depresiasi nilai tukar Rupiah akibat perubahan kondisi ekonomi global dapat meningkatkan beban pembayaran utang.</li> <li>• Volatilitas harga komoditas global akibat ketidakpastian ekonomi dapat memicu lonjakan inflasi dan memengaruhi nilai tukar Rupiah.</li> <li>• Ketika ketidakpastian pasar meningkat, investor cenderung mencari aset-aset yang dianggap lebih aman seperti emas, USD, atau obligasi pemerintah negara maju. Hal ini dapat menyebabkan permintaan terhadap obligasi korporasi, terutama yang berisiko tinggi menurun.</li> <li>• Fluktuasi siklus ekonomi yang tajam, seperti periode <i>boom</i> dan <i>bust</i>, dapat mengurangi kepercayaan investor dan mempersulit perencanaan jangka panjang.</li> </ul>

Fluktuasi suku bunga acuan merupakan tantangan serius yang menuntut pelaku ekonomi untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. Dalam menghadapi dinamika ini, berbagai pendekatan strategi dapat dipertimbangkan mulai dari pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik hingga penguatan ketahanan bank. Pelaku ekonomi yang terlibat dalam rumusan strategi ini mencakup Pemerintah yang berperan dalam menciptakan kebijakan yang mendukung, Lembaga Otoritas yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas pasar, Bank yang harus mampu beradaptasi dengan perubahan, maupun investor yang perlu mengidentifikasi peluang baru di tengah perubahan tersebut. Dengan kerjasama dan sinergi antar semua pihak, diharapkan dapat tercipta ekosistem ekonomi yang lebih resilien, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta meminimalisir risiko yang mungkin timbul dari fluktuasi suku bunga yang bergerak dinamis.

**Gambar 3 – Rekomendasi Strategi untuk Mengatasi Kelemahan dan Menghadapi Ancaman dari Perubahan Suku Bunga Acuan yang Bergerak Sangat Dinamis**



Halaman ini sengaja dikosongkan

# 2 Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

## 2 Kinerja Industri Perbankan Nasional

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan II-2024 cukup terjaga, tecermin dari tingkat permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai. Fungsi intermediasi perbankan masih cukup baik ditandai dengan kredit dan DPK bank umum yang tumbuh meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu, rentabilitas dan efisiensi perbankan juga masih terjaga meskipun menurun dari tahun sebelumnya.

### 1. Kinerja Bank Umum

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan II-2024 cukup terjaga, tecermin dari tingkat permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai dengan rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat jauh di atas *threshold* meskipun tercatat menurun, utamanya dipengaruhi oleh penyaluran kredit yang tumbuh melebihi penghimpunan dana. Hal ini juga tecermin pada fungsi intermediasi

perbankan yang membaik, dengan kredit dan DPK yang masih tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, perlu diperhatikan rentabilitas dan efisiensi perbankan tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya tecermin dari ROA dan BOPO masing-masing sebesar 2,66% dan 78,68%, meskipun masih berada di level yang cukup tinggi.

**Tabel 1 Indikator Umum Bank Umum**

Indikator	2023		2024		qtq		yoy	
	Jun	Mar	Jun	Mar '24	Jun '24	Jun '23	Jun '24	
<b>Jumlah Bank</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	
BUK	92	92	92	-	-	(3)	-	
BUS	13	14	14	1	-	1	1	
<b>Total Aset (Rp Miliar)</b>	<b>11,052,100</b>	<b>11,875,828</b>	<b>12,048,215</b>	<b>0.93%</b>	<b>1.45%</b>	<b>7.21%</b>	<b>9.01%</b>	
BUK	10,511,028	11,272,046	11,441,328	0.90%	1.50%	6.72%	8.85%	
BUS	541,072	603,782	606,887	1.53%	0.51%	17.88%	12.16%	
<b>Kredit (Rp Miliar)</b>	<b>6,656,016</b>	<b>7,244,637</b>	<b>7,478,404</b>	<b>2.18%</b>	<b>3.23%</b>	<b>7.76%</b>	<b>12.36%</b>	
BUK	6,312,779	6,866,246	7,088,644	2.15%	3.24%	7.08%	12.29%	
BUS	343,236	378,391	389,760	2.72%	3.00%	21.87%	13.55%	
<b>DPK (Rp Miliar)</b>	<b>8,042,101</b>	<b>8,601,220</b>	<b>8,722,035</b>	<b>1.69%</b>	<b>1.40%</b>	<b>5.79%</b>	<b>8.45%</b>	
BUK	7,619,675	8,123,819	8,247,384	1.65%	1.52%	5.51%	8.24%	
BUS	422,426	477,401	474,651	2.46%	-0.58%	10.92%	12.36%	
<b>- Giro (Rp Miliar)</b>	<b>2,415,360</b>	<b>2,663,816</b>	<b>2,740,839</b>	<b>0.05%</b>	<b>2.89%</b>	<b>8.31%</b>	<b>13.48%</b>	
BUK	2,353,650	2,581,485	2,659,022	-0.27%	3.00%	8.34%	12.97%	
BUS	61,710	82,331	81,816	11.15%	-0.63%	7.14%	32.58%	
<b>- Tabungan (Rp Miliar)</b>	<b>2,592,815</b>	<b>2,693,409</b>	<b>2,746,104</b>	<b>0.91%</b>	<b>1.96%</b>	<b>2.97%</b>	<b>5.91%</b>	
BUK	2,435,822	2,517,540	2,566,125	1.01%	1.93%	2.60%	5.35%	
BUS	156,992	175,869	179,980	-0.60%	2.34%	9.00%	14.64%	
<b>- Deposito (Rp Miliar)</b>	<b>3,033,926</b>	<b>3,243,996</b>	<b>3,235,092</b>	<b>3.77%</b>	<b>-0.27%</b>	<b>6.30%</b>	<b>6.63%</b>	
BUK	2,830,203	3,024,795	3,022,237	3.90%	-0.08%	5.80%	6.79%	
BUS	203,723	219,201	212,855	1.99%	-2.90%	13.68%	4.48%	

Sumber: SPI Juni 2024

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)

## 1.1 Aset Bank Umum

Aset Bank Umum tumbuh 9,01% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,21% (yoy). Jika dilihat dari jenis usaha bank, BUS masih tumbuh tinggi 2 digit sebesar 12,16% (yoy), namun turun dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, aset BUK hanya tumbuh 8,85% (yoy), namun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 6,72% (yoy), dan mendorong pertumbuhan aset secara umum.

Sebagian besar aset bank umum merupakan aset BUK dengan porsi 94,96%, sementara itu aset BUS memiliki porsi 5,04%. Meskipun masih cukup kecil, porsi aset BUS tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,90% walaupun secara nominal tumbuh melambat dari 17,88% (yoy) menjadi 12,16% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, perlambatan aset utamanya disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada seluruh kelompok Bank, dengan peningkatan tertinggi didorong oleh kelompok Bank BUMN (porsi: 42,14%) yang tumbuh 10,33% (yoy) dari tahun sebelumnya 8,73% (yoy). Sementara itu, kelompok Bank BUSN yang merupakan kelompok Bank dengan porsi terbesar (44,63%) juga tumbuh

7,65% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,58% (yoy).

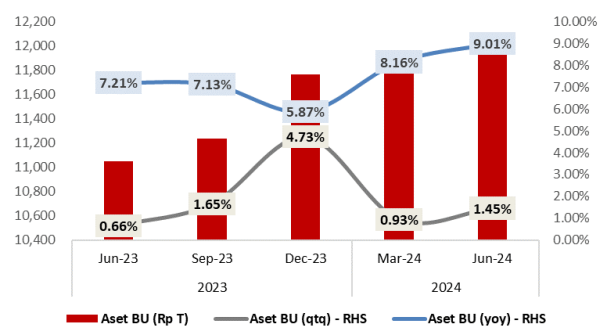
Aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset empat Bank Umum terbesar mencapai 49,89% atau hampir setengah dari aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 Bank Umum terbesar mencapai 79,39% dari aset perbankan.

**Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum**

Periode	Aset	
	CR4 %	CR20 %
Jun-23	50.01%	79.32%
Sep-23	49.94%	79.16%
Dec-23	50.61%	79.70%
Mar-24	50.10%	79.49%
<b>Jun-24</b>	<b>49.89%</b>	<b>79.39%</b>

Sumber: OJK

**Grafik 10 Perkembangan Aset Bank Umum**



Sumber: SPI Juni 2024

**Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan**

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun '23	Mar '24	Jun '24		Mar '24	Jun '24	Jun '23	Jun '24
BUMN	4,601,300	4,997,325	5,076,692	42.14%	-0.34%	1.59%	8.73%	10.33%
BUSN	4,995,530	5,320,510	5,377,464	44.63%	2.09%	1.07%	6.58%	7.65%
BPD	936,091	972,941	994,429	8.25%	-1.27%	2.21%	3.14%	6.23%
KCBLN	519,180	585,052	599,630	4.98%	5.55%	2.49%	7.70%	15.50%
<b>Total</b>	<b>11,052,100</b>	<b>11,875,828</b>	<b>12,048,215</b>	<b>100%</b>	<b>0.93%</b>	<b>1.45%</b>	<b>7.21%</b>	<b>9.01%</b>

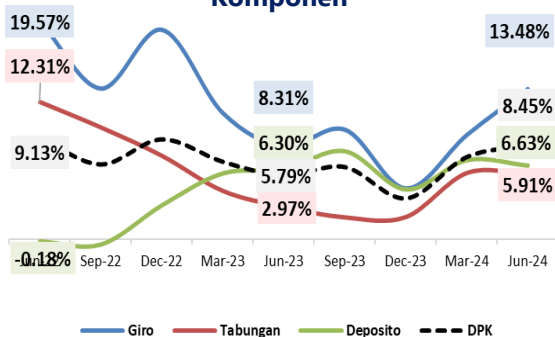
Sumber: SPI Juni 2024

### 1.2 Sumber Dana Bank Umum

Pada periode laporan, DPK Bank Umum tumbuh 8,45% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,79% (yoy). Berdasarkan jenis usaha, DPK tercatat meningkat baik pada BUK maupun BUS. DPK BUK menjadi pendorong utama kenaikan DPK pada bulan laporan, yaitu sebesar 8,24% (yoy) dari 5,51% (yoy) pada Jun-23.

Peningkatan pertumbuhan DPK terjadi pada seluruh komponen, dengan kenaikan terbesar pada Giro BUK yang tercatat tumbuh 12,97% (yoy) dari 8,34% (yoy) pada tahun sebelumnya. Deposito yang merupakan porsi DPK terbesar (37,09%) juga sedikit meningkat, tumbuh 6,63% (yoy) dari 6,30% (yoy) pada tahun sebelumnya.

**Grafik 11 Tren Pertumbuhan DPK per Komponen**

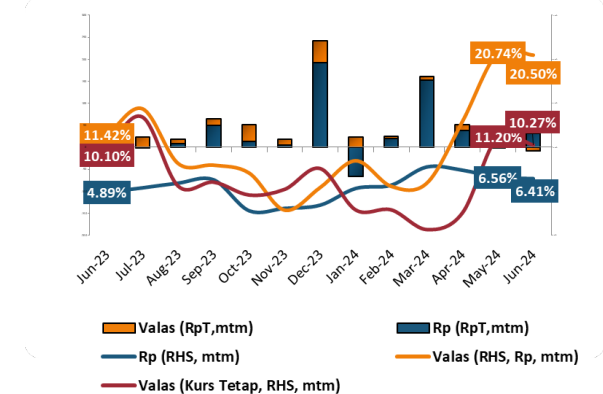


Sumber: SPI Juni 2024

Berdasarkan valuta, DPK Rupiah yang juga merupakan komponen dengan porsi terbesar (83,91%) tercatat tumbuh 6,41% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,89% (yoy). Di sisi lain, DPK Valas tercatat tumbuh tinggi 20,50% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 11,42% (yoy). Jika menggunakan kurs tetap, DPK Valas tercatat juga tumbuh sebesar

10,27% (yoy), relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,10% (yoy). Selisih tersebut menandakan meskipun secara umum DPK Valas memang meningkat, peningkatannya utamanya disebabkan kurs Rupiah yang terdepresiasi pada periode laporan.

**Grafik 12 Pergerakan DPK Berdasarkan Valuta**



Sumber: SPI Juni 2024

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK terdapat pada kelompok Bank BUSN sebesar 44,34%, diikuti BUMN sebesar 43,85%. DPK BUSN tumbuh meningkat menjadi 7,06% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 3,98% (yoy). Secara umum, DPK pada seluruh kelompok Bank tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pendorong utama kelompok bank BUMN yang tumbuh 10,76% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 9,22% (yoy).

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan total porsi 77,76%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (52,74%) diikuti Jawa Timur (8,79%) dan Jawa Barat (7,67%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

**Tabel 4 DPK Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank**

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)				Porsi (%)	qtq		yoy	
	Jun '23	Des '23	Mar '24	Jun '24		Mar '24	Jun '24	Jun '23	Jun '24
BUMN	3,452,904	3,747,610	3,771,957	3,824,397	43.85	0.65%	1.39%	9.22%	10.76%
BUSN	3,612,354	3,745,302	3,822,025	3,867,211	44.34	2.05%	1.18%	3.98%	7.06%
BPD	729,466	730,333	752,332	761,328	8.73	3.01%	1.20%	-0.83%	4.37%
KCBLN	247,377	234,684	254,907	269,099	3.09	8.62%	5.57%	7.07%	8.78%
<b>Total</b>	<b>8,042,101</b>	<b>8,457,929</b>	<b>8,601,220</b>	<b>8,722,035</b>	<b>100</b>	<b>1.69%</b>	<b>1.40%</b>	<b>5.79%</b>	<b>8.45%</b>

Sumber: SPI Juni 2024

**Tabel 5 Penyebaran DPK Bank Umum berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar**

Wilayah	Nominal Rp(M)				% Pangsa terhadap total DPK
	Jun '23	Des '23	Mar '24	Jun '24	
DKI Jakarta	4,233,552	4,499,584	4,576,871	4,599,624	52.74%
Jawa Timur	711,006	736,718	752,817	766,653	8.79%
Jawa Barat	639,478	658,144	669,478	668,951	7.67%
Jawa Tengah	391,292	404,249	402,942	422,536	4.84%
Sumatera Utara	302,908	318,612	320,702	324,225	3.72%
<b>Total DPK 5 Provinsi</b>	<b>6,278,235</b>	<b>6,617,307</b>	<b>6,722,810</b>	<b>6,781,989</b>	<b>77.76%</b>
<b>Total DPK</b>	<b>8,042,101</b>	<b>8,457,929</b>	<b>8,601,220</b>	<b>8,722,035</b>	

Sumber: SPI Juni 2024, diolah

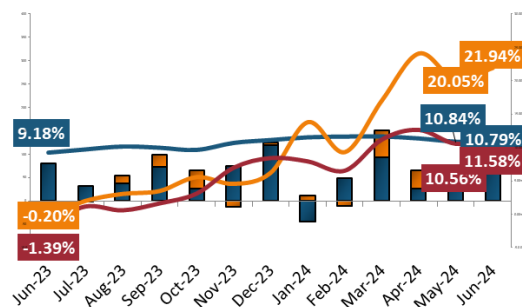
### 1.3 Penggunaan Dana Bank Umum

Sebagian besar (62,07%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (18,70%) dan penempatan pada Bank Indonesia (6,62%).

Kredit Bank Umum tumbuh 12,36% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 7,76% (yoy). Jika dilihat per jenis usaha, kredit BUK tumbuh 12,29% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,08% (yoy). Sementara itu, pembiayaan BUS tumbuh 13,55% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh tinggi 21,87% (yoy), meskipun dengan porsi relatif kecil (5,21%).

Berdasarkan valuta, kredit kepada pihak ketiga bukan bank didominasi dalam bentuk rupiah dengan porsi 84,78%, sedangkan kredit valas sebesar 15,22%. Secara umum,

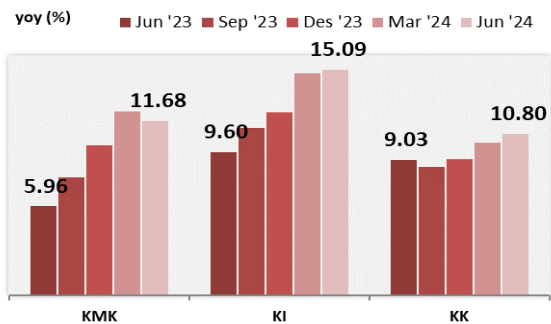
peningkatan pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan kredit rupiah yang tumbuh 10,79% (yoy) dari 9,18% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, kredit valas juga tercatat tumbuh meningkat 21,94% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -0,20% (yoy). Jika menggunakan kurs tetap, kredit valas juga tercatat meningkat tumbuh 11,58% (yoy) dari terkontraksi -1,39% (yoy) pada tahun sebelumnya (Grafik 18).

**Grafik 13 Kredit per Valuta**

Sumber: SPI Juni 2024

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,91%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) dengan porsi sebesar 45,32% dan kredit investasi (KI) sebesar 27,59%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 27,09%. Secara umum, kredit tumbuh pada seluruh jenis penggunaan. Pertumbuhan kredit secara umum didorong oleh Kredit Produktif yang tercatat tumbuh 12,95% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 17,28% (yoy). Kredit konsumtif juga tumbuh 10,80% (yoy) dari 9,03% (yoy) pada tahun sebelumnya.

**Grafik 14 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan**



Sumber: SPI Juni 2024

#### 1.4 Rentabilitas Bank Umum

Pada Juni 2024, rentabilitas Bank Umum tercatat menurun ditandai dengan turunnya ROA sebesar 15 bps dari tahun sebelumnya sebesar 2,73% menjadi 2,66%. Penurunan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba sebelum pajak yang melambat hanya tumbuh 5,61% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 24,43% (yoy).

Dari sisi margin, NIM tercatat turun 23 bps menjadi sebesar 4,57% dari 4,80% pada tahun sebelumnya. Penurunan NIM seiring dengan melambatnya pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 3,28% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,89% (yoy). Melambatnya pertumbuhan pendapatan bunga bersih

utamanya disebabkan pendapatan bunga yang meningkat sebesar 11,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan peningkatan beban bunga sebesar 21,55%. Penurunan dari pendapatan bunga juga berasal dari penempatan dari Bank lain seiring dengan meningkatnya penempatan Bank pada SRBI.

Selain itu, efisiensi Bank Umum juga tercatat sedikit menurun tecermin dari rasio BOPO perbankan yang meningkat 134 bps dari 77,34% menjadi 78,68%. Beban operasional tercatat tumbuh melambat, dari 17,69% (yoy) menjadi 13,98% (yoy), namun di sisi lain pendapatan operasional juga tumbuh melambat menjadi 12,03% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 19,41% (yoy), sehingga secara umum membuat BOPO meningkat.

#### 1.5 Permodalan Bank Umum

Secara umum pada periode Juni 2024, kondisi permodalan perbankan masih cukup solid tecermin meskipun sedikit turun, yaitu dari nilai CAR sebesar 26,09%, turun 106 bps dari tahun lalu sebesar 27,16%. Penurunan nilai CAR tersebut didorong oleh pertumbuhan ATMR yang tumbuh 11,51% (yoy) dan melampaui pertumbuhan modal.

Pertumbuhan ATMR utamanya dipengaruhi oleh kenaikan ATMR Kredit dan Pasar yang tumbuh cukup tinggi masing-masing sebesar 10,86% dan 96,42% (yoy). Pertumbuhan ATMR Kredit seiring dengan penyaluran kredit yang tumbuh 12,36%, sedangkan pertumbuhan ATMR Pasar dipengaruhi adanya penyesuaian perhitungan ATMR pada tahun 2024. Sementara itu, modal tumbuh 7,14% (yoy) cenderung melambat dari tahun lalu yang tumbuh 8,50% (yoy).

**Tabel 6 Rasio Keuangan Bank Umum**

Indikator	2023		2024		qtq		yoy	
	Jun	Mar	Jun	Mar '24	Jun '24	Jun '23	Jun '24	
<b>CAR (%)</b>	<b>27,16</b>	<b>25,96</b>	<b>26,09</b>	<b>(169)</b>	<b>13</b>	<b>250</b>	<b>(107)</b>	
BUK	27,24	25,98	26,13	(177)	15	256	(111)	
BUS	25,35	25,66	25,29	25	(37)	208	(6)	
<b>ROA (%)</b>	<b>2,73</b>	<b>2,62</b>	<b>2,66</b>	<b>(12)</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>(7)</b>	
BUK	2,76	2,65	2,69	(13)	4	38	(7)	
BUS	2,08	2,03	2,06	15	3	4	(2)	
<b>NIM / NOM (%)</b>	<b>4,80</b>	<b>4,59</b>	<b>4,57</b>	<b>(22)</b>	<b>(2)</b>	<b>11</b>	<b>(23)</b>	
BUK	4,90	4,68	4,66	(24)	(2)	12	(24)	
BUS	2,77	2,73	2,71	18	(2)	17	(6)	
<b>BOPO (%)</b>	<b>77,34</b>	<b>80,05</b>	<b>78,68</b>	<b>113</b>	<b>(137)</b>	<b>(112)</b>	<b>134</b>	
BUK	77,39	80,16	78,77	122	(139)	(107)	138	
BUS	76,02	76,89	76,27	(142)	(62)	(251)	25	
<b>NPL / NPF Gross (%)</b>	<b>2,44</b>	<b>2,25</b>	<b>2,26</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>(42)</b>	<b>(18)</b>	
BUK	2,44	2,27	2,28	8	1	(43)	(16)	
BUS	2,36	2,04	2,04	(6)	-	(27)	(32)	
<b>NPL / NPF Net (%)</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,78</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>(3)</b>	<b>1</b>	
BUK	0,78	0,78	0,79	6	1	(2)	1	
BUS	0,68	0,64	0,67	1	3	(14)	(1)	
<b>LDR / FDR (%)</b>	<b>82,76</b>	<b>84,23</b>	<b>85,74</b>	<b>40</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>298</b>	
BUK	82,84	84,52	85,95	41	143	121	311	
BUS	81,25	79,26	82,12	20	286	730	87	
<b>AL/DPK (%)</b>	<b>26,73</b>	<b>27,18</b>	<b>25,37</b>	<b>(155)</b>	<b>(181)</b>	<b>(326)</b>	<b>(136)</b>	
BUK	26,95	27,03	25,17	(162)	(186)	(322)	(178)	
BUS	22,87	29,76	28,71	(31)	(105)	(424)	584	
<b>AL/NCD (%)</b>	<b>119,05</b>	<b>121,05</b>	<b>112,33</b>	<b>(602)</b>	<b>(872)</b>	<b>(1.430)</b>	<b>(672)</b>	
BUK	119,38	119,86	111,04	(627)	(882)	(1.416)	(834)	
BUS	112,37	142,96	136,52	(180)	(644)	(1.950)	2.415	

Sumber: SPI Juni 2024

**Tabel 7 Rasio Permodalan dan Rentabilitas Bank Umum**

Rasio	KBMI 1			KBMI 2		
	Jun '23	Mar '24	Jun '24	Jun '23	Mar '24	Jun '24
CAR	31.93%	32.55%	32.14%	35.66%	37.08%	36.63%
ROA	1.42%	0.76%	0.71%	1.53%	2.12%	2.06%
BOPO	87.46%	92.62%	93.24%	93.77%	91.42%	89.63%
NIM	4.92%	4.39%	4.44%	4.18%	4.20%	4.27%
Rasio	KBMI 3			KBMI 4		
	Jun '23	Mar '24	Jun '24	Jun '23	Mar '24	Jun '24
CAR	25.22%	25.32%	24.44%	23.80%	21.94%	22.78%
ROA	1.92%	1.87%	1.72%	3.76%	3.54%	3.73%
BOPO	78.47%	79.59%	81.33%	64.03%	71.81%	70.21%
NIM	3.82%	3.65%	3.59%	5.42%	5.19%	5.15%

Sumber: SPI Juni 2024

**Tabel 8 Komponen ATMR Bank Umum**

Komponen ATMR (Rp T)	Jun '22	Mar '24	Jun '24	yoy	
				Jun'23	Jun '24
ATMR Kredit	5,380	6,202	6,375	6.89%	10.86%
ATMR Operasional	1,015	556	556	-37.31%	-12.61%
ATMR Pasar	82	188	186	15.09%	96.42%
<b>Total ATMR</b>	<b>6,470</b>	<b>6,938</b>	<b>7,117</b>	<b>0.08%</b>	<b>9.91%</b>

Sumber: OJK

## Overview Kinerja BPR dan BPRS

Fungsi intermediasi BPR dan BPRS secara umum masih dalam kondisi yang cukup baik tecermin dari kredit/pembiayaan dan DPK yang masih tumbuh meskipun melambat. Aset BPR dan BPRS tumbuh namun melambat sebesar 6,20% (yoy), seiring dengan perlambatan DPK BPR dan BPRS yang juga masih tumbuh 7,01% (yoy). Kredit/pembiayaan BPR dan BPRS juga masih tumbuh 7,17% (yoy), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 9 Perkembangan Kinerja BPR dan BPRS**

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Jun '23	Mar '24	Jun '24	Mar '24	Jun '24	Jun '23	Jun '24
<b>Total Aset (Rp Miliar)</b>	<b>206,554</b>	<b>216,737</b>	<b>219,356</b>	<b>-0.65%</b>	<b>1.21%</b>	<b>8.80%</b>	<b>6.20%</b>
BPR	185,702	193,992	196,338	-0.51%	1.21%	7.89%	5.73%
BPRS	20,853	22,745	23,018	-1.87%	1.20%	17.71%	10.38%
<b>Kredit/Pembiayaan (Rp milyar)</b>	<b>151,695</b>	<b>161,905</b>	<b>162,574</b>	<b>2.59%</b>	<b>0.41%</b>	<b>11.10%</b>	<b>7.17%</b>
BPR	135,751	144,210	144,597	2.43%	0.27%	9.97%	6.52%
BPRS	15,944	17,696	17,977	3.94%	1.59%	21.73%	12.75%
<b>DPK (Rp Miliar)</b>	<b>144,496</b>	<b>152,781</b>	<b>154,631</b>	<b>-0.26%</b>	<b>1.21%</b>	<b>9.03%</b>	<b>7.01%</b>
BPR	130,614	137,662	139,341	-0.18%	1.22%	8.30%	6.68%
BPRS	13,882	15,119	15,290	-0.99%	1.13%	16.48%	10.14%
<b>Tabungan</b>	<b>42,990</b>	<b>45,220</b>	<b>46,126</b>	<b>-5.02%</b>	<b>2.00%</b>	<b>6.76%</b>	<b>7.29%</b>
BPR	38,926	40,690	41,549	-4.52%	2.11%	6.36%	6.74%
BPRS	4,064	4,530	4,577	-9.25%	1.04%	10.79%	12.61%
<b>Deposito</b>	<b>101,506</b>	<b>107,561</b>	<b>108,505</b>	<b>1.88%</b>	<b>0.88%</b>	<b>10.03%</b>	<b>6.90%</b>
BPR	91,687	96,971	97,792	1.76%	0.85%	9.14%	6.66%
BPRS	9,818	10,590	10,713	3.02%	1.16%	19.01%	9.11%

Sumber: OJK

### 1. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Pada periode Juni 2024, kinerja BPR masih menunjukkan kondisi yang cukup positif. DPK tetap mampu tumbuh sejalan dengan penyaluran kredit yang mencatatkan pertumbuhan walaupun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang masih

tinggi di atas *threshold* meskipun tercatat sedikit turun dibanding tahun lalu. Namun demikian, kinerja BPR perlu diperhatikan seiring dengan penurunan laba dan efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya, yang juga disertai adanya peningkatan risiko kredit pada periode laporan.

Tabel 10 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Jun '23	Mar'24	Jun'24	Mar '24	Jun'24	Jun '23	Jun'24
<b>Total Aset (Rp milyar)</b>	185,702	193,992	196,338	-0.51%	1.21%	7.89%	5.73%
<b>Kredit (Rp milyar)</b>	135,751	144,210	144,597	2.43%	0.27%	9.97%	6.52%
<b>Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)</b>	130,614	137,662	139,341	-0.18%	1.22%	8.30%	6.68%
- Tabungan (Rp milyar)	38,926	40,690	41,549	-4.52%	2.11%	6.36%	6.74%
- Deposito (Rp milyar)	91,687	96,971	97,792	1.76%	0.85%	9.14%	6.66%
<b>CAR (%)</b>	31.76	32.60	31.75	262	(85)	(45)	(1)
<b>ROA (%)</b>	1.54	0.89	1.09	(11)	20	(14)	(45)
<b>BOPO (%)</b>	85.92	91.35	89.53	198	(182)	82	361
<b>NPL Gross (%)</b>	9.27	10.70	11.39	83	69	147	212
<b>NPL Net (%)</b>	6.37	7.33	8.19	82	86	123	182
<b>LDR (%)</b>	77.34	77.37	77.02	81	(35)	167	(32)
<b>CR (%)</b>	12.74	12.45	13.47	(120)	102	(13)	73

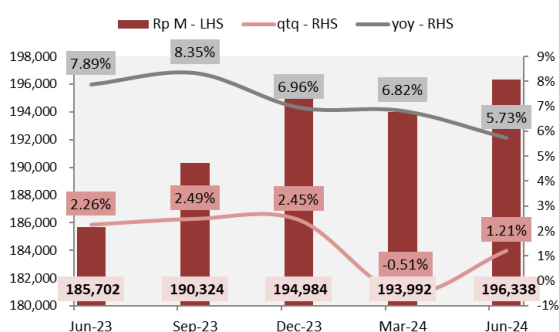
Sumber: SPI, Juni 2024

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

## 2.1 Aset BPR

Aset BPR pada Juni 2024 tumbuh 5,73% (yoy), cenderung melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,89% (yoy). Perlambatan pertumbuhan aset tersebut sejalan dengan DPK yang juga tumbuh melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 15 Perkembangan Aset BPR



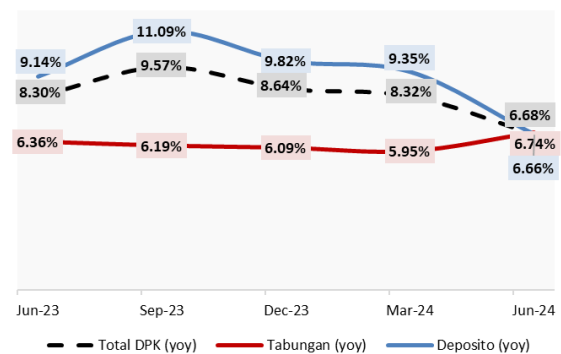
Sumber: SPI, Juni 2024

## 2.2 Sumber Dana BPR

DPK BPR pada Juni 2024 tumbuh 6,68% (yoy) menjadi Rp139,341 triliun, melambat dibandingkan pada Juni 2023 yang tercatat

tumbuh 8,30% (yoy). Perlambatan DPK tersebut didorong oleh komponen Deposito yang tumbuh 6,66% (yoy), namun turun dari pertumbuhan periode tahun sebelumnya yang mampu mencapai 9,14% (yoy). Sementara itu, komponen Tabungan menunjukkan kinerja positif dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,74% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 6,36% (yoy). Di sisi lain, suku bunga tabungan justru sedang dalam tren penurunan, total turun 11 bps dari tahun sebelumnya menjadi 2,20% dari 2,31% pada Juni 2023.

Grafik 16 Perkembangan DPK BPR



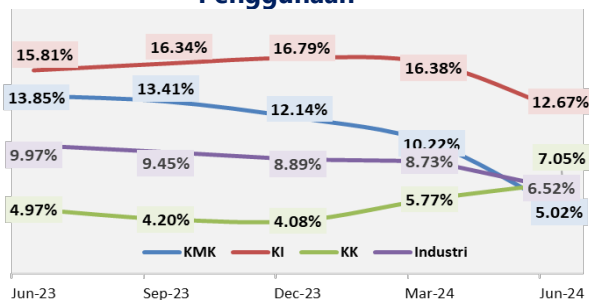
Sumber: SPI Juni 2024

## 2.3 Penggunaan Dana BPR

Kredit BPR pada Juni 2024 tumbuh 6,52% (yoy), atau melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 9,97% (yoy). Ditinjau dari jenis penggunaan, mayoritas kredit BPR disalurkan sebagai kredit produktif (56,41%), yang terdiri dari Kredit Modal Kerja (KMK) (47,87%) dan Kredit Investasi (KI) (8,54%), sedangkan sisanya disalurkan sebagai Kredit Konsumsi (KK) (43,59%).

Pertumbuhan kredit BPR ditopang oleh semua jenis penggunaan. KMK tumbuh sebesar 5,02% (yoy), yang mengalami perlambatan dari sebelumnya 13,85% (yoy). KI tercatat tumbuh sebesar 12,67% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan Juni 2023 yang mencapai 15,81% (yoy). Di sisi lain, kredit konsumtif tumbuh positif sebesar 7,05% (yoy), melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 4,97% (yoy).

**Grafik 17 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan**



Sumber: SPI, Juni 2024

## 2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada Juni 2024 masih tetap terjaga dengan baik tecermin dari aset, DPK, dan pembiayaan BPRS yang tetap tumbuh walaupun melambat dibanding tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 10,38% (yoy), 12,75% (yoy), dan 10,14% (yoy). Selain itu, perlu diperhatikan risiko pembiayaan BPRS tercatat sedikit meningkat

## 2.4 Rentabilitas BPR

Rentabilitas BPR pada Juni 2024 turun dibanding tahun sebelumnya, tecermin dari rasio ROA sebesar 1,09% atau turun 45 bps dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,54%.

Seiring dengan penurunan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat menurun, tecermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 361 bps menjadi 89,53% dari 85,92% pada tahun sebelumnya. Peningkatan rasio BOPO disebabkan oleh kenaikan beban operasional yang tercatat tumbuh sebesar 9,99% (yoy) dan melampaui pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 5,55% (yoy).

## 2.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi sebesar 31,75%, jauh di atas KPMM dan sedikit menurun 1 bps dari tahun sebelumnya sebesar 31,76%. Penurunan CAR diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan modal, sejalan dengan turunnya laba pada periode laporan.

Tabel 11 Indikator Umum BPRS

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Jun '23	Mar '24	Jun '24	Jun '23	Jun '24	Jun '23	Jun '24
Jumlah BPRS	171	174	173		(1)		2
Total Aset (Rp Miliar)	20,853	22,745	23,018	2.68%	1.20%	17.71%	10.38%
Pembiayaan (Rp Miliar)	15,944	17,696	17,977	3.90%	1.59%	21.73%	12.75%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	13,882	15,119	15,290	2.12%	1.13%	16.48%	10.14%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	4,064	4,530	4,577	-1.49%	1.04%	10.79%	12.61%
- Deposito iB (Rp Miliar)	9,818	10,590	10,713	3.69%	1.16%	19.01%	9.11%
CAR (%)	23.86	23.57	23.09	108	(48)	34	(77)
ROA (%)	2.10	1.63	1.54	40	(9)	43	(56)
BOPO (%)	84.31	93.82	90.91	(138)	(291)	(266)	660
NPF Gross (%)	7.48	7.44	8.23	36	79	22	75
FDR (%)	114.85	117.04	117.58	197	54	495	273

Sumber: SPS Juni 2024

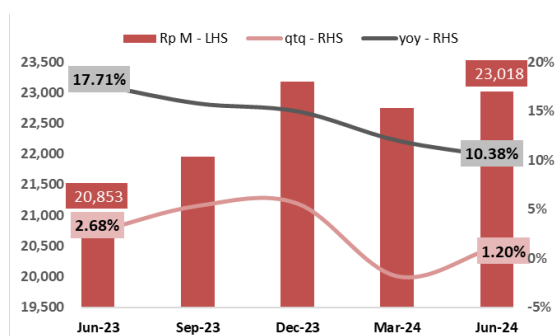
Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

### 3.1 Aset BPRS

Pada Juni 2024, aset BPRS tercatat sebesar Rp23,02 triliun atau tumbuh 10,38% (yoy), melambat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 17,71% (yoy).

Sebagian besar BPRS memiliki total aset >Rp10 Miliar (165 BPRS dari 173 BPRS). Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya di mana jumlah BPRS dengan total aset pada kelompok ini sebanyak 163 BPRS.

Grafik 18 Tren Aset BPRS



Sumber: SPS Juni 2024

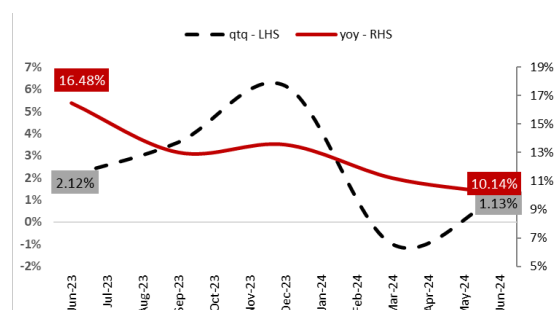
### 3.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar Rp15,29 triliun. Pada Juni 2024, DPK BPRS tumbuh 10,14% (yoy), melambat

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 16,48% (yoy).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB akad *Mudharabah* yakni 70,07% yang sebagian besar dalam tenor 12 bulan (41,91% atau senilai Rp6,41 triliun). Secara keseluruhan deposito iB BPRS tumbuh 9,11% (yoy) melambat dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh 19,01% (yoy). Di sisi lain, tabungan iB BPRS justru tumbuh 12,61% (yoy) meningkat dari tahun lalu yang tumbuh 10,79% (yoy), meskipun tingkat bagi hasil tabungan iB justru turun 1 bps dari tahun lalu menjadi 1,62%.

Grafik 19 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS Juni 2024

### 3.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada Juni, pembiayaan BPRS mencapai Rp17,98 triliun, tumbuh sebesar 12,75% (yoy) melambat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh 21,73% (yoy).

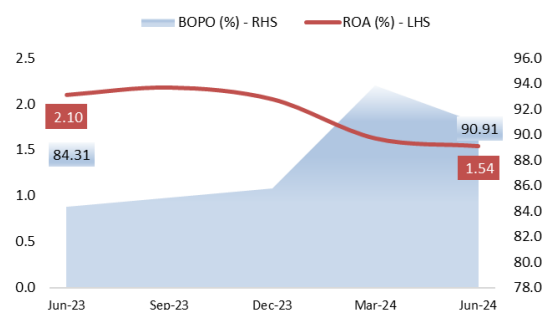
Berdasarkan sektor ekonomi, pembiayaan BPRS mayoritas disalurkan ke sektor konstruksi (16,30%) dan perdagangan (13,96%). Pembiayaan ke sektor konstruksi tumbuh tinggi 41,66% (yoy), meskipun melambat dari tahun sebelumnya yang juga tumbuh tinggi 48,25% (yoy). Sedangkan sektor perdagangan justru berkontraksi -6,66% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 35,66% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi pembiayaan produktif sebesar 58,60% di mana pembiayaan modal kerja (porsi 47,65%) masih tumbuh cukup tinggi 13,43% (yoy), meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat tumbuh 36,14% (yoy). Sejalan dengan pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi juga tumbuh melambat sebesar 5,58% (yoy) dibandingkan tahun lalu tumbuh 11,47% (yoy). Di sisi lain, pembiayaan konsumtif tumbuh meningkat 14,02% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 11,04% (yoy).

### 3.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS mengalami penurunan yang tecermin dari rasio ROA turun 56 bps menjadi 1,54% dari 2,10% pada tahun sebelumnya, disebabkan oleh melambatnya laba BPRS. Penurunan rentabilitas sejalan dengan pemburukan efisiensi BPRS tecermin dari rasio BOPO yang meningkat tinggi 660 bps menjadi 90,91%, jauh meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 84,31%.

**Grafik 20 Tren ROA dan BOPO BPRS**



Sumber: SPS Juni 2024

### 3.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih cukup solid dengan CAR sebesar 23,09%, meskipun turun 77 bps dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 23,86%. Peningkatan CAR didorong oleh pertumbuhan modal BPRS yang lebih besar dari pertumbuhan ATMR BPRS. CAR BPRS tersebut masih cukup tinggi untuk dapat menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS, atau masih jauh di atas *threshold*.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# 3 Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

# 3 Kredit/Pembiayaan Perbankan

Pada triwulan II-2024, perkembangan kredit/pembiayaan perbankan (Bank Umum) masih cukup baik didorong oleh aktivitas usaha yang masih berada pada level ekspansif meskipun sedikit melambat dan konsumsi rumah tangga utamanya golongan menengah atas. Dilihat dari kenaikan nominal kredit secara tahunan, kredit/pembiayaan Bank Umum pada periode ini utamanya didorong oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, perantara keuangan, serta rumah tangga – pemilikan rumah tinggal. Sementara pada BPR dan BPRS kredit/pembiayaan mengalami perlambatan utamanya pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel namun sektor *real estate* tumbuh relatif tinggi menahan perlambatan yang semakin dalam.

## A. Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS)

### 1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran kredit/pembiayaan Bank Umum (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan II-2024 masih tumbuh baik sebesar 12,36% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 7,76% (yoy). Secara triwulanan, kredit tumbuh 3,23% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,18% (qtq). Pertumbuhan kredit secara tahunan utamanya didorong oleh meningkatnya penyaluran kredit kepada debitur korporasi.

Porsi terbesar penyaluran kredit bank umum masih kepada sektor bukan lapangan usaha lainnya - rumah tangga (porsi: 23,29%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 10,64% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,30% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal utamanya tipe 22 s.d. 70 yang tumbuh 12,76% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7,22% (yoy), dan rumah tinggal tipe di atas 70 yang tumbuh 20,00% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 14,86%

(yoy). Meskipun secara umum kredit rumah tangga tumbuh, namun demikian beberapa subsektor tercatat menurun, di antaranya rumah tangga untuk pemilikan kendaraan bermotor justru tercatat melambat 6,33% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 2 digit 17,48% (yoy).

Sementara itu untuk kredit produktif, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 15,92%) tumbuh 9,87% (yoy), meningkat setelah tahun sebelumnya tumbuh 3,88% (yoy). Pertumbuhan sektor ini didorong di antaranya oleh subsektor Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau yang tumbuh tinggi 33,68% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 7,17 (yoy), didorong oleh perdagangan dalam negeri beras yang tumbuh 75,38% (yoy). Selain itu, sektor perdagangan meningkat juga didorong oleh pertumbuhan perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenis yang tumbuh

tinggi 70,23% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -25,99% (yoy).

Sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit kedua terbesar yaitu sektor industri pengolahan (porsi 15,59%) juga tercatat meningkat. Pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor ini tumbuh 9,94% (yoy), meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 1,70% (yoy). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh subsektor industri makanan, utamanya industri minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani yang tumbuh 27,54% (yoy) dari terkontraksi -12,36% (yoy) pada Juni 2023, didorong oleh industri minyak goreng dari biji kelapa sawit mentah. Selain itu subsektor minuman dan subsektor industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya juga tumbuh didorong oleh industri bubur kertas (pulp), kertas dan karton/*paper board* yang juga tumbuh tinggi 25,03% (yoy) dari sebelumnya 6,59% (yoy).

Per Juni 2024, pertumbuhan penyaluran kredit kepada industri pengolahan yang terkait hilirisasi, antara lain untuk subsektor industri pengolahan kelapa sawit, logam non besi, dan manufaktur elektronik meningkat sebesar 27,09% (yoy). Jika dibandingkan dengan posisi Juni 2023, pertumbuhan penyaluran kredit pada subsektor yang sama terkontraksi sebesar -6,72% (yoy). Peningkatan yang cukup signifikan pada pemberian kredit untuk industri yang mengolah produk hilirisasi kelapa sawit dan bahan tambang ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong industri pengolahan yang memberikan nilai tambah. Secara porsi penyaluran kredit, persentase penyaluran kredit kepada subsektor pengolahan kelapa sawit, logam non besi, dan manufaktur elektronik adalah sebesar

17,78% terhadap total kredit kepada industri pengolahan dan 2,77% terhadap total penyaluran kredit secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan kontribusi penyaluran kredit kepada subsektor industri pengolahan yang berkaitan dengan hilirisasi cukup signifikan, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan kontribusi perbankan terhadap sektor ini.

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 6,88% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 8,54% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7,56% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor pertanian dan perburuan, utamanya pada subsektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 11,80% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 1,87% (yoy).

Penyaluran kredit ke sektor perantara keuangan juga memiliki porsi yang cukup besar (5,75%). Sektor ini tercatat tumbuh tinggi pada periode laporan, yaitu 28,54% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang juga sudah tumbuh tinggi 24,03% (yoy). Pertumbuhan di sektor ini tetap tumbuh tinggi meskipun melambat yang didorong oleh subsektor perantara keuangan lainnya (non-bank) selain *leasing* yang tumbuh tinggi 63,30% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 29,56% (yoy).

Sektor ekonomi pertambangan dan penggalian (porsi 4,37%) juga tercatat tumbuh tinggi 28,94% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 20,02% (yoy). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh subsektor pertambangan batubara, penggalian gambut dan gasifikasi batubara

yang tumbuh 68,95% (yoy) dari 33,65% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan sektor ini juga didorong oleh pertumbuhan pertambangan logam dan biji timah yang tumbuh tinggi 52,53% (yoy) dari 7,08% (yoy) pada Juni 2023.

Penyaluran kredit ke sektor administrasi pemerintahan mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada periode laporan, yaitu 60,49% (yoy) meskipun dengan porsi yang cukup kecil (1,03%) setelah tahun sebelumnya tumbuh 41,19%. Pertumbuhan di sektor ini didorong oleh subsektor administrasi hubungan luar negeri, pertahanan dan

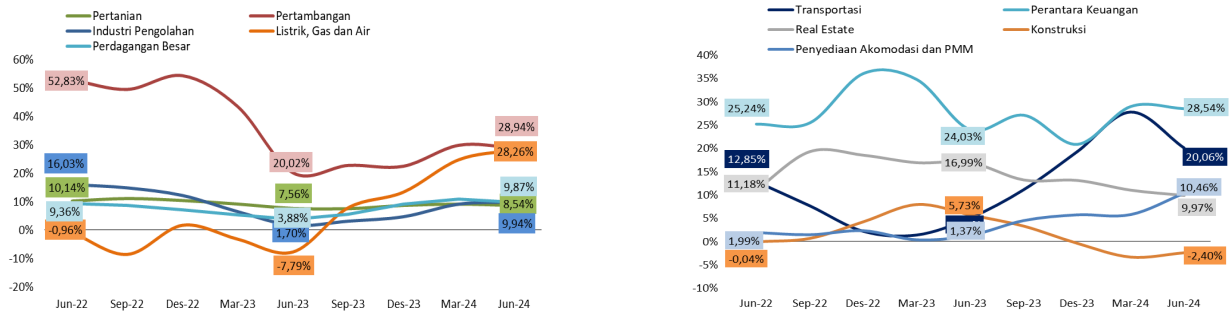
keamanan yang tumbuh 85,01% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 64,21% (yoy).

Meskipun sebagian besar sektor mengalami peningkatan, terdapat beberapa sektor yang justru melambat dibandingkan tahun sebelumnya, di antaranya sektor konstruksi (porsi 5,26%) yang justru berkontraksi -2,40% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 5,73% (yoy). Subsektor ini berkontraksi disebabkan oleh berkontraksinya subsektor konstruksi bangunan sipil sebesar -7,30% (yoy) dari tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 2 digit sebesar 11,90% (yoy).

**Tabel 12 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi**

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)		qtq		yoy		Porsi	
		Jun '23	Mar '24	Jun '24	Mar '24	Jun '24	Jun '23		Jun '24
	<b>Lapangan Usaha / Sektor Produktif</b>	<b>4.827,74</b>	<b>5.263,79</b>	<b>5.452,71</b>	<b>2,08%</b>	<b>3,59%</b>	<b>7,28%</b>	<b>12,95%</b>	<b>72,91%</b>
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	473,71	504,08	514,16	1,29%	2,00%	7,56%	8,54%	6,88%
2	Perikanan	20,15	20,73	20,76	-0,31%	0,15%	4,27%	3,06%	0,28%
3	Pertambangan dan Penggalian	253,17	307,84	326,44	5,98%	6,04%	20,02%	28,94%	4,37%
4	Industri Pengolahan	1.060,25	1.128,54	1.165,66	1,00%	3,29%	1,70%	9,94%	15,59%
5	Listrik, gas dan air	157,30	188,93	201,75	2,70%	6,79%	-7,79%	28,26%	2,70%
6	Konstruksi	403,11	390,06	393,44	-1,27%	0,86%	5,73%	-2,40%	5,26%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.083,33	1.166,72	1.190,28	2,42%	2,02%	3,88%	9,87%	15,92%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	122,92	129,88	135,77	-0,70%	4,53%	1,37%	10,46%	1,82%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	343,19	387,44	412,01	3,75%	6,34%	5,11%	20,06%	5,51%
10	Perantara Keuangan	334,37	410,52	429,80	11,05%	4,70%	24,03%	28,54%	5,75%
11	Real Estate	334,33	354,26	367,65	-0,51%	3,78%	16,99%	9,97%	4,92%
12	Administrasi Pemerintahan	48,21	66,28	77,37	1,52%	16,73%	41,19%	60,49%	1,03%
13	Jasa Pendidikan	15,70	17,12	17,33	1,43%	1,25%	10,82%	10,36%	0,23%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34,45	37,98	39,55	1,53%	4,11%	15,63%	14,79%	0,53%
15	Jasa Kemasyarakatan	139,53	149,49	156,93	-5,72%	4,98%	30,90%	12,47%	2,10%
16	Jasa Perorangan	4,00	3,89	3,78	-2,74%	-2,90%	1,38%	-5,53%	0,05%
17	Badan Internasional	0,02	0,02	0,01	-6,09%	-21,68%	-94,09%	-36,21%	0,00%
	<b>Bukan Lapangan Usaha / Sektor Konsumtif</b>	<b>1.828,27</b>	<b>1.980,84</b>	<b>2.025,69</b>	<b>2,44%</b>	<b>2,26%</b>	<b>9,03%</b>	<b>10,80%</b>	<b>27,09%</b>
18	Rumah Tangga	1.574,03	1.706,56	1.741,55	2,55%	2,05%	9,30%	10,64%	23,29%
	- Pemilikan Rumah Tinggal	611,80	637,90	697,27	-3,31%	9,31%	10,82%	13,97%	9,32%
	- Pemilikan Flat atau Apartemen	28,26	29,63	30,32	0,27%	2,32%	4,76%	7,26%	0,41%
	- Pemilikan Ruko atau Rukan	20,78	70,11	28,21	211,95%	-59,77%	-1,22%	35,75%	0,38%
	- Pemilikan Kendaraan Bermotor	125,26	134,79	133,19	2,57%	-1,19%	17,48%	6,33%	1,78%
	- Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya	11,84	16,35	18,05	13,74%	10,43%	22,36%	52,47%	0,24%
	- Keperluan Rumah Tangga Lainnya	776,09	817,77	834,52	1,38%	2,05%	7,22%	7,53%	11,16%
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	254,24	274,28	284,14	1,79%	3,59%	7,45%	11,76%	3,80%
	<b>Industri</b>	<b>6.656,02</b>	<b>7.244,64</b>	<b>7.478,40</b>	<b>2,18%</b>	<b>3,23%</b>	<b>7,76%</b>	<b>12,36%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: SPI Juni 2024

**Grafik 21 Tren Pertumbuhan Kredit Produktif per Sektor Ekonomi**

Sumber: SPI Juni 2024, diolah

## 2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)

Pada triwulan II-2024, distribusi penyaluran kredit/pembiayaan (selanjutnya disebut kredit) Bank Umum berdasarkan wilayah penyebaran (spasial) masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera dengan porsi masing-masing sebesar 68,73% dan 13,42%. Penyaluran kredit di wilayah Jawa tercatat tumbuh 13,32% (yoy), meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,98% (yoy). Selanjutnya, penyaluran kredit di wilayah Sumatera juga tumbuh meningkat dari 5,05% (yoy) pada triwulan II-2023 menjadi 7,56% (yoy).

Penyaluran kredit di wilayah Jawa didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta dengan porsi 47,96% dan mengalami peningkatan pertumbuhan kredit yaitu sebesar 19,31% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 7,86% (yoy). Penyaluran kredit di provinsi tersebut secara nominal meningkat sebesar Rp398,97 triliun. Peningkatan kredit di wilayah Provinsi DKI Jakarta utamanya didorong oleh sektor perantara keuangan yang tumbuh 29,42% (yoy) seiring kenaikan nominal penyaluran kredit sebesar Rp90,32 triliun. Selain Provinsi DKI Jakarta, peningkatan kredit di wilayah Jawa juga didorong oleh Provinsi Jawa Barat dengan porsi 18,74%. Pertumbuhan kredit di Provinsi Jawa Barat meningkat dari 6,95%

(yoy) menjadi 11,35% (yoy). Penyaluran kredit di provinsi tersebut secara nominal meningkat sebesar Rp98,2 triliun. Adapun peningkatan kredit di Provinsi Jawa Barat utamanya didorong oleh sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan yang meningkat sebesar Rp12,68 triliun atau tumbuh dari 19,57% (yoy) menjadi 77,87% (yoy).

Penyaluran kredit di wilayah Sumatera didominasi oleh provinsi Sumatera Utara dengan porsi 26,71%. Penyaluran kredit di Sumatera Utara secara nominal naik Rp20,35 triliun atau tumbuh positif sebesar 8,22% (yoy) dari yang sebelumnya terkontraksi -2,44% (yoy) pada Juni 2023. Peningkatan pertumbuhan kredit di Sumatera Utara utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan yang naik Rp6,46 triliun atau tumbuh 13,11% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar -22,09% (yoy). Selain Provinsi Sumatera Utara, peningkatan kredit di wilayah Sumatera juga didorong oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan porsi 16,67%. Pertumbuhan kredit di Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari 7,97% (yoy) menjadi 12,53% (yoy) seiring kenaikan nominal penyaluran kredit sebesar Rp18,64 triliun. Adapun peningkatan kredit di Provinsi Sumatera Selatan utamanya didorong oleh sektor pertanian, perburuan,

dan kehutanan yang meningkat dari 3,79% (yoy) menjadi 18,12% (yoy).

Penyaluran kredit di wilayah Sulawesi (porsi: 5,31%) tumbuh meningkat dari 9,64% (yoy) menjadi 11,98% (yoy). Penyaluran kredit di pulau ini sebagian besar disalurkan di Provinsi Sulawesi Selatan (porsi: 43,90%) dan tumbuh meningkat dari 8,81% (yoy) menjadi 9,52% (yoy) seiring kenaikan nominal penyaluran kredit sebesar Rp15,15 triliun. Peningkatan kredit di provinsi tersebut utamanya didorong sektor rumah tangga yang meningkat Rp5,86 triliun sehingga mendorong pertumbuhan kredit dari 8,14% (yoy) menjadi 11,16% (yoy). Selain itu, peningkatan nominal kredit di wilayah Sulawesi juga didorong oleh Provinsi Sulawesi Tengah (porsi: 20,87%) yang tumbuh 23,67% (yoy) lebih tinggi daripada Juni 2023 sebesar 18,71% (yoy) seiring kenaikan penyaluran kredit sebesar Rp15,87 triliun. Sejalan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, peningkatan kredit di Sulawesi Tengah utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh 99,57% (yoy) dari -2,59% (yoy) seiring kenaikan nominal penyaluran kredit sebesar Rp9,62 triliun. Pertumbuhan kredit pada sektor industri pengolahan di Sulawesi Tengah utamanya didorong oleh subsektor industri pengolahan barang-barang dari batubara, industri logam dasar besi dan baja, serta industri logam dasar bukan besi.

Penyaluran kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (porsi: 3,55%) tumbuh meningkat dari 4,15% (yoy) menjadi 15,70% (yoy). Penyaluran kredit di wilayah ini didominasi oleh Provinsi Bali (porsi: 44,78%) yang tumbuh 10,07% (yoy) meningkat dari 2,43% (yoy) pada Juni 2023 seiring kenaikan nominal penyaluran kredit sebesar Rp10,88 triliun. Peningkatan

kredit di provinsi tersebut utamanya didorong oleh sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang semula berkontraksi -6,12% (yoy) menjadi 11,38% (yoy) seiring kenaikan nominal penyaluran kredit sebesar Rp2,33 triliun. Hal ini merupakan juga indikasi positif karena menandakan pemulihan ekonomi pariwisata di Provinsi Bali. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan kredit di wilayah Bali Nusa Tenggara juga didorong oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (porsi: 34,97%) yang tumbuh 26,31% (yoy) dari -0,93% (yoy) seiring kenaikan nominal penyaluran kredit sebesar Rp19,34 triliun. Peningkatan kredit di provinsi tersebut utamanya didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh hingga 66,67% (yoy) dari -24,74% (yoy) seiring kenaikan nominal penyaluran kredit sebesar Rp12,12 triliun. Sebagaimana diketahui, selama ini Provinsi Nusa Tenggara Barat berfokus pada pengelolaan potensi sektor pertambangan sebagai pondasi ekonomi di provinsi tersebut.

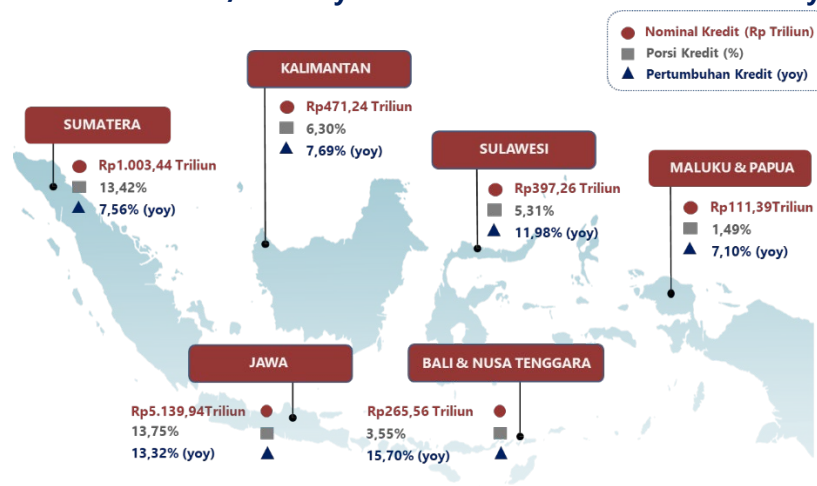
Tidak hanya itu saja, penyaluran kredit di wilayah Papua dan Maluku (porsi: 1,49%) juga tumbuh meningkat dari 5,66% (yoy) menjadi 7,10% (yoy). Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi di wilayah tersebut didorong oleh Provinsi Maluku Utara (porsi: 23,17%). Penyaluran kredit di provinsi ini tumbuh 16,33% (yoy) meningkat daripada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,75% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit di Maluku Utara didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh 78,24% (yoy) dari -41,64% (yoy) seiring dengan meningkatnya penyaluran kredit pada sektor tersebut sebesar Rp1,60 triliun. Pertumbuhan kredit pada sektor pertambangan di Maluku Utara

utamanya didorong oleh subsektor pertambangan bijih nikel yang tumbuh signifikan sebesar 582,79% (yoy) dari yang sebelumnya terkontraksi -82,69% (yoy). Sementara pertumbuhan kredit di Provinsi Papua (porsi: 38,02%) yang mendominasi penyaluran kredit di wilayah Papua dan Maluku justru melambat dari 8,38% (yoy) pada Juni 2023 menjadi 4,06% (yoy) meskipun secara nominal naik sebesar Rp1,65 triliun. Perlambatan kredit pada provinsi tersebut dipengaruhi oleh sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi yang terkontraksi -28,60% (yoy) dari 22,18% (yoy) seiring berkurangnya nominal penyaluran kredit sebesar Rp735,21 miliar. Sementara itu, sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan mencatatkan kenaikan nominal penyaluran kredit terbesar yaitu mencapai Rp702,48 miliar meskipun tumbuh melambat dari sebesar 61,65% (yoy) menjadi 12,92% (yoy). Penyaluran kredit sektor pertanian yang tumbuh pada periode laporan ditengarai merupakan bentuk

dukungan industri perbankan terhadap upaya Pemerintah Papua dalam menggalakkan pengembangan ekonomi hijau.

Di sisi lain, penyaluran kredit di wilayah Kalimantan justru tumbuh melambat yaitu dari 11,77% (yoy) menjadi 7,69% (yoy) meskipun porsinya hanya sebesar 6,30%. Penyaluran kredit di pulau ini sebagian besar disalurkan di Provinsi Kalimantan Timur dengan porsi 42,60% dan tumbuh 6,99% (yoy), melambat dari 15,60% (yoy) pada tahun lalu. Perlambatan kredit di Kalimantan Timur utamanya pada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan yang turun Rp1,92 triliun atau terkontraksi -4,86% (yoy) lebih dalam dari tahun lalu sebesar -0,76% (yoy). Tidak hanya itu, penyaluran kredit pada sektor perantara keuangan juga turun Rp155,86 miliar sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi dari 33,01% (yoy) menjadi -46,03% (yoy).

**Grafik 22 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi Proyek (Spasial)**



Sumber: LBUT, diolah

**Tabel 13 Porsi Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi Proyek (Spasial)**

No.	Sektor Ekonomi	Porsi					
		Pulau Jawa	Pulau Sumatera	Pulau Kalimantan	Pulau Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Papua dan Maluku
<b>Lapangan Usaha</b>							
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	3,48%	16,65%	24,36%	7,08%	5,44%	8,89%
2	Perikanan	0,19%	0,36%	0,34%	0,98%	0,46%	0,53%
3	Pertambangan dan Penggalian	2,82%	3,46%	14,97%	5,38%	13,17%	5,52%
4	Industri Pengolahan	17,21%	16,84%	6,43%	8,96%	3,97%	9,14%
5	Listrik, Gas, dan Air	2,73%	2,42%	1,62%	4,83%	1,76%	0,42%
6	Konstruksi	6,45%	2,50%	3,49%	3,07%	2,08%	2,28%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	15,68%	15,50%	13,25%	18,16%	20,74%	16,71%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	1,60%	1,37%	1,15%	1,53%	9,62%	2,10%
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	6,92%	2,47%	3,36%	1,23%	1,12%	2,81%
10	Perantara Keuangan	8,18%	0,24%	0,16%	0,28%	0,23%	0,25%
11	Real Estate	6,22%	2,11%	1,76%	2,27%	1,75%	1,31%
12	Administrasi Pemerintahan	1,31%	0,01%	0,04%	0,04%	0,01%	0,37%
13	Jasa Pendidikan	0,26%	0,22%	0,12%	0,17%	0,23%	0,02%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,57%	0,57%	0,13%	0,32%	0,78%	0,18%
15	Jasa Kemasyarakatan	2,26%	1,54%	1,65%	2,28%	2,45%	1,72%
16	Jasa Perorangan	0,04%	0,06%	0,03%	0,08%	0,10%	0,46%
17	Badan Internasional	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Bukan Lapangan Usaha Lainnya</b>							
19	Rumah Tangga	20,72%	29,51%	26,11%	34,84%	27,51%	40,84%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,37%	4,17%	1,04%	8,50%	8,59%	6,44%
<b>Total</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Ket: *Shading* hijau menunjukkan lima sektor dengan porsi terbesar di wilayah tersebut

Sumber: LBUT, diolah

### 3. Perkembangan Kredit/Pembiayaan UMKM

Pada triwulan II-2024, kredit UMKM tumbuh 5,68% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,34% (yoy). Porsi penyaluran kredit UMKM per Juni 2024 tercatat sebesar 19,68% terhadap total kredit bank umum.

Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 46,49%) yang tumbuh 2,54% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,75% (yoy) dan mendorong perlambatan pertumbuhan kredit UMKM. Selain itu, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (17,16%) tercatat tumbuh relatif tinggi sebesar 11,14% (yoy), walaupun juga melambat dari 18,37% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Meskipun kredit UMKM melambat, kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan rasio NPL di bawah *threshold* 5% yaitu sebesar 4,04%, sedikit naik dari tahun sebelumnya

sebesar 3,70%. Adapun kenaikan rasio NPL utamanya terjadi pada sektor *real estate* dan jasa perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,67% menjadi 4,62% serta sektor perikanan yang naik dari 3,83% menjadi 4,80%, dengan porsi NPL masing-masing sebesar 4,43% dan 1,40% dari total NPL UMKM. Sementara itu, terdapat perbaikan NPL kredit UMKM antara lain pada sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.

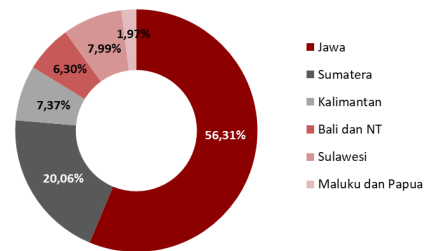
Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 56,31%, terutama di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, porsi kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) sebesar 23,63%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di provinsi Gorontalo sebesar 13,79% (yoy), meningkat

dari tahun lalu sebesar 11,21% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur sebagai wilayah dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar (15,00%), tumbuh 5,70% (yoy) walaupun melambat dari tahun sebelumnya sebesar 8,37% (yoy)

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (62,69%) yang tumbuh 4,75% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 8,42% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM kelompok bank BUSN dan BPD tumbuh masing-masing 5,23% (yoy) dan 15,88% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing 3,59% (yoy) dan

14,61% (yoy). Di sisi lain, kredit UMKM kelompok Bank Asing masih berkontraksi -13,68% (yoy) dan sudah membaik dibanding tahun sebelumnya yang berkontraksi -15,27% (yoy).

**Grafik 23 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM**



Sumber: SPI Juni 2024

**Tabel 14 Kredit/Pembiayaan UMKM berdasarkan Kelompok Bank**

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun' 23	Mar '24	Jun '24		Mar'24	Jun'24	Jun '23	Jun'24
BUMN	880.625	923.789	922.471	62,69%	0,69%	-0,14%	8,42%	4,75%
BUSN	413.376	435.577	435.015	29,56%	0,93%	-0,13%	3,59%	5,23%
BPD	98.404	108.786	114.034	7,75%	0,68%	4,82%	14,61%	15,88%
KCBLN	77	64	66	0,00%	9,94%	2,94%	-15,27%	-13,68%
<b>Total UMKM</b>	<b>1.392.481</b>	<b>1.468.216</b>	<b>1.471.586</b>	<b>100%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,23%</b>	<b>7,34%</b>	<b>5,68%</b>

Sumber: SPI Juni 2024

Terkait dengan kredit UMKM dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), menurut data dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, realisasi penyaluran KUR selama tahun 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp141,71 triliun (50,61% dari target tahun 2024 sebesar Rp280 triliun) dan diberikan kepada 2,39 juta debitur. KUR disalurkan oleh Bank dan Non-Bank.

Berdasarkan jenisnya, sebagian besar KUR disalurkan kepada KUR Mikro sebesar Rp95,14 triliun (67,14%), diikuti KUR Kecil Rp45,95 triliun (32,43%), KUR Super Mikro Rp599,25 miliar (0,42%), dan KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp16,50 miliar (0,01%).

## B. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS

### 1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

Kredit/pembiayaan BPR dan BPRS (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan II-2024 tumbuh 7,17% (yoy), melambat dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 11,10% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, salah satu kredit terbesar antara lain disalurkan ke sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel dengan porsi 21,42%. Kredit pada sektor ini hanya tumbuh sebesar 1,29% (yoy), melambat dari 14,33% (yoy) pada tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan perlambatan kredit BPR dan BPRS. Penyaluran pembiayaan terbesar kedua disalurkan ke sektor bukan lapangan usaha - rumah tangga (porsi 12,03%) tumbuh sebesar 11,74% (yoy), meningkat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 7,16% (yoy). Meskipun tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan tersebut belum dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit BPR dan BPRS secara umum.

Sektor konstruksi (porsi 6,95%) meskipun tumbuh melambat namun masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 21,33% (yoy) dari tahun lalu tumbuh 32,69% (yoy). Sektor pertanian, perburuhan dan kehutanan (porsi 6,25%) juga tercatat masih tumbuh 7,65% (yoy), meskipun juga melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,22% (yoy). Penyaluran kredit pada sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan (porsi: 4,98%) juga masih tumbuh 16,49% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 17,36% (yoy).

Transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi: 3,56%) dan industri pengolahan (porsi: 3,32%) juga masih tumbuh cukup tinggi meskipun melambat masing-masing 18,58% (yoy) dan 10,75% (yoy), dari tahun sebelumnya yang tumbuh 38,63% (yoy) dan 29,88% (yoy).

**Tabel 15 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi**

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp M)				qtq		yoy		Porsi
		Jun'23	Mar'24	Jun-24	Mar'24	Jun'24	Jun'23	Jun'24		
1	Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan	9,435	10,275	10,157	3.83%	-1.14%	11.22%	7.65%	6.25%	
2	Perikanan	636	630	626	-2.34%	-0.54%	19.17%	-1.61%	0.39%	
3	Pertambangan dan Penggalan	1,137	1,350	1,250	-4.23%	-7.42%	33.20%	9.93%	0.77%	
4	Industri Pengolahan	4,873	5,499	5,397	6.04%	-1.87%	29.88%	10.75%	3.32%	
5	Listrik, Gas dan Air	273	216	226	-9.78%	4.43%	40.75%	-17.49%	0.14%	
6	Konstruksi	9,309	10,915	11,295	2.14%	3.48%	32.69%	21.33%	6.95%	
7	Perdagangan, Restoran dan Hotel	34,386	35,334	34,829	1.51%	-1.43%	14.33%	1.29%	21.42%	
8	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4,887	5,646	5,795	5.82%	2.63%	38.63%	18.58%	3.56%	
9	Perantara Keuangan	2,041	2,273	2,186	15.47%	-3.85%	47.80%	7.07%	1.34%	
10	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6,954	7,827	8,101	3.65%	3.50%	17.36%	16.49%	4.98%	
11	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	244	242	241	-2.89%	-0.40%	-4.79%	-1.54%	0.15%	
12	Jasa Pendidikan	462	515	508	1.28%	-1.41%	12.01%	9.76%	0.31%	
13	Jasa Sosial/Masyarakat	11,408	11,406	11,287	-2.27%	-1.04%	-3.27%	-1.06%	6.94%	
14	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	228	190	189	-4.79%	-0.66%	-32.77%	-17.10%	0.12%	
15	Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	12	15	16	17.89%	3.78%	-61.56%	32.95%	0.01%	
16	Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	17,509	19,155	19,565	3.15%	2.14%	7.16%	11.74%	12.03%	
17	Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	47,900	50,417	50,908	3.15%	0.97%	4.97%	6.28%	31.31%	
	<b>Total</b>	<b>151,695</b>	<b>161,905</b>	<b>162,574</b>	<b>2.59%</b>	<b>0.41%</b>	<b>11.10%</b>	<b>7.17%</b>	<b>100%</b>	

Sumber: SPI dan SPS Juni 2024

## 2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, sebagian besar kredit BPR dan BPRS disalurkan ke wilayah Jawa dengan porsi sebesar 59,91%. Besarnya kredit di wilayah Jawa sejalan dengan mayoritas BPR dan BPRS di Indonesia beroperasi di wilayah tersebut. Kredit di wilayah ini tumbuh 5,65% (yoy), melambat dari tahun lalu yang tumbuh 11,43% (yoy). Jawa Tengah yang merupakan Provinsi dengan penyaluran kredit BPR dan BPRS terbesar (porsi 23,21%) tumbuh 1,27% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,64% (yoy). Selain itu, Jawa Barat (porsi 14,27%) dan Jawa Timur (porsi 11,06%) juga tumbuh melambat sebesar 6,85% (yoy) dan 8,38% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing 13,08% (yoy) dan 17,45% (yoy), sehingga menarik ke bawah pertumbuhan penyaluran kredit BPR dan BPRS secara umum.

Selain itu, kredit kedua terbesar terdapat di wilayah Sumatera dengan porsi 19,50%. Kredit di wilayah ini tumbuh 12,90% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 12,81% (yoy). Peningkatan utamanya didorong oleh Provinsi Kepulauan Riau dan Lampung yang tumbuh masing-masing 22,95% (yoy) dan 7,98% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari pertumbuhannya, kredit di wilayah Kalimantan tumbuh tertinggi dibanding pulau lainnya, sebesar 22,70% (yoy), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang juga tumbuh tinggi 27,90% (yoy), namun dengan porsi yang relatif kecil hanya sebesar 2,96% dari total kredit BPR dan BPRS. Pertumbuhan di wilayah ini terutama didorong oleh Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang masing-masing tumbuh 35,46% (yoy) dan 32,68% (yoy).

**Tabel 16 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)**

	Kredit (RP M)				qtq			yoy		Porsi
	Jun'23	Sep'23	Des'23	Mar-24	Jun-24	Mar-24	Jun-24	Jun'23	Jun-24	
Jawa	92,187	93,450	94,817	97,523	97,392	2.85%	-0.13%	11.43%	5.65%	59.91%
Sumatera	28,074	29,086	29,967	30,939	31,694	3.24%	2.44%	12.81%	12.90%	19.50%
Kalimantan	3,927	4,148	4,758	4,858	4,819	2.11%	-0.80%	27.90%	22.70%	2.96%
Bali - Nusra	15,757	15,848	16,257	16,458	16,319	1.24%	-0.85%	6.40%	3.57%	10.04%
Sulampua	11,750	11,919	12,018	12,128	12,350	0.91%	1.84%	6.33%	5.11%	7.60%
<b>Total</b>	<b>151,695</b>	<b>154,451</b>	<b>157,816</b>	<b>161,905</b>	<b>162,574</b>	<b>2.59%</b>	<b>0.41%</b>	<b>11.10%</b>	<b>7.17%</b>	<b>100%</b>

Sumber: SPI dan SPS Juni 2024

# 4 Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

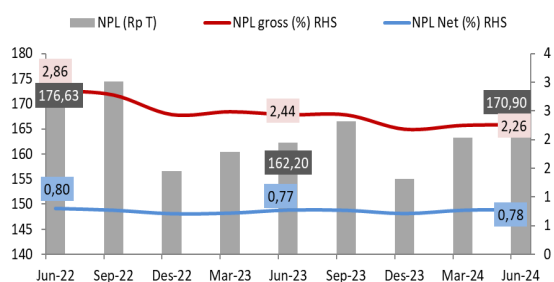
## 4 Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko bank umum cukup terkelola dengan baik, tecermin dari risiko kredit yang menurun serta kondisi likuiditas yang cukup memadai. Selain itu, risiko pasar juga cukup terjaga seiring upaya bank menyeimbangkan portofolio SSB (*bonds' portfolio rebalancing*) yang dimiliki. Namun demikian ke depannya, risiko likuiditas perlu tetap diwaspadai seiring dengan sentimen ketidakpastian kebijakan moneter global.

### 1. Risiko Kredit

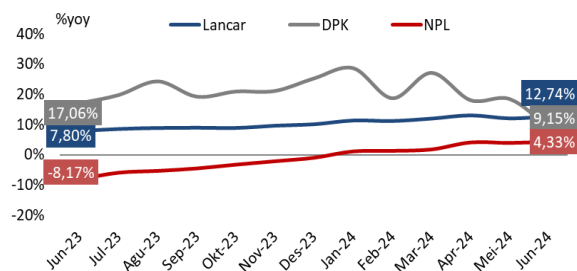
Pada Juni 2024, risiko kredit membaik tecermin dari rasio NPL *gross* tercatat sebesar 2,26%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,44%. Sejalan dengan turunnya NPL *gross*, NPL net cukup stabil menjadi sebesar 0,78%. Namun demikian, penurunan rasio NPL bukan disebabkan oleh penurunan nominal NPL secara umum. Pada periode laporan, NPL nominal tumbuh 4,33% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -8,17% (yoy).

Grafik 24 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



Sumber: SPI Juni 2024

Grafik 25 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit

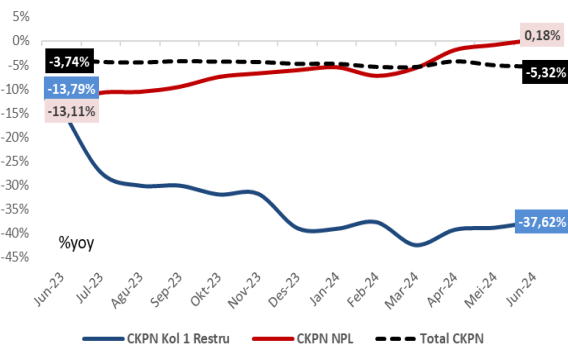


Sumber: SPI Juni 2024

Penurunan rasio NPL *gross* lebih disebabkan oleh kredit yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan NPL. Sementara itu CKPN juga tumbuh 0,18% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -13,11% (yoy).

Secara total CKPN tumbuh 0,18% (yoy), meningkat dibandingkan tahun lalu yang terkontraksi -13,11% (yoy), utamanya dipengaruhi oleh tumbuhnya CKPN kredit non restrukturisasi kualitas lancar sebesar 0,72% (yoy). Sementara itu, CKPN kredit restrukturisasi kualitas lancar turun sebesar -37,62% (yoy). Adapun turunnya CKPN kredit restrukturisasi kualitas lancar sejalan dengan berakhirnya stimulus kredit restrukturisasi yang telah dihentikan sepenuhnya pada 31 Maret 2024. Meskipun CKPN menurun, *coverage* CKPN terhadap kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan *coverage* CKPN terhadap kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) masih memadai masing-masing sebesar 15,61% dan 41,48%. Selain itu, *coverage* total CKPN terhadap NPL juga masih cukup baik sebesar 194,67%. Hal ini mengindikasikan bahwa antisipasi bank terhadap risiko kredit masih memadai.

**Grafik 26 Pertumbuhan CKPN**

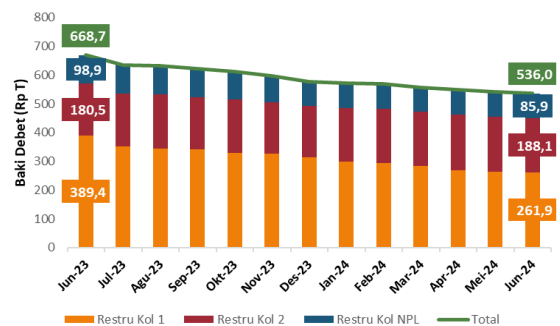


Sumber: LBUT

Di sisi lain, kredit restrukturisasi perbankan sudah turun sebesar -19,85% (yoy) menjadi sebesar Rp535,96 Triliun. Hal ini sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 dan berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi. Adapun kredit restrukturisasi masih didominasi oleh kredit restrukturisasi kualitas Lancar sebesar Rp261,93 Triliun atau 48,87% terhadap total kredit restrukturisasi. Kredit restrukturisasi kualitas Lancar tersebut turun -32,73% (yoy), melanjutkan kontraksi tahun sebelumnya yang juga turun -34,39% (yoy). Porsi kredit restrukturisasi kualitas Lancar terhadap total kredit juga mulai menunjukkan tren penurunan menjadi 3,50% dari 5,21% pada

Juni 2023. Penurunan kredit restrukturisasi kualitas Lancar tersebut menyebabkan rasio *Loan at Risk* menurun menjadi sebesar 10,51%, dari tahun sebelumnya 13,17%.

**Grafik 27 Tren Kredit Restrukturisasi**



Sumber: LBUT

Meskipun kondisi risiko kredit mulai membaik, namun perbankan harus tetap mengedepankan aspek prudensial dan mengantisipasi terjadinya pemburukan kualitas kredit ke depan di tengah masih tingginya ketidakpastian global seperti risiko akibat ketidakpastian kebijakan moneter global, perkembangan ekonomi Tiongkok, serta kenaikan tensi geopolitik yang dapat berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi domestik.

**Tabel 17 Perkembangan Kualitas Kredit**

Kualitas Kredit (Rp T)	Jun'23	Mar'24	Jun'24	Porsi	qtq		yoy	
					Mar'24	Jun'24	Jun'23	Jun'24
1. Lancar	6.169	6.724	6.954	92,99%	1,43%	3,42%	7,80%	12,74%
- Non Restru	5.779	6.440	6.692	89,49%	1,99%	3,91%	12,68%	15,80%
- Restru	389	284	262	3,50%	-9,77%	-7,69%	-34,39%	-32,73%
2. DPK	325	357	355	4,75%	16,67%	-0,61%	17,06%	9,15%
3. Kurang Lancar	23	22	25	0,34%	-4,55%	14,38%	8,78%	8,35%
4. Diragukan	28	30	29	0,39%	20,28%	-2,40%	-11,23%	3,66%
5. Macet	111	111	115	1,54%	4,04%	3,14%	-10,33%	3,66%
Nominal NPL	162	163	169	5,34%	3,66%	-8,17%	4,33%	
Rasio NPL Gross %	2,44%	2,25%	2,26%		7	1	-42	-17
Rasio NPL Net %	0,77%	0,77%	0,78%		6	1	-2	1
Kredit DPK + Restru Kredit Lancar	715	641	617	3,27%	-3,74%	-17,98%	-13,67%	
Rasio Kredit DPK + Restru Kredit Lancar %	10,74%	8,85%	8,25%		9	-60	-337	-249
Loan at Risk (LaR)	877	804	786	3,69%	-2,24%	-16,33%	-10,34%	
Rasio Loan at Risk (LaR) %	13,17%	11,10%	10,51%		16	-59	-379	-266
Total Kredit	6.656	7.245	7.478		2,18%	3,23%	7,76%	12,36%

Sumber: SPI Juni 2024

Keterangan: Perubahan (qtq dan yoy) untuk data rasio dalam *basis point* (bps)

### 1.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Pada periode laporan, terjadi penurunan risiko kredit produktif, baik pada jenis penggunaan modal kerja dan investasi secara yoy. Rasio NPL Kredit Modal Kerja

(KMK) dan Kredit Investasi (KI) masing-masing turun menjadi 2,83% dan 1,75% dari 3,22% dan 1,81% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio NPL Kredit Konsumsi (KK) sedikit meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,75% menjadi 1,84%.

**Tabel 18 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan**

Kredit (Rp T)	Mar'23	Des'23	Mar'24	yoy	
				Jun'23	Jun'24
KMK	2.915	3.236	3.273	5,97%	11,68%
KI	1.733	1.921	1.991	9,58%	15,09%
KK	1.797	1.934	1.981	9,02%	10,80%
<b>Total Kredit</b>	<b>6.445</b>	<b>7.090</b>	<b>7.245</b>	<b>7,75%</b>	<b>12,36%</b>

**Tabel 19 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan**

NPL Gross %	Jun'23	Mar'24	Jun'24	yoy	
				Jun'23	Jun'24
NPL KMK	3,22	2,83	2,83	-52	-39
NPL KI	1,81	1,76	1,75	-69	-6
NPL KK	1,75	1,80	1,84	5	9
<b>Total NPL</b>	<b>2,44</b>	<b>2,19</b>	<b>2,26</b>	<b>-42</b>	<b>-17</b>

Sumber: SPI Juni 2024

Berdasarkan kelompok bank, penurunan rasio NPL KMK, utamanya didorong oleh Bank Persero dari tahun sebelumnya sebesar 3,25% menjadi 2,65% serta Bank Swasta yang turun dari tahun lalu 3,10% menjadi 2,80%. Di sisi lain, NPL KMK BPD justru tercatat meningkat menjadi 7,13% dari 6,25% pada tahun sebelumnya. Sama halnya dengan KMK, perbaikan rasio NPL KI juga terjadi pada seluruh kelompok bank kecuali BPD.

Rasio NPL KMK pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya dan tercatat meningkat dari 6,25% pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 7,13%. Selaras dengan KMK, rasio NPL KI BPD

tercatat naik dari tahun lalu yaitu sebesar 2,37% menjadi 2,51%. Sementara itu, rasio NPL KK BPD tercatat yang terendah sebesar 1,08% meskipun sedikit meningkat dari tahun lalu yaitu 1,07%. Tingginya NPL KMK pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan monitoring, serta kompetensi dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan, NPL BPD masih terjaga pada level 2,51%, walau sedikit meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,32%.

**Tabel 20 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank**

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK			NPL (%)
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	
Bank Persero	1.547.302	44,72	2,65	1.032.066	29,83	1,81	880.792	25,46	1,84	2,19
Bank Swasta	1.564.745	48,73	2,80	914.016	28,46	1,61	732.612	22,81	2,27	2,34
BPD	126.401	20,20	7,13	89.409	14,29	2,51	409.807	65,50	1,08	2,51
KCBLN	151.082	83,35	1,30	27.691	15,28	1,48	2.482	1,37	2,80	1,35
<b>TOTAL</b>	<b>3.389.530</b>	<b>45,32</b>	<b>2,83</b>	<b>2.063.182</b>	<b>27,59</b>	<b>1,75</b>	<b>2.025.692</b>	<b>27,09</b>	<b>1,84</b>	<b>2,26</b>

Sumber: SPI Juni 2024

## 1.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Beberapa sektor ekonomi menunjukkan perbaikan risiko kredit yang tecermin dari penurunan nominal NPL.

Penurunan nominal NPL terbesar terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian. Risiko kredit pada sektor ini tercatat membaik dari 2,41% menjadi 1,55%, dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1.061,81 Miliar (yoy), atau merupakan penurunan nominal NPL terbesar pada periode laporan. Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh sub sektor pembuatan briket batu bara. Sejalan dengan perkembangan tersebut, berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi batubara Indonesia telah mencapai lebih dari 100 Juta ton sejak Januari 2024, tepatnya 370,28 Juta ton per Juni 2024. Optimisme terhadap peningkatan produksi batubara nasional sepanjang tahun ini masih relatif terjaga mengingat produksi batubara nasional tahun lalu berhasil mencapai 775 Juta ton (rekor tertinggi dalam beberapa dekade terakhir) melebihi target 695 Juta ton. Di sisi lain, NPL untuk sub sektor pertambangan logam dan bijih timah justru meningkat dari 0,22% menjadi 1,75%.

Penurunan nominal NPL terbesar kedua terjadi pada sektor real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan. Nominal NPL pada sektor ini tercatat turun Rp594,01 Miliar (yoy), atau secara rasio turun dari 2,20% menjadi 1,84%. Perbaikan risiko kredit di sektor ini sejalan dengan pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha real estate yang tumbuh dibandingkan Juni-2024. Selain itu, penurunan NPL utamanya juga

didorong oleh menurunnya nominal NPL pada jasa persewaan alat transportasi air. Perkembangan tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri pada Juni 2024 adalah sebanyak 2,32 juta orang atau naik 23,40% (yoy) dari 1,88 juta orang dibandingkan Juni tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah penumpang tersebut seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang mendorong peningkatan mobilitas masyarakat termasuk penggunaan angkutan laut dalam negeri untuk keperluan bisnis maupun wisata. Selain itu, bersamaan dengan momentum mudik lebaran, banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan mudik atau wisata bahari sehingga mendorong peningkatan permintaan terhadap transportasi laut. Beberapa maskapai pelayaran juga kerap menawarkan promo dan diskon harga tiket pada periode tersebut sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan laut sebagai pilihan moda transportasi.

Selanjutnya, sektor ekonomi dengan nominal NPL yang turun cukup besar adalah industri pengolahan. Rasio NPL pada sektor ini turun dari 3,67% menjadi 3,31% atau turun Rp332,80 Miliar (yoy). Penurunan NPL pada sektor ini utamanya didorong oleh penurunan NPL pada subsektor industri mesin, industri karet, dan industri tekstil yang turun cukup besar. Peningkatan kinerja sektor industri pengolahan secara umum antara lain didukung oleh kondisi ekonomi makro Indonesia yang tetap terjaga stabil, kebijakan pemerintah yang akomodatif dalam mendorong kepercayaan industri untuk meningkatkan produksi dan investasi, serta permintaan domestik dan ekspor yang

menguat, sehingga memberikan optimisme bagi para pelaku industri terhadap prospek bisnis di masa depan. Namun demikian, perlu juga diperhatikan NPL beberapa subsektor pada sektor ini yang meningkat, antara lain industri kimia, industri makanan dan minuman, dan industri alat angkutan.

Sektor listrik, gas dan air juga turun cukup besar secara nominal sebesar Rp299,18 Miliar (yoy) atau secara rasio turun dari 0,45% menjadi 0,21%. Penurunan didorong oleh turunnya NPL pada subsektor gas dan ketenagalistrikan. Sebagai informasi, Pemerintah melalui Kementerian ESDM tengah serius menggarap potensi besar Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia sebagai sumber energi andalan di masa depan, salah satunya melalui akselerasi pengembangan EBT baik listrik maupun non listrik.

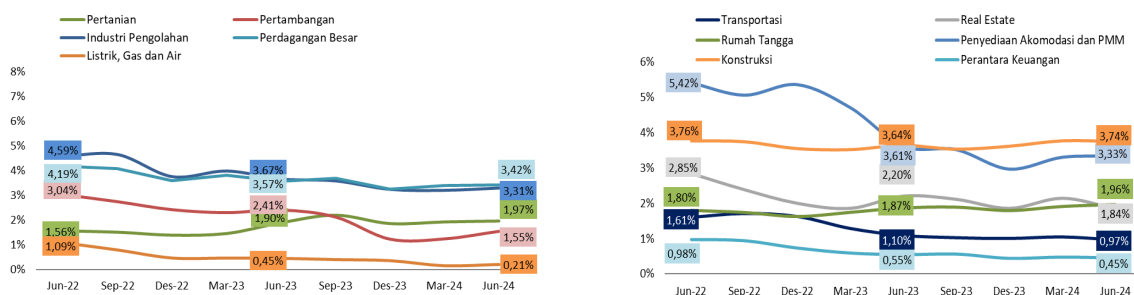
Jika dilihat dari penurunan rasio, salah satu sektor dengan penurunan terbesar adalah jasa pendidikan dengan penurunan NPL sebesar 46 bps dari 1,77% menjadi 1,31% (yoy). Penurunan NPL terjadi pada subsektor pendidikan tinggi yang turun 63 bps menjadi 1,75% dari 2,38% (yoy).

Selain itu, rasio NPL sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum juga turun 28 bps, dari 3,61% pada Juni 2023 menjadi 3,33% pada Juni 2024. Subsektor

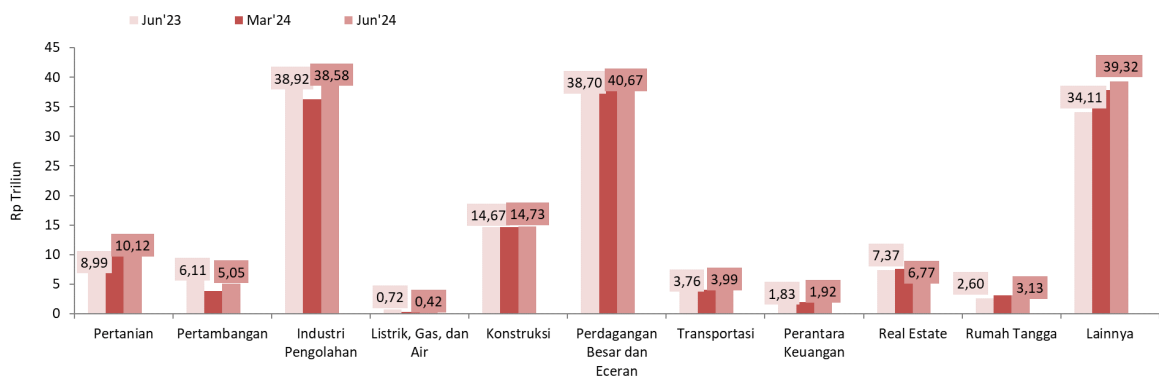
yang menarik ke bawah NPL pada sektor ini adalah penyediaan akomodasi hotel bintang dan penyediaan akomodasi hotel melati yang masing-masing NPL pada Juni 2024 menjadi 3,40% dan 4,37%. Rasio NPL penyediaan akomodasi hotel melati turun cukup besar yaitu 383 bps, setelah pada Juni 2023 memiliki rasio NPL yang tinggi di atas *threshold* 8,20%. Jika dilihat dari pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha, sektor ini memang menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, NPL pada sektor rumah tangga, yang merupakan sektor ekonomi terbesar, justru meningkat dari 1,87% menjadi 1,96%, atau secara nominal meningkat Rp 4.778,29 Miliar. Peningkatan NPL pada sektor ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya NPL pada Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal, dan Rumah Tangga untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor. Jika dilihat dari PDB Indonesia berdasarkan pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga memang tumbuh melambat, seiring dengan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen per Juni 2024.

**Grafik 28 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi**



Sumber: SPI Juni 2024, diolah

**Grafik 29 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi**

Sumber: SPI Juni 2024

### 1.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi proyek, perbaikan risiko kredit terjadi di wilayah Jawa, Sumatera, serta Bali dan Nusa Tenggara seiring dengan momentum pemulihan ekonomi domestik yang masih berlanjut di tengah rambatan risiko global.

Rasio NPL pada wilayah Jawa tercatat membaik seiring pertumbuhan kredit yang lebih tinggi yaitu 13,32% (yoy) pada Juni 2024 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,98% (yoy). Hal ini selanjutnya mendorong perbaikan rasio NPL dari 2,53% pada Juni 2023 menjadi 2,32% pada Juni 2024 meskipun secara nominal NPL naik sebesar Rp4,06 triliun. Perbaikan rasio NPL di wilayah Jawa utamanya didorong oleh turunnya nominal NPL pada Provinsi Banten sebesar Rp1,06 triliun (porsi kredit Provinsi Banten: 9,31% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Jawa) dengan perbaikan rasio NPL dari 5,85% pada Juni 2023 menjadi 5,20% pada Juni 2024. Meskipun demikian, rasio NPL di provinsi Banten masih perlu diwaspadai karena tergolong tinggi (>5%). Adapun penurunan nominal NPL Provinsi Banten utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan

sebesar Rp1,3 triliun atau secara rasio membaik dari 4,46% (yoy) menjadi 3,10% (yoy). Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Provinsi Banten, sektor industri pengolahan merupakan *leading sector* yang memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan pajak di provinsi tersebut sebesar 39,52%. Tidak hanya itu, sektor industri pengolahan juga mendominasi pembentukan nilai Pembentukan Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten dengan kontribusi sebesar 33,2% serta tumbuh 3,65% (yoy) pada triwulan II-2024.

Selanjutnya, wilayah Sumatera juga mencatatkan perbaikan rasio NPL dari 2,50% pada Juni 2023 menjadi 2,15% pada Juni 2024 dengan nominal NPL yang turun sebesar Rp1,76 triliun. Perbaikan rasio NPL di wilayah tersebut utamanya didorong oleh turunnya nominal NPL pada Provinsi Aceh sebesar Rp674,59 miliar (porsi kredit Provinsi Aceh: 4,96% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sumatera) atau secara rasio turun dari 3,63% pada Juni 2023 menjadi 2,22% pada Juni 2024. Penurunan nominal NPL provinsi Aceh utamanya ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan salah satu kontributor terbesar

PDRB di provinsi tersebut. Berdasarkan data BPS, sektor perdagangan besar dan eceran juga turut berkontribusi pada surplus neraca perdagangan dengan capaian nilai ekspor sebesar USD114,83 juta pada Juni 2024.

Perbaikan rasio NPL juga terlihat pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara dari 1,94% menjadi 1,91% meskipun secara nominal NPL terdapat kenaikan sebesar Rp620,89 miliar pada Juni 2024. Perbaikan rasio NPL di wilayah tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan kredit yang lebih tinggi (15,70%, yoy) daripada pertumbuhan NPL (13,97%, yoy). Adapun perbaikan risiko kredit di wilayah tersebut utamanya didorong oleh Provinsi Bali (porsi kredit Provinsi Bali: 46,35% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Bali Nusra) dengan perbaikan rasio NPL dari 2,53% menjadi 1,97% atau secara nominal turun sebesar Rp381,63 miliar. Penurunan nominal NPL di Provinsi Bali antara lain dipengaruhi oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (PMM), *real estate*, dan perdagangan besar. Rasio NPL sektor PMM dan *real estate* masing-masing turun dari 2,8% dan 6,4% menjadi 0,8% dan 4,1%. Demikian halnya dengan rasio NPL sektor perdagangan besar yang turun dari 2,5% menjadi 2,4%. Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Bali Nusra, sektor PMM berkontribusi besar terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Bali mencatatkan pertumbuhan pajak tertinggi sebesar 81,40% (yoy) dengan penerimaan sebesar Rp1,23 triliun sejak awal tahun s.d. Juni 2024.

Di sisi lain, terdapat beberapa wilayah yang tercatat mengalami kenaikan rasio NPL dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya, seperti: Kalimantan, Sulawesi, serta Papua dan Maluku. Pada wilayah Kalimantan, terjadi kenaikan rasio NPL dari 1,59% menjadi 1,90% seiring dengan pertumbuhan kredit yang melambat di wilayah tersebut dari 11,77% (yoy) menjadi 7,69% (yoy) disertai kenaikan nominal NPL sebesar Rp1,9 triliun. Kenaikan rasio NPL terbesar di wilayah tersebut dipengaruhi oleh Provinsi Kalimantan Tengah (porsi kredit: 16,95% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Kalimantan) yang secara rasio naik dari 1,54% pada Juni 2023 menjadi 3,57% pada Juni 2024. Dalam hal ini, kenaikan nominal NPL di provinsi tersebut utamanya dipengaruhi oleh naiknya nominal NPL sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp1,51 triliun dengan rasio NPL yang meningkat dari 2,64% menjadi 21,71%. Sebagai informasi, sektor pertambangan dan penggalian memiliki peran cukup penting bagi perekonomian Kalimantan Tengah dengan kontribusi sebesar 10,02% terhadap pembentukan PDRB provinsi tersebut pada triwulan II-2024.

Selanjutnya, kenaikan rasio NPL juga terlihat pada wilayah Sulawesi dari 2,87% menjadi 2,88% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp1,26 triliun. Kenaikan rasio NPL terbesar utamanya dipengaruhi oleh Provinsi Gorontalo (porsi: 4,99% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sulawesi) sebesar Rp231,02 miliar dengan rasio NPL yang meningkat dari 4,62% menjadi 5,53%. Peningkatan rasio NPL tersebut utamanya dipengaruhi oleh sektor pertanian sebesar Rp129,97 miliar dengan kenaikan rasio NPL dari 16,42% menjadi 27,91%. Penurunan kualitas kredit pada sektor tersebut ditengarai salah satunya dipengaruhi oleh kendala struktural yang masih dihadapi

petani Gorontalo, seperti kurangnya fasilitas pengolahan dan pemasaran sehingga nilai tambah dari hasil panen kurang optimal.

Terakhir, rasio NPL pada wilayah Papua dan Maluku juga menunjukkan kenaikan dari 2,07% menjadi 2,34% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp459,91 miliar. Kenaikan rasio NPL terbesar di wilayah tersebut utamanya didorong oleh Provinsi Maluku Utara dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp229,35 miliar (porsi kredit Provinsi Maluku Utara: 24,35% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Papua dan Maluku).

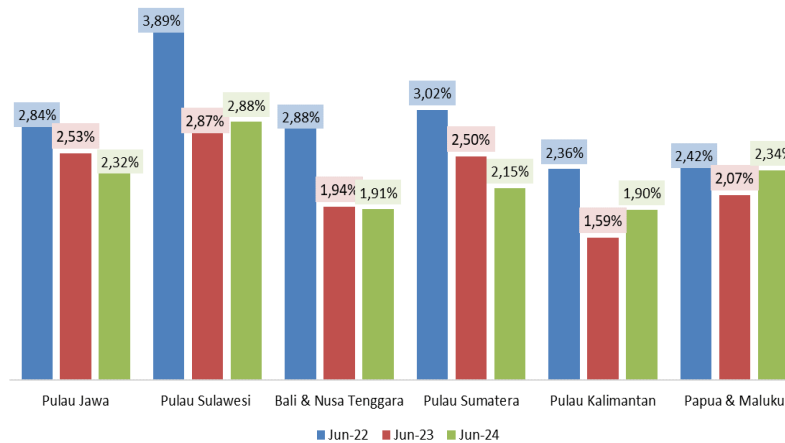
Kenaikan nominal tersebut utamanya didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp19,42 miliar dengan kenaikan rasio NPL dari 0,00% menjadi 0,53%. Hal tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Maluku Utara yang melambat dari 59,85% (yoy) pada triwulan II-2023 menjadi 0,07% (yoy). Adapun perlambatan PDRB tersebut ditengarai sejalan dengan aktivitas hilirisasi di sektor pertambangan dan penggalian yang tidak semasif periode sebelumnya.

**Tabel 21 NPL Gross Lokasi Berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Juni 2024**

		Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Perantara Keuangan	Total
Jawa	NPL %	2,22%	1,67%	3,83%	0,18%	3,09%	3,27%	0,92%	2,17%	0,38%	2,32%
Sumatera	NPL %	2,06%	1,42%	1,30%	0,05%	6,42%	3,99%	1,01%	1,74%	5,23%	2,15%
Kalimantan	NPL %	0,56%	2,79%	0,51%	0,16%	5,83%	3,53%	0,89%	1,62%	2,19%	1,90%
Sulawesi	NPL %	5,67%	0,63%	5,87%	0,19%	5,70%	4,38%	3,86%	1,60%	3,04%	2,88%
Bali & Nusa Tenggara	NPL %	2,69%	0,03%	1,38%	2,10%	14,85%	3,09%	1,50%	1,24%	1,57%	1,91%
Papua & Maluku	NPL %	0,67%	0,34%	0,55%	0,65%	15,27%	3,56%	3,37%	1,86%	4,22%	2,34%
<b>Total</b>		<b>1,97%</b>	<b>1,55%</b>	<b>3,31%</b>	<b>0,21%</b>	<b>3,74%</b>	<b>3,42%</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,96%</b>	<b>0,45%</b>	<b>2,26%</b>

Sumber: LBUT, diolah

**Grafik 30 Tren Rasio NPL Gross berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)**



Sumber: LBUT, diolah

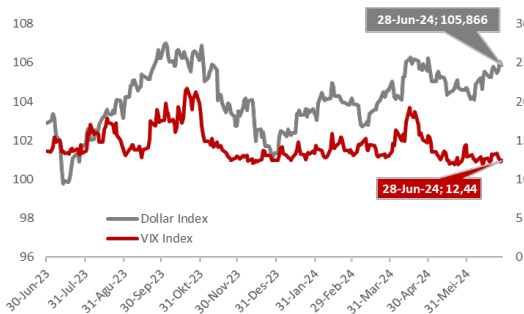
## 2. Risiko Pasar

Pada triwulan II-2024, risiko pasar tetap terkendali di tengah kondisi tingginya suku bunga global, menguatnya indeks dollar,

dan gejolak geopolitik terutama di wilayah Eropa dan Timur Tengah. Masih terjaganya tekanan di pasar keuangan global juga tercermin dari *Volatility Index* (VIX) yang cenderung melandai pada Juni 2024.

Sementara itu, diumumkankannya keputusan The Fed pada *Federal Open Market Committee* (FOMC) bulan Juni 2024 yang masih mempertahankan suku bunga di level 5,00% - 5,25% (*high for longer*), berpengaruh pada kecenderungan naiknya *US Treasury yield*. Selain itu, perkembangan data inflasi yang mulai melandai, aktivitas perekonomian yang tetap solid, dan data tenaga kerja yang menguat di AS juga mendorong kondisi suku bunga acuan *high for longer* dan penguatan *dollar index*. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan *capital outflow* dari negara *emerging* ke negara maju, khususnya ke pasar keuangan AS (*dollar USD* sebagai *safe-haven asset*) yang kemudian dapat berdampak pada penguatan USD dibandingkan mata uang lainnya.

**Grafik 31 Dolar Index dan VIX Index**



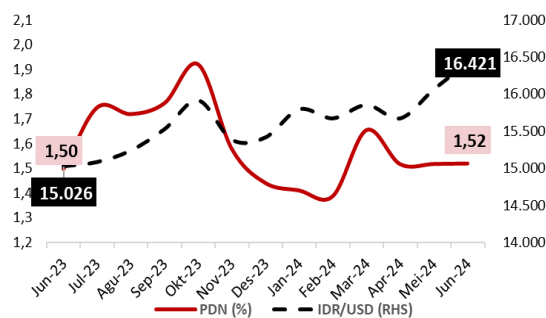
Sumber: Reuters

## 2.1 Risiko Nilai Tukar

Pada akhir Juni 2024, nilai tukar Rupiah terhadap USD tercatat sebesar Rp16.421/USD, melemah 9,28% dari posisi akhir Juni 2023 sebesar Rp15.026/USD. Meski demikian pelemahan nilai tukar Rupiah masih lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan negara lain seperti Turki dan Jepang yang melemah masing-masing sebesar 25,35% dan 11,44% *point-to-point* posisi akhir Juni 2024 terhadap akhir Juni 2023.

Di tengah pelemahan nilai tukar tersebut, Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan pada Juni 2024 masih terjaga rendah sebesar 1,52%, meski meningkat dari tahun lalu sebesar 1,50%. PDN masih berada pada posisi *Long* sehingga dampaknya terhadap pendapatan perbankan masih positif. Rasio PDN tersebut menunjukkan eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank yang terjaga dan masih berada pada level rendah jauh di bawah *threshold* 20%. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank devisa (57 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%).

**Grafik 32 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar**



Sumber: Bank Indonesia

## 2.2 Risiko Suku Bunga

Di tengah sentimen suku bunga yang masih bertahan pada level tinggi, *US Treasury yield* (UST) menunjukkan tren kenaikan dari periode Maret 2024 hingga Juni 2024. Kenaikan UST *yield* tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan The Fed yang tetap mempertahankan suku bunga global di level tinggi dan terus menguatnya nilai tukar dollar Amerika. Kenaikan UST *yield* pada periode laporan tersebut juga diimbangi dengan peningkatan dari *yield* SBN sehingga *spread* antar *yield* tetap melebar dan menjaga arus modal asing di dalam negeri.

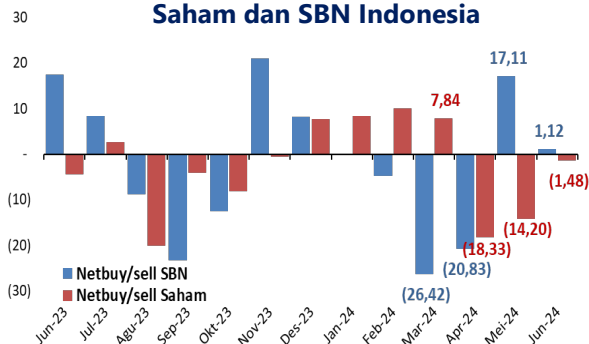
**Grafik 33 Spread Yield UST dan SBN**



Sumber: PHEI dan Reuters

Pada pasar keuangan, transaksi di pasar SBN selama setahun mencatatkan *capital outflow* atau *net sell* transaksi non-residen sebesar Rp41,25 Triliun. Kendati demikian, pada Juni 2024 pasar SBN mulai terindikasi kembali dialiri modal asing seiring dengan *spread* yang melebar. Tercatatnya *capital outflow* selama setahun tersebut turut mendorong pelemahan nilai tukar rupiah. Sejalan dengan SBN, transaksi investor asing atau non-residen di pasar saham juga mencatatkan *net sell* atau *capital outflow* sebesar Rp30,12 Triliun dari Juni 2023 hingga Juni 2024.

**Grafik 34 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia**

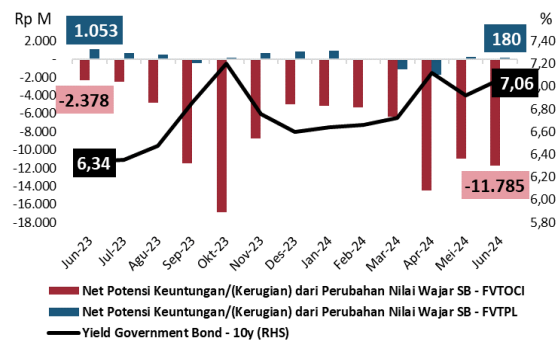


Sumber: DJPPR dan BEI

Di perbankan, risiko suku bunga yang dilihat dari nilai wajar berdasarkan *mark-to-market* masih terjaga. Pada Juni 2024, *yield*

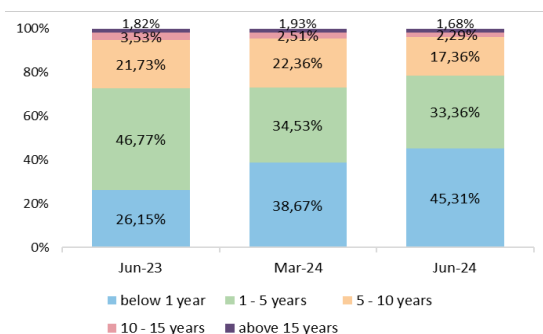
SBN naik menjadi 7,06% dibandingkan dengan posisi tahun lalu (Juni 2023) sebesar 6,34%. Nilai wajar portofolio obligasi kategori *Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)* masih menunjukkan potensi keuntungan, namun di sisi lain, potensi kerugian dari obligasi kategori *Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVTOCI)* menunjukkan peningkatan seiring dengan kenaikan *yield*. Selain itu, terdapat penurunan rata-rata sisa jatuh tempo SSB pada Juni 2024 dibandingkan Juni 2023 sehingga mengurangi fluktuasi nilai wajar SSB bank jika terjadi pergerakan suku bunga.

**Grafik 35 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan**



Sumber: Reuters dan LBUT

**Grafik 36 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (FVTPL dan FVTOCI) berdasarkan Tenor**



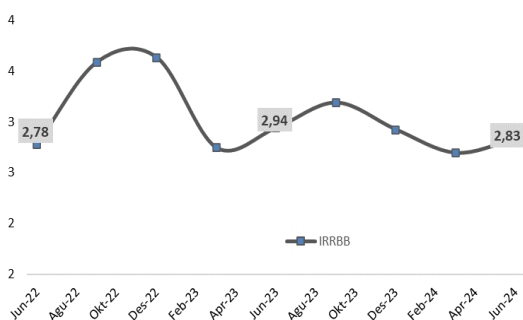
Sumber: LBUT

**Tabel 22 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori**

Kategori SSB	Nominal SSB (Rp T)			Porsi SSB (%)		
	Jun-23	Mar-24	Jun-24	Jun-23	Mar-24	Jun-24
FVTOCI	863,29	1.028,26	1.062,63	46,21%	47,50%	47,17%
FVTPL	138,86	199,62	226,74	7,43%	9,22%	10,06%
AC	866,15	936,83	963,57	46,36%	43,28%	42,77%
<b>Total Industri</b>	<b>1.868,30</b>	<b>2.164,72</b>	<b>2.252,94</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: LBUT

Risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* juga masih terjaga tecermin dari *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level rendah yaitu sebesar 2,83%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,94%. Penurunan IRRBB didorong oleh kewajiban dengan suku bunga tetap jangka panjang yang tumbuh melambat sebesar 2,47% (yoy) (tahun lalu tumbuh 41,69%, yoy) utamanya karena turunnya simpanan berjangka dan kewajiban pada bank lain. Di sisi lain, aset dengan suku bunga tetap jangka panjang tumbuh 6,47% (yoy), walaupun melambat dari tahun lalu yang tumbuh tinggi 34,03% (yoy). Pertumbuhan aset tersebut utamanya didorong oleh kenaikan kredit. Sementara itu, aset jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki oleh perbankan turun sebesar -9,84% (yoy) melanjutkan kontraksi dari tahun sebelumnya -7,85% (yoy).

**Grafik 37 Perkembangan Parameter IRRBB**

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK

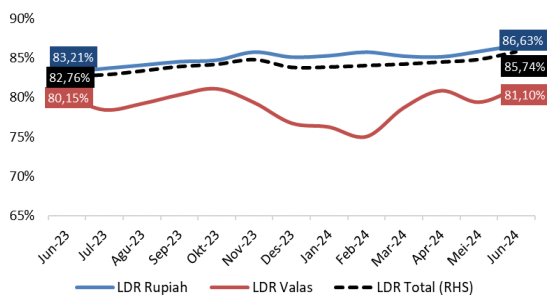
### 3. Risiko Likuiditas

Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan masih relatif memadai di tengah tumbuhnya penyaluran kredit. Hal ini tecermin dari rasio LDR yang masih terjaga berada dalam *range* (78%-92%). Kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga tetap terjaga, tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih berada jauh di atas *threshold*, rasio LCR di atas 100%, serta kemampuan bank dalam mengelola dana stabil atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang masih berada di atas *threshold* (100%). Selain itu, dalam hal pemenuhan kondisi likuiditas untuk jangka pendek, perlu diperhatikan adanya kenaikan volume transaksi PUAB yang juga diiringi dengan kenaikan suku bunga yang dapat mengindikasikan adanya kebutuhan dana yang bersifat *short-term* oleh bank.

Pada Juni 2024, LDR perbankan tercatat sebesar 85,74%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 82,76%. Peningkatan LDR didorong oleh naiknya LDR rupiah menjadi 86,63% dari tahun sebelumnya sebesar 83,21%. Selain itu, rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing masih terjaga sebesar 112,33% dan 25,37%, jauh berada di atas *threshold* (masing-masing sebesar 50% dan 10%), walaupun menurun dari tahun

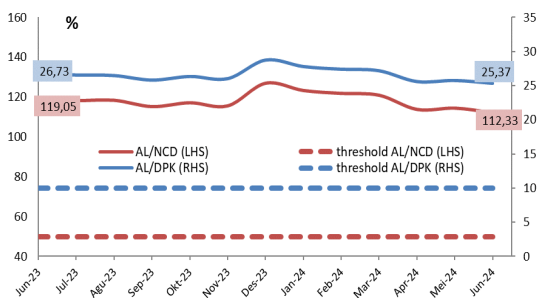
sebelumnya masing-masing sebesar 119,05% dan 26,73%. Penurunan antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK dan *Non Core Deposit* (NCD) yang melampaui pertumbuhan alat likuid. Kendati alat likuid per Juni 2024 tumbuh relatif rendah yaitu hanya sebesar 2,91% (yoy), namun sudah membaik dibandingkan tahun lalu yang sempat berkontraksi -5,71% (yoy).

**Grafik 38 LDR berdasarkan Valuta**



Sumber: LBUT

**Grafik 39 AL/NCD dan AL/DPK**



Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tecermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan yang berada jauh di atas 100% yaitu sebesar 212,22% meskipun menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 230,24%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh *Net Cash Outflow* (NCO) yang tumbuh sebesar 14,93% (yoy) melampaui *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang tumbuh sebesar 5,94% (yoy).

**Tabel 23 Perkembangan LCR Perbankan**

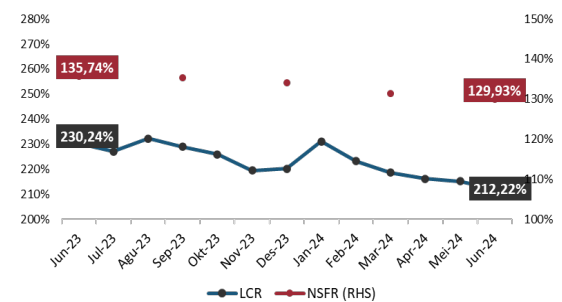
Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Jun-23	Mar-24	Jun-24
KBMI 1	109	302	308
KBMI 2	410	474	487
KBMI 3	669	673	664
KBMI 4	1.406	1.396	1.289
<b>TOTAL HQLA</b>	<b>2.594</b>	<b>2.846</b>	<b>2.748</b>

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Jun-23	Mar-24	Jun-24
KBMI 1	36	131	137
KBMI 2	148	178	178
KBMI 3	291	282	290
KBMI 4	652	710	689
<b>TOTAL NCO</b>	<b>1.127</b>	<b>1.302</b>	<b>1.295</b>

Kelompok	LCR (%)		
	Jun-23	Mar-24	Jun-24
KBMI 1	305,43	230,18	224,00
KBMI 2	277,78	265,95	274,03
KBMI 3	229,83	238,98	228,80
KBMI 4	215,55	196,56	186,96
<b>LCR Industri</b>	<b>230,24</b>	<b>218,63</b>	<b>212,22</b>

Sumber: OJK

**Grafik 40 Perkembangan LCR dan NSFR**

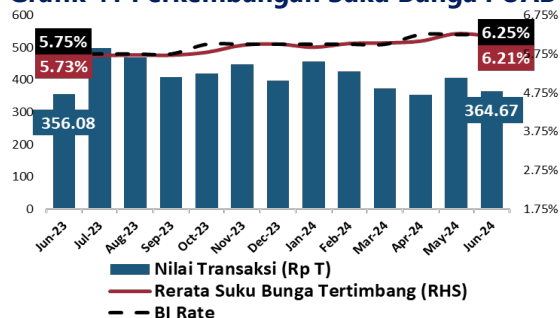


Sumber: APOLO

Lebih lanjut, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tecermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang terjaga pada level 129,93%, meski menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 135,74%.

Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB masih cukup terjaga, dengan volume transaksi yang meningkat diiringi suku bunga rata-

rata tertimbang yang juga meningkat. Peningkatan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan meningkatnya suku bunga acuan BI Rate dalam setahun terakhir sebesar 50 bps menjadi 6,25% pada periode laporan. Selain itu, meningkatnya volume transaksi PUAB juga antara lain dapat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk pemenuhan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) BI.

**Grafik 41 Perkembangan Suku Bunga PUAB**

Sumber: LBUT Harian

## 4. Risiko Hukum

### 4.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama Triwulan II-2024, terdapat enam Kantor Bank (KB) dengan delapan Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Selanjutnya terhadap PKP yang telah diterima pada triwulan II maupun pada periode sebelumnya, sebanyak delapan KB dengan sepuluh PKP sedang dalam proses.

Selain itu, dalam rangka melakukan pendalaman terhadap indikasi penyimpangan ketentuan perbankan yang ditemukan oleh Satuan Kerja Pengawasan Bank, telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) bersama pengawas terhadap 13 (tiga belas) KB.

**Tabel 24 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan**

Tahapan Kegiatan	Triwulan II-2024	
	Total	
	KB	PKP
1. PKP yang diterima	6	8
2. PKP dalam proses *)	8	10
3. PKP yang dikembalikan *)	-	-
4. PKP yang dilimpahkan kepada Penyidik OJK *)	-	-

\*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode sebelumnya

Sumber: OJK

### 4.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan II-2024 telah diberikan pemberian keterangan Ahli sebanyak sepuluh kali. Pemberian keterangan Ahli tersebut merupakan pemenuhan atas tujuh permintaan dari Polri, satu permintaan dari Kejaksaan RI dan dua permintaan dari Satuan Kerja Penyidikan OJK.

**Tabel 25 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi**

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1	Polri	7	0	7
2	Kejaksaan RI	1	0	1
3	Penyidik OJK	2	0	2
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Sumber: OJK

Keterangan Ahli yang diberikan merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, dan Kejaksaan RI. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# 5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

# 5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan satu ketentuan terkait perbankan yaitu dalam bentuk POJK tentang BPR dan BPRS sebagai salah satu tindak lanjut dan penyelarasan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). OJK secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada para *stakeholders* melalui percepatan proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

## 1. Pengaturan Perbankan

Pada triwulan II-2024, OJK menerbitkan satu ketentuan terkait perbankan, yaitu dalam bentuk Peraturan OJK (POJK), antara lain sebagai berikut:

### POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

POJK tersebut merupakan gabungan penyempurnaan dari 3 POJK, yaitu POJK Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BPR dan BPRS, POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang BPR, dan POJK Nomor 26 tahun 2022 tentang BPRS. POJK ini merupakan tindak lanjut dan penyelarasan dari UU P2SK.

Dalam POJK ini diatur tentang:

- 1) Penyesuaian nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
- 2) Pihak-pihak yang dapat mendirikan serta memiliki BPR dan BPRS;
- 3) Syarat dan ketentuan mengenai penawaran umum oleh BPR dan BPRS;

- 4) Bentuk badan hukum BPR dan BPRS serta mekanisme perubahannya;
- 5) Penggabungan lembaga keuangan mikro dengan BPR dan BPRS; dan
- 6) Konsolidasi industri BPR dan BPRS

## 2. Kelembagaan Perbankan

### 2.1 Bank Umum Konvensional (BUK)

#### 2.1.1 Perizinan

Pada triwulan II-2024, telah diselesaikan sepuluh perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari dua perizinan pembukaan jaringan kantor wilayah, tiga perizinan pembukaan jaringan Kantor Cabang (KC), dua perizinan peningkatan status Kantor Cabang Pembantu (KCP) menjadi KC, dan tiga perizinan penutupan kantor cabang BUK.

#### 2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan II-2024, terdapat 115.392 jaringan kantor BUK, terdiri dari 115.327 jaringan kantor di dalam negeri dan 65 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 91.197 unit.

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat peningkatan sebanyak 892 jaringan kantor, terutama pada terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) dan Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) yang masing-masing naik sebesar 596 unit dan 178 unit menjadi 91.197 unit terminal perbankan elektronik dan 19.025 unit Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) pada triwulan-II 2024.

**Tabel 26 Jaringan Kantor BUK**

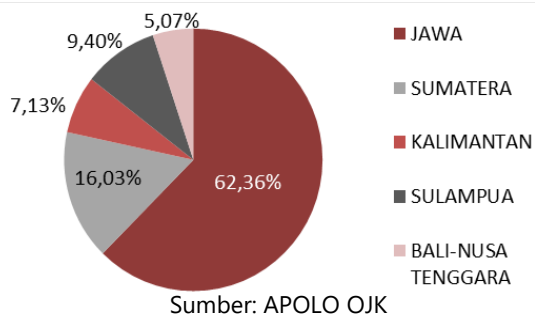
JARINGAN KANTOR	2024 TW I	2024 TW II	Δ
1 Kantor Pusat Operasional	37	37	-
2 Kantor Pusat Non Operasional	53	54	1
3 Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN)	7	7	-
4 Unit Usaha Syariah	18	19	1
5 Kantor Wilayah	138	151	13
6 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.629	2.706	77
7 Kantor Cabang (Luar Negeri)	16	17	1
8 Kantor Cabang Pembantu dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri	19	19	-
9 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	18.847	19.025	178
10 Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	7	6	(1)
11 Kantor Fungsional (KF)	1.165	1.172	7
12 Kantor dibawah KCP KCBLN yg tidak termasuk KF	9	9	-
13 Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	5	5	-
14 Terminal Perbankan Elektronik (ATM/CDM/CRM)	90.601	91.197	596
<b>JARINGAN KANTOR UUS</b>			-
15 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	142	159	17
16 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	222	225	3
17 Kantor Kas	-	-	-
18 Kantor Fungsional	189	189	-
19 <i>Payment Point</i>	-	-	-
20 Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	-	-	-
21 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	164	163	(1)
22 Layanan Syariah Bank Umum	231	231	-
<b>TOTAL</b>	<b>114.500</b>	<b>115.392</b>	<b>892</b>

Sumber: APOLO OJK

Ket: merupakan jaringan kantor BUK di seluruh Indonesia

Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor BUK di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 71.923 jaringan kantor (62,36%), diikuti pulau Sumatera 18.489 (16,03%), Sulampua 10.840

(9,40%), Kalimantan 8.226 (7,13%), dan Bali-Nusa Tenggara 5.849 (5,07%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat peningkatan jaringan kantor di seluruh wilayah dengan kenaikan terbanyak di wilayah Jawa dan Sumatera.

**Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BUK**

## 2.2 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

### 2.2.1 Perizinan

Pada triwulan II-2024, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui, yaitu permohonan penggabungan dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- Persetujuan penggabungan BPR, yaitu pada:
  - PT BPR Anugrah Swakerta, PT BPR Luhur Langgeng Utama, PT BPR Panca Arta Graha, dan PT BPR Fidusia Civitas ke dalam PT BPR Artharindo
- Pencabutan izin usaha BPR, yaitu pada:
  - Koperasi PT BPR Sembilan Mutiara
  - PT BPR Bali Artha Anugerah
  - PT BPR Dananta
  - PT BPR Bank Jepara Artha

### 2.2.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan II-2024, terdapat 1.383 BPR dengan 8.304 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 5.994 di antaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Terdapat perbedaan data perubahan jumlah BPR dengan data perizinan disebabkan antara lain terdapat perbedaan antara periode perizinan dengan periode efektif berlakunya perizinan karena

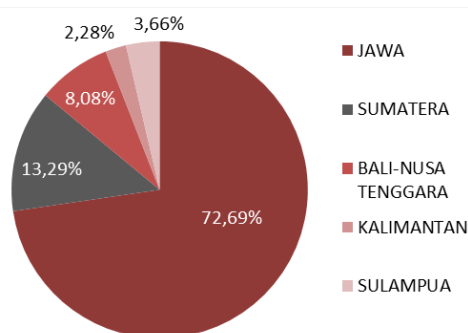
adanya masa proses transisi, termasuk *carry over* hasil perizinan periode sebelumnya.

**Tabel 27 Jaringan Kantor BPR**

JARINGAN KANTOR	2024		Δ
	TW I	TW II	
- Kantor Pusat (KP)	1.389	1.383	(6)
- Kantor Cabang (KC)	1.939	1.939	-
- Kantor Kas (KK)	2.707	2.672	(35)
- ATM	390	391	1
- <i>Payment Point</i>	2.122	1.919	(203)
<b>TOTAL</b>	<b>8.547</b>	<b>8.304</b>	<b>(243)</b>

Sumber: OJK

Berdasarkan lokasi, penyebaran jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan *payment point*) masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 72,69% (6.036 jaringan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 13,29% (1.104 jaringan kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan jaringan kantor hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan terbanyak di wilayah Sumatera dan Jawa, sementara di sisi lain terdapat kenaikan jumlah jaringan kantor di wilayah Sulawesi sebanyak tiga jaringan kantor.

**Grafik 43 Penyebaran Jaringan Kantor BPR**

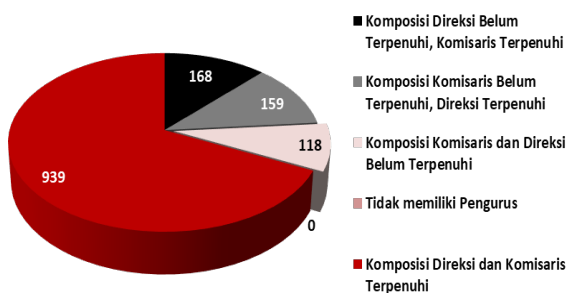
### 2.2.3 Tata Kelola

Penerapan tata kelola BPR dan BPRS diatur dalam masing-masing POJK Nomor 4/POJK.03/2015 (BPR) dan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 (BPRS) dan dibedakan sesuai besaran modal inti. Besaran modal inti BPR dan BPRS akan menentukan antara lain

syarat pemenuhan minimal jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan jumlah DPS. Selain itu, OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 9 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS guna menyempurnakan 2 POJK sebelumnya tersebut serta mulai efektif digunakan per tanggal 1 Juli 2024.

Sampai dengan Juni 2024, terdapat 939 BPR yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 118 BPR yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, persaingan remunerasi dengan LJK lain, serta keterbatasan SDM yang memiliki persyaratan minimal pengalaman dan sertifikasi profesi sebagaimana dipersyaratkan ketentuan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola BPR, OJK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada BPR.

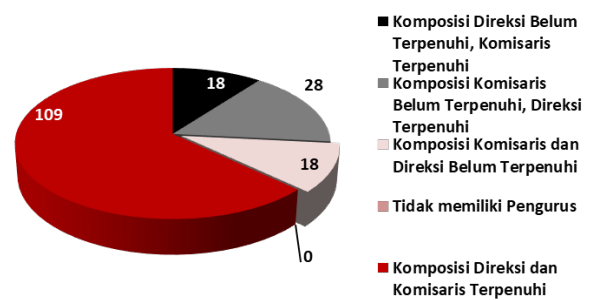
**Grafik 44 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**



Sumber: OJK

Untuk BPRS, sampai dengan Juni 2024, terdapat 109 BPRS yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 18 BPRS yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan.

**Grafik 45 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**



Sumber: OJK

## 2.3 Perbankan Syariah

### 2.3.1 Perizinan

Pada triwulan II-2024, tidak terdapat proses perizinan kelembagaan untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Untuk perizinan BPRS, pada triwulan II-2024 terdapat satu jenis permohonan perizinan BPRS yang telah disetujui yaitu permohonan pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saka Dana Mulia.

### 2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan II-2024, terdapat 6.932 jaringan kantor BUS, dengan tiga di antaranya merupakan jaringan kantor luar negeri (dua KC dan satu terminal elektronik). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, secara total terdapat peningkatan sebanyak 76 jaringan kantor BUS, dengan peningkatan terbanyak pada terminal elektronik dan Kantor Fungsional BUS.

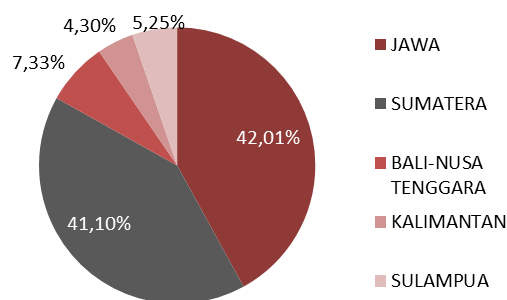
**Tabel 28 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah**

JARINGAN KANTOR	2024		Δ
	TW I	TW II	
1 Kantor Pusat Operasional Bank Umum Syariah	7	7	-
2 Kantor Pusat Non Operasional Bank Umum Syariah	8	8	-
3 Kantor Wilayah Bank Umum Syariah	21	21	-
4 Kantor Cabang (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	411	410	(1)
5 Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank Umum Syariah	2	2	-
6 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	1.580	1.582	2
7 Kantor Fungsional Bank Umum Syariah	344	356	12
8 Kantor Perwakilan Bank Umum Syariah di Luar Negeri	-	-	-
9 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) Bank Umum Syariah	4.483	4.546	63
<b>Layanan Syariah Bank Umum</b>	<b>6.856</b>	<b>6.932</b>	<b>76</b>

Sumber: APOLO OJK

Sebaran jaringan kantor BUS dalam negeri sebagian besar berada di wilayah Jawa dan Sumatera masing-masing memiliki porsi 42,01% (2.911 kantor) dan 41,10% (2.848 kantor). Selanjutnya diikuti Bali-Nusa Tenggara (7,33%, 508 kantor), Sulampua (5,25%, 364 kantor), dan Kalimantan (4,30%, 298 kantor). Terdapat peningkatan jaringan kantor di seluruh wilayah, dengan peningkatan terbanyak di wilayah Jawa dan Bali-Nusa Tenggara.

**Grafik 46 Penyebaran Jaringan Kantor BUS**



Sumber: APOLO OJK

Untuk BPRS, pada periode laporan terdapat 926 jaringan kantor, berkurang 13 jaringan kantor dari triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, sebaran jaringan kantor BPRS umumnya terkonsentrasi di wilayah Jawa (67,82%, 628 kantor), diikuti Sumatera

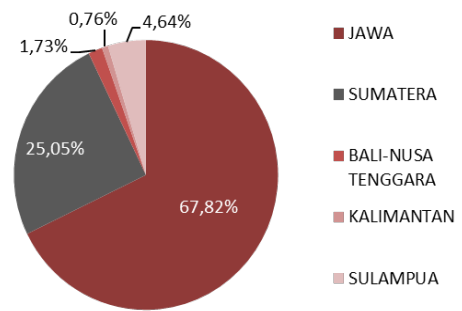
(25,05%, 232 kantor), Sulampua (4,64%, 43 kantor), Bali-Nusa Tenggara (1,73%, 16 kantor), dan Kalimantan (0,76%, 7 kantor).

**Tabel 29 Jaringan Kantor BPRS**

JARINGAN KANTOR	2024		Δ
	TW I	TW II	
- Kantor Pusat (KP)	174	173	(1)
- Kantor Cabang (KC)	217	216	(1)
- Kantor Kas (KK)	296	289	(7)
- ATM	71	71	-
- <i>Payment Point</i>	181	177	(4)
<b>TOTAL</b>	<b>939</b>	<b>926</b>	<b>(13)</b>

Sumber: Laporan Bulanan BPRS, diolah

**Grafik 47 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS**



Sumber: OJK

# 6 Koordinasi Antar Lembaga terkait Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

## 6 Koordinasi Antar Lembaga Terkait Perbankan

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia pada triwulan II-2024 masih dalam kondisi terjaga di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global, seiring ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik dunia yang masih tinggi. Selain itu, OJK juga turut aktif dalam fora internasional, antara lain *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*, *Working Committee-ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF)*, dan *Financial Sector Assessment Program (FSAP) Review Indonesia 2023/2024*. Pada periode laporan juga terdapat pengembangan industri perbankan melalui diterbitkannya *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Bank Perekonomian Rakyat/BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah/BPRS (RP2B) 2024-2027*.

### 1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), maka Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melakukan koordinasi secara berkala dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada Selasa, 29 Juli 2024, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS melaksanakan Rapat Berkala KSSK III tahun 2024. Dalam siaran Pers KSSK tersebut disimpulkan bahwa, **Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan II-2024 tetap terjaga di tengah peningkatan tekanan di**

**pasar keuangan global, seiring ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik dunia yang masih tinggi.** OJK bersama dengan KSSK akan terus melakukan dan memperkuat koordinasi serta meningkatkan kewaspadaan seiring masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik dunia, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK menerapkan langkah kebijakan sebagai berikut:

- 1) OJK senantiasa mencermati dinamika global dan potensi dampak rambatannya terhadap sektor jasa keuangan agar dapat mengambil langkah antisipatif, serta meminta industri jasa keuangan untuk melakukan langkah mitigasi yang diperlukan. Koordinasi dengan anggota KSSK juga terus ditingkatkan, disertai komitmen untuk mengeluarkan kebijakan yang

- dibutuhkan secara tepat guna dan tepat waktu;
- 2) Seiring dengan aktivitas ekonomi yang membaik pasca-pandemi dan terkait restrukturisasi KUR, OJK mendukung penuh program restrukturisasi KUR yang pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang ada saat ini, yaitu POJK mengenai kualitas aset (POJK Nomor 40/POJK.03/2019) yang mana restrukturisasi dilakukan pada debitur yang memiliki prospek usaha. Oleh karena itu, kerangka regulasi yang ada saat ini telah tersedia dan mencukupi untuk terlaksananya program restrukturisasi KUR dalam rangka mendorong kinerja UMKM nasional;
  - 3) Sebagai upaya penyelarasan dan pengkinian ketentuan dengan UU P2SK, OJK telah menerbitkan POJK No.5/2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. Selain itu, OJK telah menindaklanjuti dan menyelaraskan dengan UU P2SK terutama mengenai penyesuaian nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, serta persyaratan mengenai BPR dan BPR Syariah yang dapat melakukan penawaran umum dalam POJK No.7/2024 tentang BPR dan BPR Syariah;
  - 4) Sejalan dengan kebijakan sebelumnya di sektor perbankan, OJK mengakhiri kebijakan stimulus Covid-19 sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) terkait penilaian kualitas aset pembiayaan pada 17 April 2024. Berakhirnya kebijakan stimulus ini konsisten dan sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, kecukupan pencadangan, dan pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Pemerintah;
  - 5) Terkait penyempurnaan ketentuan pada aspek *governance* dan *prudential* atas kegiatan pembiayaan transaksi efek baik margin atau *short sell* kepada nasabah oleh Perusahaan Efek, sekaligus memberikan ketentuan khusus pelaksanaan *short selling* oleh *Liquidity Provider*, OJK telah menerbitkan POJK No.6/2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek. OJK juga mengeluarkan ketentuan terkait penggunaan polis asuransi secara elektronik/digital dan tata kelola pengembangan produk asuransi yakni POJK No.8/2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi;
  - 6) Sebagai tindak lanjut implementasi POJK No.3/2024 tentang Penyelenggaraan ITSK, OJK akan menerima dan melakukan proses penilaian bagi calon Peserta *Regulatory Sandbox* dan Penyelenggara ITSK dari klaster model bisnis *Innovative Credit Scoring* (ICS) yang telah ditetapkan untuk diatur dan diawasi oleh OJK. Selain itu, OJK akan menerbitkan ketentuan terkait Pemingkat Kredit Alternatif dan petunjuk pelaksanaan dari *Regulatory Sandbox*, Pendaftaran dan Pelaporan Penyelenggara ITSK, serta Asosiasi di Sektor ITSK.
  - 7) Dari sisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan

Pelindungan Konsumen (PEPK), saat ini OJK sedang memfinalisasi ketentuan dasar penguatan pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang terdiri dari 16 Kementerian/Lembaga; dan

- 8) Dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap meningkatnya penipuan secara *online* yang memanfaatkan layanan keuangan seperti transfer rekening bank, *virtual account*, serta *top-up* pada dompet digital (*e-wallet*), maka OJK bersama regulator, lembaga, dan pihak terkait akan membentuk *anti-scam centre* yang ditargetkan akan beroperasi dalam waktu dekat, serta akan menerbitkan Panduan Resiliensi Digital (*Digital Resilience*) yang dapat digunakan oleh bank dalam mendukung proses akselerasi transformasi digital.

KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko ketidakpastian ekonomi global dan potensi ketegangan geopolitik dunia yang eskalatif terutama rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat *coordinated policy response* dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK.

Dengan telah diundangkannya UU P2SK, Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen untuk menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Oktober 2024.

## 2. Koordinasi Bilateral

### 2.1. OJK dan BI

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman (NK) antara Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK. Pada triwulan II-2024, OJK dan BI telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait:

- 1) Pembentukan *task force* perizinan dan/atau persetujuan sektor jasa keuangan terintegrasi yang tertuang dalam Keputusan Bersama BI-OJK;
- 2) Pemutakhiran daftar bank sistemik yang juga melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- 3) Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan (TTIS SK) yang tertuang dalam NK BI-OJK, beserta dengan Petunjuk Pelaksanaan tentang Mekanisme Kerja Sama dan Koordinasi TTIS SK dimaksud;
- 4) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Bersama tentang Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi antara BI dan OJK yang merupakan turunan dari NK Koordinasi dan Kerjasama BI dan OJK;
- 5) Persiapan dan sosialisasi implementasi *primary dealer* untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
- 6) Rencana implementasi kebijakan makprudensial rasio pendanaan luar negeri;

- 7) Pembahasan kondisi industri perbankan maupun individu bank tertentu;
- 8) Pembahasan dan penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh kedua lembaga;
- 9) Pertukaran data untuk mendukung pelaksanaan tugas kedua lembaga; dan
- 10) Sosialisasi ketentuan terkait sektor perbankan.

## 2.2. OJK dan LPS

Sesuai dengan amanat UU PPKSK serta bentuk respons atas diterbitkannya UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS yang memerlukan koordinasi yang lebih intensif sesuai dengan Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan II-2024 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS yaitu:

- 1) Pertukaran data dan pengkinian kondisi Bank Umum maupun BPR/BPRS;
- 2) Penginian petunjuk pelaksanaan mengenai pertukaran data dan/atau informasi;
- 3) Persiapan dan pelaksanaan resolusi BPR/BPRS;
- 4) Implementasi kebijakan penyusunan rencana resolusi;
- 5) Penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Diskusi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kedua Lembaga.

OJK, BI, dan LPS juga melakukan koordinasi dalam hal pemutakhiran Bank Sistemik periode April s.d. September 2024. Selain itu, ketiga Lembaga tersebut bekerja dalam hal pembahasan perpanjangan NK BI, OJK, dan LPS mengenai Pembangunan dan Pemeliharaan Integrasi Pelaporan di Sektor Perbankan.

## 3. Partisipasi OJK dalam Fora Internasional

### 3.1. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

OJK merupakan anggota BCBS. OJK terlibat aktif dalam berbagai pembahasan baik di BCBS Level 1 maupun Groups BCBS di Level 2 dan Level 3 yaitu *Supervisory Cooperation Group (SCG)*, *Policy and Standard Group (PSG)*, *Risk and Vulnerability Assessment Group (RVG)*, *Task Force on Climate-related Financial Risk (TCFR)*, *Accounting and Audit Expert Group (AAEG)*, dan *Financial and Technology Group (FTG)*. Pada Triwulan II-2024, OJK aktif berpartisipasi dalam menghadiri berbagai pertemuan dan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) *BCBS Committee*  
 Pertemuan *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) meeting dan International Conference of Banking Supervisors (ICBS)* pada tanggal 23-25 April 2024 di Basel, Swiss yang membahas beberapa agenda yaitu *exchange of views on market and supervisory developments*, tindak lanjut atas *banking turmoil* tahun 2023, BCBS dapat menyepakati substansi dalam *analytical note* untuk tiga isu yang menjadi *concern* pada *banking turmoil* 2023 yaitu (i) risiko likuiditas; (ii) *efektivitas loss absorption* instrumen

Modal Inti Tambahan (*Additional Tier/AT 1*) dalam fase bank sebelum resolusi (*going-concern*) dan (iii) perlakuan untuk *Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)*, *counterparty credit risk management*, dan *digitalization of finance*.

Selain pertemuan BCBS, pada ICBS juga dilakukan publikasi revisi *Core principles for effective banking supervision (Basel Core Principles/BCP)*. BCP memuat standar prudensial baik dari sisi pengaturan maupun pengawasan perbankan. Revisi terhadap BCP dilakukan dengan tujuan untuk merefleksikan perkembangan pengawasan dan pengaturan, perubahan struktural yang mempengaruhi sistem perbankan dan beberapa *lesson learned* sejak 2012 (seperti Covid-19, isu geopolitik, 2023 *Banking Turmoil*, digitalisasi, dan risiko iklim).

## 2) *Policy and Standard Group (PSG)*

Pertemuan pada tanggal 28 – 29 Mei 2024 secara virtual, yang antara lain membahas *exchange of views on recent development*, terutama mengenai isu tindak lanjut *banking turmoil* di Swiss, revisi standar prudensial aset kripto, *non-maturity deposit*, standar *interest rate risk in the banking book*, isu makroprudensial, dan penerbitan *Technical Amendment (TA)* dan *Frequently Asked Questions (FAQs)* untuk mengklarifikasi substansi pada paragraf-paragraf standar Basel terkait risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang bersifat multitafsir.

## 3) *Risk and Vulnerability Assessment Group (RVG)*

Pertemuan virtual pada tanggal 14 Mei dan 11 Juni 2024 dengan topik pembahasan hasil survei kepada anggota atas risiko perbankan di masing-masing yuridiksi, diskusi terkait risiko atas penerapan *Generative AI*, hasil pendalaman atas risiko *interconnectedness* antara bank dengan IKNB, diskusi *banking as a service (BaaS)*, diskusi pemetaan risiko pada *private credit*. dan hasil pendalaman untuk meningkatkan komparabilitas hasil *global stress test*.

## 4) *Supervisory and Cooperation Group (SCG)*

OJK menghadiri pertemuan *Supervisory Cooperation Group (SCG) Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* pada tanggal 25-26 Juni 2024 di London dengan pokok pembahasan, yaitu pertukaran informasi perkembangan pengawasan terkini, manajemen risiko terhadap penyedia jasa pihak ketiga (*third party service provider/TPSP*), *non-financial risks*, *supervisory judgment and effectiveness*, pengawasan terhadap *interest rate risk in the banking book (IRRBB)*, *business model analysis*, studi kasus mengenai risiko kredit pada *Commercial Real Estate*, review terhadap *Principles for the Management of Credit Risk*, dan pengawasan risiko likuiditas.

## 5) *Task Force on Climate-related Financial Risk (TCFR)*

- a. Pertemuan virtual pada 14 Mei 2024 dengan topik pembahasan *update* dari berbagai yuridiksi mengenai

implementasi manajemen risiko iklim, termasuk analisis atas *action plan* terkait iklim sektor jasa keuangan dan analisis skenario terkait iklim. Selain itu juga dilakukan update terkait pelaporan *climate-related financial risks*, termasuk tanggapan atas *consultation documents* yang berisi mengenai pengungkapan/*disclosure* risiko terkait iklim.

- b. *Outreach session* pada 12 Juni 2024 yang bertema peran analisis skenario iklim dalam penguatan manajemen dan pengawasan *climate-related financial risks*. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain: pembelajaran oleh pengawas terkait uji coba analisis skenario iklim serta uji coba yang dilakukan oleh Bank, peran uji coba analisis skenario iklim, dan desain dari uji coba analisis skenario iklim yang bervariasi berdasarkan tujuannya, serta upaya mengintegrasikannya dalam manajemen risiko dan *risk appetite existing*.

### **3.2. Working Committee – ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF)**

Sehubungan dengan proses rewiu ABIF *guideline* yang masih berlanjut, Bank Negara Malaysia (BNM) dan National Bank of Cambodia (NBC) selaku *co-chair* WC-ABIF 2024-2026 menyampaikan kuesioner kepada *indigenous* ASEAN bank untuk memperoleh informasi dan pandangan yang lebih komprehensif dari industri terkait ABIF dan tantangan ekspansi di kawasan ASEAN

sebagai *Qualified ASEAN Banks (QABs)*. Kuesioner tersebut telah didistribusikan kepada Bank berbadan hukum Indonesia yang memiliki kantor cabang di kawasan ASEAN dan merupakan tindaklanjut dari *private sector outreach* yang sebelumnya dilakukan pada Juni 2023 yang lalu.

Selain itu, dengan berakhirnya ASEAN *Economic Community (AEC) Blueprint* 2016-2015 pada tahun 2025, masing-masing *working committee* diminta untuk menyampaikan prioritas jangka panjang dan *output* yang akan dimuat dalam *AEC strategic plan 2026-2030*.

### **3.3. Financial Sector Assessment Program (FSAP) Review Indonesia 2023/2024**

*Financial Sector Assessment Program (FSAP)* merupakan suatu program bersama antara IMF dan World Bank yang dimulai pada tahun 1999 untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam mengenai sektor keuangan suatu negara. FSAP dilakukan sebagai respon atas krisis keuangan pada tahun 1990-an untuk menilai sistem keuangan mengingat bahwa kondisi kesehatan dan fungsi sektor keuangan suatu negara akan mempengaruhi perekonomian negara tersebut dan dapat berimbas pada kinerja sektor keuangan dan ekonomi negara lain. Bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan global, FSAP dibangun sebagai suatu mekanisme untuk: (i) mengidentifikasi kekuatan dan kerentanan sistem keuangan suatu negara untuk mengurangi krisis; (ii) menentukan bagaimana sumber-sumber risiko utama dikelola; (iii) memastikan pengembangan dan *technical assistance* yang dibutuhkan di sektor keuangan, dan (iv) membantu memprioritaskan respons kebijakan. Indonesia, sebagai anggota G20

dan salah satu *systemically important financial sector* (SIFS), wajib menjalani FSAP setiap 5 tahun sekali oleh IMF dan World Bank. Sebelumnya, Indonesia sudah menjalani FSAP sebanyak 2 kali yaitu pada 2009/2010 dan 2016/2017.

FSAP Indonesia 2023/2024 meliputi 16 area asesmen yang terbagi dalam dua kunjungan, yaitu *First Mission* (sudah dilaksanakan pada tanggal 20 September s.d. 16 Oktober 2023) dan *Second (Main) Mission*. Pelaksanaan *Second Mission* terbagi menjadi dua kunjungan (*visit*), yaitu *1<sup>st</sup> visit* pada 22 Januari s.d. 6 Februari 2024 dan *2<sup>nd</sup> visit* pada 5 s.d. 18 Maret 2024.

*First Mission* melakukan asesmen terhadap delapan area, yaitu: i) *Banking supervision and regulation: Basel core principles* (BCP) dan *Core principles for islamic finance regulation* (CPIFR); ii) *Systemic liquidity management* (SLM); iii) *Financial safety nets and crisis management* (FSN-CM); iv) *Systemic risk analysis/stress-test* (ST); v) *Longterm finance and capital markets development* (LTF); vi) *Climate-related and environmental risks and opportunities* (CERO); vii) *Payment systems* (RTGS); dan viii) *Non-payment system financial market infrastructures* (BI-SSSS). OJK terlibat pada hampir seluruh area, kecuali RTGS dan BI-SSSS.

Pada *Second Mission*, OJK telah menanggapi kuesioner serta permintaan data dan informasi pada delapan area asesmen, yaitu: i) *Corporate Sector Analysis*; ii) *Macroprudential Policy*; iii) *Capital Market Oversight* (IOSCO); iv) *Insurance Oversight and Pension Fund*; v) *Market Conduct Overview*; vi) *Financial Infrastructure/Access*

*to Finance*; vii) *Role of the State*; dan viii) *Fintech and Financial Digitalization*.

Pada Triwulan 2 2024, OJK telah melakukan pemetaan tindak lanjut dan rekomendasi FSAP yang bersifat *immediate* dan *short-term* dan memfinalisasi laporan *Financial System Stability Assessment* (FSSA) FSAP yang akan dibahas pada *IMF Board Meeting* pada Triwulan III 2024.

## 4. Pengembangan Industri Perbankan

### 4.1 Penerbitan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Industri Bank Perekonomian Rakyat/BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah/BPRS (RP2B) 2024-2027

Sebagai upaya mendukung optimalisasi peran Industri BPR dan BPRS dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, OJK telah menerbitkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027. Industri BPR dan BPRS dihadapkan pada berbagai tantangan, baik tantangan global dan domestik yang bersumber dari eksternal, maupun tantangan struktural yang bersumber dari internal BPR dan BPRS. Adopsi teknologi informasi di bidang keuangan yang semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR dan BPRS. Selain itu, BPR dan BPRS juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil, yang diiringi dengan potensi peningkatan risiko kredit atau pembiayaan.

Dari sisi regulasi, berlakunya UU P2SK memberikan BPR dan BPRS ruang yang lebih luas untuk berkembang melalui penguatan kelembagaan, serta perluasan kegiatan usaha dan aktivitas BPR dan BPRS. Meluasnya kegiatan usaha dan aktivitas BPR dan BPRS tentunya tidak luput dari berbagai risiko yang menyertai. Untuk itu, BPR dan BPRS diharapkan memiliki struktur yang lebih kuat untuk mampu menyerap potensi risiko tersebut sehingga dapat memanfaatkan kesempatan dari UU P2SK agar lebih berkembang.

RP2B 2024-2027 memuat arah pengembangan dan penguatan struktural sebagai respon terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh industri BPR dan BPRS ke depan. Secara umum, RP2B terdiri atas empat pilar utama, yaitu:

- 1) Penguatan struktur dan daya saing;
- 2) Akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS;
- 3) Penguatan peran BPR dan BPRS terhadap wilayahnya; dan
- 4) Penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Selain itu, RP2B juga memiliki empat perangkat pendukung (*enabler*) yang terdiri dari kepemimpinan dan manajemen perubahan, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur teknologi

informasi, serta kolaborasi dan kerja sama sektoral/interdep.

RP2B sebagai peta jalan arah kebijakan bagi BPR dan BPRS memiliki fokus utama pada upaya untuk memperbaiki isu-isu fundamental pada BPR dan BPRS, sehingga industri BPR dan BPRS mampu memanfaatkan peluang sekaligus mengelola risiko dengan adanya perluasan kegiatan usaha dan aktivitas BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam UU P2SK. Fokus utama tersebut dituangkan dalam *quick wins* kebijakan, yaitu melalui penguatan permodalan dan akselerasi konsolidasi bagi industri BPR dan BPRS, serta kemudian dilanjutkan dengan penguatan penerapan tata kelola yang baik untuk mendukung bisnis BPR dan BPRS yang berintegritas dan berkelanjutan.

Implementasi RP2B 2024-2027 diharapkan dapat mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas, tangguh, dan berkontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMK dan masyarakat di wilayahnya, sehingga dapat mendukung perekonomian Indonesia serta berkontribusi terhadap inklusi keuangan.

# Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

## LAMPIRAN I

## Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
<b>Indikator Kinerja Perbankan</b>		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
<b>Risiko Kredit</b>		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
9.	Rasio <i>Loan at Risk (LaR)</i>	$\frac{\text{Restru Kredit kol. 1 + Kredit kol. 2 + Kredit NPL}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
<b>Risiko Pasar</b>		
10.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
11.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
<b>Risiko Likuiditas</b>		
12.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
15.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
16.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$
17.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

**LAMPIRAN II****GLOSSARY**

Istilah	Keterangan
<b>A</b>	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid ( $AL = \text{Final Excess Reserve} + \text{Kas} + \text{Penempatan pada BI lainnya} + \text{Reserve Repo}$ ) terhadap Dana Pihak Ketiga ( $DPK = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito}$ ). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> $AL/DPK > 10\%$ .
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> ( $NCD = 30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}$ ). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> $AL/NCD > 50\%$ .
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
<b>B</b>	
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
<b>C</b>	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan $(\text{modal}/\text{ATMR}) \times 100\%$ , dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS ( <i>Bank for International Settlements</i> ) sebesar minimal 8%.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Concentration Ratio</i> (CR)	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.

Istilah	Keterangan
<b>D</b>	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
<b>F</b>	
<i>Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVTOCI)</i>	Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai "tersedia untuk dijual" diakui dalam pendapatan komprehensif lain.
<i>Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)</i>	Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
<b>G</b>	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
<b>I</b>	
<i>Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)</i>	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
<b>K</b>	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMU)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Permenko No.11 Tahun 2017).

Istilah	Keterangan
<b>L</b>	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	Merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPRT merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Contoh: Ormas, LSM, Lembaga Keagamaan. Sumber: BPS
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) dengan total arus keluar bersih ( <i>Net Cash Outflow/NCO</i> ) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan at Risk</i> (LaR)	<i>Loan at Risk</i> (LaR) merupakan indikator risiko atas kredit yang disalurkan yang terdiri atas kredit kolektibilitas 1 (kualitas Lancar) yang telah direstrukturisasi, kolektibilitas 2 (kualitas Dalam Perhatian Khusus), serta kredit bermasalah atau <i>Non Performing Loan</i> (NPL).
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
<b>M</b>	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama ( <i>Common Equity Tier 1</i> ) dan modal inti tambahan ( <i>Additional Tier 1</i> ). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara

Istilah	Keterangan
	modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
<b>N</b>	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
<b>P</b>	
<i>Pembiayaan Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Istilah	Keterangan
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman ( <i>borrowing</i> ) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
<b>R</b>	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset (ROA)</i>	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.

Istilah	Keterangan
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
<b>T</b>	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)

Halaman ini sengaja dikosongkan



**Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan  
Menara Radius Prawiro, Gedung A, Lantai 10  
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia  
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat  
Telp: 021-29600000  
e-mail: dsapi@ojk.go.id**

